

EDISI 56 / 2020

# EDUKASI

## K E U A N G A N

### PELATIHAN BIG DATA

*Pangkas yang tak berbasas, saatnya data berbicara*



## DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	15
PROFIL	19
SERAMBI ILMU	24
TAHUKAH KAMU	38
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	41
CERITA ALUMNI	43
TIPS & TRIK	46
MATA AIR	52
KESEHATAN	54
<i>POINT OF INTEREST</i>	56
RESENSI	60
GALERI	62
KANG EDU	64

## Susunan Redaksi

### **PENANGGUNG JAWAB**

Sekretaris BPPK

### **PEMIMPIN REDAKSI**

Sugeng Satoto

### **SEKRETARIAT**

Abdul Aziz Maghfur

Dodi Septariza

Naseh Iskandar

Fitria Sri Wulandari

Thalia Maudina

### **REDAKTUR**

Pilar Wirotama

Tri Wibowo

Rachmatunnisya

M. Shokhi

Hestin Parmawati

Wisnu Nugrahini

Iki Rizal Apriandi

Rio Suareski

Eri Hariyanto

Johan Sagitta

Andi Manaek

Bungkus Sasongko

Purnomo

Andita Trias Nur Azizah

Hartono

Muhammad Hikmah

Gladie Anggriawan Gupita

Haris Premadi

Rochi Agustina

Inwan Hadiansyah

Irwandi Hidayat

Ferry Irawan

### **EDITOR**

Sudrajat

Ari Sandi Robert

Retyan Laksita Mutiary

Ardes Martua Sitanggung

Yohana Tolla

Muhammad Fath Kathin

Ridwan Sidik Kurniawan

Bima Lingga Sakti

Luqman Hakim

Arimbi Putri

### **DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER**

Victorianus M. I. Bimo Adi

Imam Asma Nur Alam Marbun

Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.

Artikel dapat dikirimkan ke [edukasikeuangan@kemenkeu.go.id](mailto:edukasikeuangan@kemenkeu.go.id).

Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

### **ALAMAT REDAKSI**

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7204131

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

TAHUKAH  
KAMU



Pajak

Pada tahun 2020,  
**PUSDIKLAT PAJAK** akan menyelenggarakan  
20 pelatihan berbasis e-learning yang  
diikuti oleh 311 peserta lho.

**CEK JADWAL PELATIHANMU YUK**  
[semantik.bppk.kemenkeu.go.id/calendar](http://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/calendar)

follow us:  
 @pusdiklat.pajak



## SALAM REDAKSI

*Membuat KTP, mendaftarkan NPWP, melaporkan harta kekayaan, menabung di bank, dan sederet kegiatan lainnya adalah investasi data yang sangat krusial di era serba digital saat ini. Seringkali kita tidak tersadarkan, setiap unit data yang kita berikan kepada penyedia jasa atau layanan menjadikan sebuah bank data yang sangat masif. Bank data itu ibarat pisau bermata dua, jika kita bisa memanfaatkan data tersebut dengan benar maka akan menjadi potensi yang sangat positif, namun berlaku juga sebaliknya.*

*Itulah sebabnya kompetensi analisis data menjadi primadona baru di berbagai instansi, tak terkecuali sektor pemerintahan. Kebutuhan tersebut lah yang mencoba dijawab melalui pelatihan pengolahan big data bertajuk "Data Driven Decision Making" dan "Data Analytics" yang diselenggarakan Pusdiklat Keuangan Umum. Kami sajikan ulasan komprehensifnya hanya dalam rubrik Liputan Utama.*

*Sejumlah perombakan birokrasi juga terjadi di Kementerian Keuangan, memunculkan sosok baru yang menduduki posisi sebagai staf ahli Menteri Keuangan. Salah satunya adalah Nufransa Wira Sakti, mantan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak yang menghiiasi rubrik Profil pada edisi kali ini.*

*Anda juga tentu tidak ingin melewatkan sejumlah tulisan segar terkait pengalaman tugas belajar pada rubrik Cerita Alumni, pengetahuan singkat tentang wabah virus Corona melalui rubrik Tahukah Kamu dan Kesehatan, serta rasakan sensasi berjalan-jalan ke daerah Parahyangan dan Kota Apel lewat rubrik Galeri dan Point of Interest. Semua sajian renyah nan bermanfaat dapat Anda nikmati di setiap edisi Majalah Edukasi Keuangan. Selamat membaca!*

## Januari - Februari



### BPPK TERIMA KUNJUNGAN BENCHMARK PUSDIKLAT BATAN

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) menerima kunjungan patok banding (*benchmark*) dari Pusdiklat Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada hari Kamis (13/2) pagi. Kedatangan peserta *benchmark* Pusdiklat BATAN bermaksud untuk mempelajari strategi *corporate university* (Corpu) yang telah berjalan di BPPK sehingga dapat diterapkan pada proses bisnis mereka.



### BPPK LAKUKAN RAPAT KERJA DENGAN MENTERI KEUANGAN

BPPK melakukan rapat kerja koordinasi dengan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati yang berlangsung di Aula Sekretariat BPPK. Dalam rapat kerja tersebut, Kepala BPPK Rionald Silaban memaparkan capaian dan transformasi pembelajaran BPPK dalam bentuk *digital learning* yang sedang digalakkan akhir-akhir ini.



FOTO :  
ABDUL 'AZIZ MAGHFUR  
SENO ADI NUGROHO  
LUQMAN HAKIM

### MUTASI WIDYAISWARA PERHATIKAN KEBUTUHAN UNIT BPPK

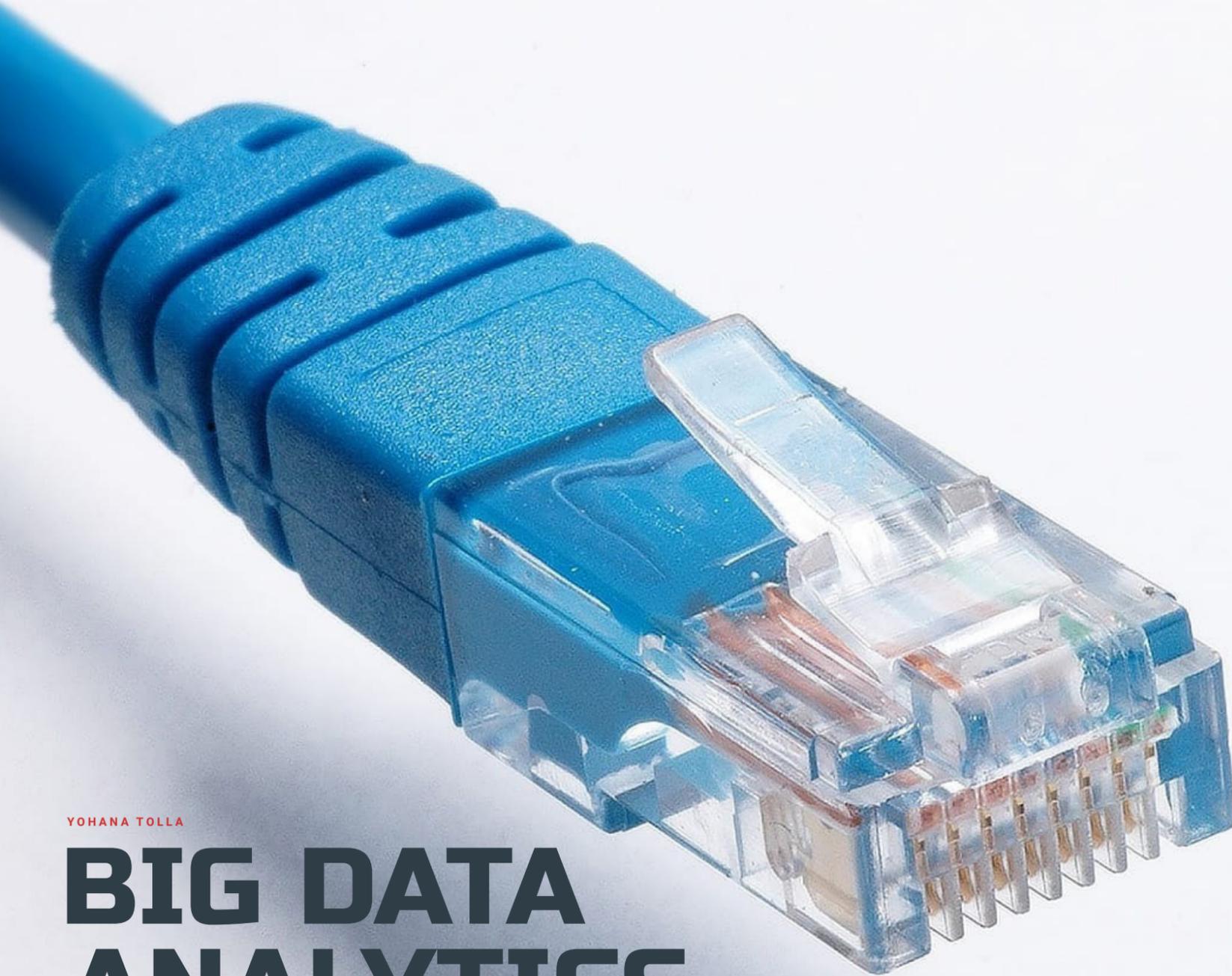
Kepala BPPK, Rionald Silaban melantik 16 widyaiswara di lingkungan BPPK yang mengalami perpindahan/mutasi unit kerja. Menurut Rionald, mutasi widyaiswara ini terlaksana dengan memperhatikan kebutuhan widyaiswara pada masing-masing unit.



### RAKERNAS DAN PELANTIKAN DPP IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA 2019-2023

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia (DPP-IWI) melantik kepengurusan IWI periode 2019-2023. Dalam kepengurusan periode yang baru ini, DPP-IWI menjalankan roda organisasinya dengan dinahkodai oleh Boediarso Teguh Widodo, Widyaiswara BPPK, yang dipercaya menjadi Ketua Umum DPP-IWI periode 2019-2023.





YOHANA TOLLA

# BIG DATA ANALYTICS

## SENJATA BARU DI ERA INFORMASI

**E**ra revolusi industri 4.0 ditandai dengan era ledakan data. Patut disadari bahwa data merupakan senjata penting bagi organisasi. Di tengah persaingan, ketepatan prediksi menjadi hal yang sangat dibutuhkan, terutama dalam pengambilan keputusan. Di tataran pemerintahan, dukungan data yang akurat juga dibutuhkan, terutama dalam penentuan dan perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan data, terutama data-data yang bervolume besar dan kompleks, sangat dibutuhkan.

Saat ini, teknologi *big data* sangat diminati. Dengan kemampuan mengolah data volume besar dengan cepat, teknologi ini dianggap mampu memberikan solusi dalam pengambilan keputusan. Apa yang dimaksud dengan *big data*? Ed Dumbill (2013) menyatakan bahwa *big data* adalah data yang melebihi kapasitas pemrosesan sistem *database* konvensional. Data terlalu besar, bergerak terlalu cepat, atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur basis data yang telah ada. Lebih lanjut Dumbill menyebutkan bahwa agar data tersebut bisa bernilai, kita harus memilih cara alternatif untuk memprosesnya. Laney (2001) mengidentifikasi tiga dimensi, biasa disebut tiga V *Big Data*, yaitu *Volume*, *Velocity*, dan *Variety*.

*Volume* mengacu pada jumlah data yang diciptakan, berkaitan dengan semua data berasal dari berbagai sumber, seperti catatan penjualan, catatan hasil eksperimen, catatan *real-time sensors IoT* dan lain-lain. Sebelum dianalisis, data-data tersebut melalui tahapan *preprocessed*. *Velocity* mengacu pada kecepatan data yang sedang dibuat. Analisis data besar akan menelan, menghubungkan, dan menganalisis sumber data, kemudian menghasilkan jawaban berdasarkan pada permintaan. Yang terakhir adalah *Variety*, merujuk baik untuk jenis data yang dikumpulkan dan kurangnya seragam struktur data. Data yang besar mungkin melibatkan beberapa sumber data simultan yang tidak mungkin jika diintegrasikan.

Selama ini yang sering terjadi adalah banyaknya data yang tersedia di organisasi, yang didapat dari proses bisnisnya, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses untuk menyingkap pola-pola tersembunyi, korelasi, serta informasi lainnya yang dapat membantu organisasi dalam memprediksi, mendeskripsikan, mendiagnosa keadaan atau pola-pola dalam upaya pengambilan keputusan atau kebijakan.

Saat ini, pemanfaatan *big data analysis* sudah sering dilakukan, baik dari sektor swasta maupun dari sektor publik atau pemerintahan. Pada sektor pemerintahan, teknologi *big data* sudah dimanfaatkan untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Di Kementerian Komunikasi dan Informasi, *big data* dimanfaatkan dalam melakukan *monitoring* dan analisis konten media terkait kebijakan dan program pemerintah. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memanfaatkan Teknologi Big Data untuk memonitor LPSE di seluruh Indonesia dengan *system alert* untuk *warning*, *security*, atau *capacity overload*, serta menyediakan data informasi tentang perkembangan pengadaan disetiap LPSE.

Pada pemerintah kota, teknologi *Big Data* telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Di tahun 2015, Pemkot Bandung membangun *Digital Command Center*. Selain itu, dengan memanfaatkan *social media analytics*, Pemkot Bandung dapat mengetahui topik hangat apa saja yang sedang dibahas oleh masyarakat Bandung dan membantu memetakan masalah di setiap kecamatan. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan evaluasi serta memberikan respon yang cepat dan akurat.

Begitu besarnya manfaat yang didapat dari *big data* membuat organisasi berlomba-lomba untuk menerapkan teknologi tersebut dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Namun penerapan teknologi tidak terlepas dari adanya

potensi kendala yang muncul. Emyana Ruth Eritha Sirait (2016) menyebutkan lima tantangan yang harus dihadapi organisasi dalam menerapkan teknologi *big data*. Yang pertama adalah ketersediaan data itu sendiri. Ketersediaan serta akses terhadap data, baik data lama maupun baru menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam menerapkan teknologi *big data*. Yang kedua adalah standarisasi data yang dilanjutkan dengan integrasi data pemerintah. Privasi data juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Semangat keterbukaan data perlu diiringi dengan perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Yang keempat adalah kompetensi SDM, dan terakhir adalah infrastruktur penunjang.

Menjawab tantangan tersebut, BPPK sebagai unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengembangan bertangungjawab mengembangkan pelatihan *Data Driven Decision Making* dan *Data Analytics Specialist*. Secara umum pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN khususnya bagi pejabat/pegawai yang akan diberikan penugasan untuk melakukan *data analytics* di unitnya masing-masing. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta dapat memberikan nilai tambah dalam proses pengambilan keputusan berbasis data.

\*\*\*

*Selama ini yang sering terjadi adalah banyaknya data yang tersedia di organisasi, yang didapat dari proses bisnisnya, namun belum dimanfaatkan dengan maksimal.*

RIDWAN SIDIK KURNIAWAN

# DATA MELIMPAH SAATNYA PILAH DAN OLAH

Analisis terhadap *big data* bukanlah merupakan suatu hal yang sederhana, diperlukan kompetensi yang cukup untuk dapat melakukan analisis *big data* sehingga *big data* yang tersedia dapat diolah menjadi informasi penting yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan.

**A**pakah Anda pernah berbelanja menggunakan situs atau *platform* belanja *online*? Jika pernah, mungkin Anda pernah menjumpai beberapa produk yang direkomendasikan untuk anda pada platform tersebut.

Produk-produk yang direkomendasikan tersebut muncul berdasarkan data yang dimiliki oleh *user*, atau bisa juga berupa tren yang ada pada saat itu. Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga mengetik sebuah kata kunci 'panci' pada kolom pencarian suatu situs/*platform* belanja *online*. Kemungkinan besar ibu tersebut nantinya akan mendapatkan rekomendasi produk berupa peralatan dapur lainnya, yang muncul berdasarkan riwayat penelusuran pada situs/*platform* tersebut sebelumnya. Contoh lainnya, ibu tersebut juga bisa mendapatkan rekomendasi atas produk-produk yang menjadi tren pada suatu waktu, misalnya pada saat menjelang hari raya lebaran, kemungkinan produk yang direkomendasikan berupa mukena dan baju muslim yang sedang menjadi tren saat itu. Tren tersebut bisa ditentukan berdasarkan data pembelian dan pencarian oleh para pengguna *platform* tersebut pada waktu tertentu. Dengan memunculkan rekomendasi produk kepada pengguna *platform*, diharapkan pembelian yang terjadi melalui *platform* tersebut akan mengalami peningkatan.

Ilustrasi tersebut merupakan gambaran tentang salah satu pemanfaatan *big data*. *Big data* mengacu pada *dataset* yang memiliki ukuran besar, baik dari segi variasi, volume, atau pergerakan data. Dewasa ini *big data* memang sering digunakan sebagai bahan analisis yang dapat membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Meskipun demikian, proses analisis terhadap *big data* bukanlah merupakan suatu hal yang sederhana, diperlukan kompetensi yang cukup untuk dapat melakukan analisis *big data* sehingga *big data* yang tersedia dapat diolah menjadi informasi penting yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Kondisi tersebut direspons dengan baik oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Melalui Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK menyelenggarakan pelatihan *Data*

*Driven Decision Making & Data Analytics* yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Keuangan, terutama dalam bidang pengolahan *big data*.

## IMPLEMENTASI INISIATIF STRATEGIS

Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan Negara, Kementerian Keuangan berdiri di atas basis data yang sangat besar. Data tersebut tersebar pada unit-unit yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak misalnya, memiliki data wajib pajak se-Indonesia lengkap dengan data harta kekayaan dan pajak yang dilaporkan. Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki data eksportir, sementara Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki data pengeluaran seluruh satker yang berada di seluruh Indonesia. Banyaknya data tersebut menyebabkan data yang ada tidak bisa lagi dianalisis hanya dengan menggunakan pendekatan *database* biasa, sehingga perlu diolah menggunakan pendekatan *big data*. Apalagi, tidak semua data yang ada sekarang ini merupakan data yang terstruktur, ada juga *unstructure* data seperti gambar dan video yang tersebar pada sosial media, yang jika diolah dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi instansi terkait. Di balik banyaknya data berharga yang terdapat di Kementerian Keuangan tersebut, pemanfaatan atas data tersebut masih belum maksimal. Pada waktu yang bersamaan, jumlah SDM yang mampu mengolah data tersebut masih sangat terbatas sehingga perlu diadakan peningkatan kompetensi untuk menambah kemampuan pegawai dalam pengolahan dan pemanfaatan data tersebut.

Berangkat dari inisiatif strategis, Pusdiklat Keuangan Umum untuk pertama kalinya menyelenggarakan pelatihan *Data Driven Decision Making & Data Analytics* pada tahun 2019. Selama tahun 2019 tersebut, Pusdiklat Keuangan Umum berhasil menyelenggarakan pelatihan *data analytics* sebanyak dua kali. Pelatihan pertama diselenggarakan dengan peserta pelatihan yang semuanya berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian

Keuangan. Sedangkan untuk pelatihan kedua, pesertanya lebih heterogen yang di antaranya berasal dari Bea Cukai, BPPK, dan Pushaka.

Dalam pelatihan *data analytics* yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum tersebut terdapat dua spesialisasi, yaitu *Data Engineer* dan *Data Scientist*. Keduanya memiliki *role* tersendiri. *Data Engineer* lebih berperan dalam menyiapkan data, sedangkan *data scientist* berperan mengolah lebih lanjut data tersebut dengan metode statistik. Terdapat perbedaan desain yang mendasar pada kedua pelatihan yang telah diselenggarakan tersebut, dimana pada pelatihan pertama, pelatihan *data engineer* dan *data scientist* diperlakukan sebagai pelatihan yang terpisah, sedangkan pada pelatihan selanjutnya, kedua pelatihan ini digabung. Meskipun demikian, tidak semua materi pelatihan digabung. Untuk materi yang beririsan, kedua pelatihan ini digabung menjadi satu kelas. Pada pertengahan pelatihan, materi yang diterima pada kedua pelatihan tersebut berbeda menyesuaikan dengan spesialisasi masing-masing, sehingga kelasnya harus dipisah. Selain itu, pada pelatihan kedua, dilengkapi dengan pelatihan *data driven decision making*. Pelatihan ini ditujukan untuk para *business leader* atau dengan kata lain ditujukan untuk para pimpinan. Namun demikian, para peserta pelatihan *data engineer* dan *data scientist* juga diwajibkan untuk mengikuti pelatihan ini. Sebaliknya, para peserta pelatihan *data driven decision making* tidak diwajibkan mengikuti pelatihan *data engineer* dan *data scientist*. Desain pelatihan yang digunakan pada pelatihan kedua tersebut juga digunakan sebagai *piloting*, yang nantinya akan dipakai sebagai model pelatihan pada tahun berikutnya.

#### PENGEMBANGAN DESAIN PELATIHAN

Sebagai pelatihan yang baru, Pusdiklat Keuangan Umum harus melakukan riset demi mendesain pelatihan *data analytics*. Riset tersebut salah satunya diperoleh dengan mengambil referensi dari pelatihan *big data* yang telah ada di luar. Selain itu juga dilakukan pendalaman terhadap kompetensi yang dibutuhkan

oleh seorang *data engineer* dan *data scientist* sebagai dasar penentuan materi pada setiap pelatihan. Selanjutnya, desain pelatihan dibuat secara mandiri oleh tim dari Pusdiklat Keuangan Umum dengan berbagai pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Keuangan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam mendesain pelatihan adalah konstrain waktu pada pelatihan tersebut. Mengingat kompleksnya materi pelatihan, idealnya pelatihan *data analytics* diselenggarakan dalam waktu yang lebih lama sehingga para peserta pelatihan bisa lebih mendalami tahapan-tahapan yang dilewati dalam pengolahan data. Namun hal itu tentunya sangat sulit dilakukan, mengingat para peserta diklat adalah pegawai aktif di Kementerian Keuangan. Meninggalkan kantor dalam waktu yang relatif lama tentunya berpotensi menimbulkan masalah pada pekerjaan yang ditinggalkan.

Materi pelatihan yang relatif berat membuat Pusdiklat Keuangan Umum harus menetapkan syarat kompetensi selain syarat administrasi bagi calon peserta pelatihan yang berminat mengikuti pelatihan. Untuk pelatihan *data engineer*, calon peserta diharapkan mengerti dasar bahasa pemrograman. Sedangkan untuk pelatihan *data scientist*, calon peserta juga diharapkan menguasai ilmu dasar statistika.

Untuk pengajar pelatihan, Pusdiklat Keuangan Umum juga bekerja sama dengan pengajar yang salah satunya berasal dari Telkom University. Dalam pelatihan pertama, semua pengajar berasal dari luar Kementerian Keuangan. Namun untuk pelatihan kedua, Pusdiklat Keuangan Umum mendatangkan juga pengajar dari internal Kementerian Keuangan. Para pengajar internal tersebut merupakan pegawai DJP dan DJBC yang memiliki kompetensi terhadap pengelolaan *big data* di unitnya masing-masing. Ke depannya, Pusdiklat Keuangan Umum mengharapkan peran widyaiswara BPPK untuk dapat menjadi pengajar dalam pelatihan sejenis.

#### ACTION LEARNING PELATIHAN

Pada akhir pelatihan, peserta diberikan tugas untuk melakukan *action learning*, yakni dengan membuat *capstone project*. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok di mana setiap anggota kelompok terdiri dari peserta pelatihan dari unit yang sama. Kelompok yang bersifat homogen ini bertujuan agar komunikasi yang terjadi dalam setiap kelompok menjadi lebih mudah, karena data yang mereka olah pada *action learning* tersebut berasal dari unit kerja mereka sendiri. Selain itu, diharapkan *capstone project* yang dihasilkan dalam *action learning* ini nantinya dapat digunakan oleh unit kerja mereka.

Hasil *action learning* tersebut juga dipamerkan dalam Seminar *Data Analytics* yang diselenggarakan pada akhir tahun 2019 di Sekretariat Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan. Seminar itu sendiri masih merupakan rangkaian pelatihan dan termasuk dalam inisiatif strategis Pusdiklat Keuangan Umum. Seminar ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain berasal dari Gojek, Google, Telkom, serta narasumber internal Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Pusintek. Karena masih termasuk dalam rangkaian pelatihan, para peserta pelatihan *data analytics* wajib mengikuti seminar ini. Selain berasal dari peserta pelatihan, peserta seminar juga dibuka untuk pegawai Kementerian Keuangan namun dengan jumlah *seat* yang terbatas. Animo para pendaftar seminar yang tinggi menunjukkan bahwa pelatihan *big data* menjadi hal yang diminati di kalangan Kementerian Keuangan.

Pada dasarnya, pelatihan *data analytics* tidak hanya ditujukan bagi para pegawai yang lingkup kerjanya bersinggungan langsung dengan pengolahan *big data*. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep *big data* bagi unit-unit yang belum menggunakan *big data* secara langsung. Selain itu, pelatihan ini diharapkan dapat membawa perubahan *mindset* peserta pelatihan saat kembali bekerja di kantornya masing-masing.

\*\*\*

#### ARIMBI PUTRI

# MENUJU INSTANSI BERBASIS DATA

“(Dari pelatihan ini) harapan kami (adalah) memunculkan *mindset data driven decision making*, pembuatan keputusan, pengambilan solusi, semuanya itu berbasis data.”

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PUSDIKLAT KU | WAWAN ISMAWANDI  
FOTO : ABDUL 'AZIZ MAGHFUR

**M**elimpahnya data yang dimiliki Kementerian Keuangan membuat kebutuhan akan kompetensi analisis data seolah tak ada habisnya. Pegawai yang mumpuni dalam mengolah, menganalisis, hingga *me-manage* data mutlak diperlukan di zaman yang serba bertumpu pada data digital ini. Manfaat analisis data tersebut tentunya sangat banyak dan bervariasi, mulai dari pemanfaatannya untuk membuat keputusan, melihat tren, melihat pola, membuat prediksi, hingga menentukan kebijakan.

Menyadari pentingnya pengolahan dan analisis data secara tepat tersebut, tentunya BPPK sebagai instansi yang mengembangkan kompetensi para pegawai Kementerian Keuangan berupaya untuk terus melakukan pembaruan terhadap pelatihan-pelatihan yang diberikan sesuai dengan perkembangan zaman. Usai *piloting* pelatihan *Data Driven Decision Making & Data Analytics* dilakukan pada 2019, tahun ini dilakukan sejumlah penyesuaian berdasarkan hasil dan evaluasi pada *piloting* tersebut. Meski tak lagi menjadi inisiatif strategis Pusdiklat Keuangan Umum, pelatihan ini tetap menjadi salah satu prioritas yang sedang hangat untuk dikembangkan, melihat tingginya permintaan untuk pengembangan kompetensi ke arah data analisis.

Kebutuhan akan pengembangan pegawai tersebut juga diungkapkan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat Keuangan Umum, Wawan Ismawandi usai mengisi materi pada angkatan pertama Pelatihan *Data Driven Decision Making dan Data Analytics 2020*. “AKP (Analisis Kebutuhan Pembelajaran) dari renbang ternyata semua unit membutuhkan

kompetensi analisis data, sehingga sekarang ini kita buat yang agak lebih heterogen pesertanya, tetapi tetap persyaratannya tetap ada, siapa yang mau jadi *data engineer*, siapa yang harus berperan menjadi *data scientist*. Karena pelatihannya memang didesain spesialisasi di dalamnya,” urai Wawan.

*Data engineer* dan *data scientist* tersebut di-*manage* oleh seorang *business leader* yang merupakan pejabat eselon 3 atau pegawai senior. *Business leader* inilah yang nantinya berperan pada tataran manajerial dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan *piloting* yang dilaksanakan pada 2019 lalu, tahun ini pelatihan untuk *business leader* hanya berlangsung selama 3 hari di mana sebelumnya dilaksanakan 4 hari. Para *business leader* mengikuti kelas umum bersama *data engineer* dan *scientist* pada hari pertama dan kedua, kemudian 1 hari di akhir untuk membentuk kelompok dan merencanakan proyek *action learning*.

“Pelatihan tahun ini dilakukan tatap muka selama 7 hari, dan *action learning* 20 hari. Di *action learning* ini mereka membuat proyek *data analytics*, menghasilkan informasi berbasis data analitik. Setelah 3 hari pelatihan bersama, *business leader off* karena fungsinya hanya manajemen,” imbuh Wawan.

Materi yang diajarkan pada pelatihan tahun ini pun mengalami penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi pada *piloting* tahun lalu. Tak tanggung, evaluasi yang dilaksanakan pun dilakukan secara komprehensif dengan memanggil para peserta, pemateri, melihat hasil form evaluasi, menganalisis nilai peserta, hasil *action learning*, hingga hasil pemantauan saat *in class*. Berdasarkan hal tersebut, pelatihan tahun ini materinya diupayakan lebih terstruktur, tidak terlalu luas dan lebih mengerucut, sehingga peserta

*Tujuan dari pelatihan Data Driven Decision Making dan Data Analytics ini salah satunya adalah peserta dapat melakukan pengolahan data secara komprehensif sesuai dengan perannya, sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan.*



SUASANA PELATIHAN DATA DRIVEN DECISION MAKING & DATA ANALYTICS  
FOTO : RIDWAN SIDIK KURNIAWAN

mampu lebih fokus menangkap intisari dari setiap materi yang disampaikan.

“Jumlah harinya untuk *business leader* kita kurangi, untuk yang lain tetap. Kemudian kita tambah materi *data analytics* di sektor publik itu seperti apa penerapannya. Kita sampaikan contoh dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai seperti apa penerapannya. Perubahannya jadi lebih terstruktur, hari pertama penjelasan *big picture* mengenai *data analytics*. Setelah *business leader* mengetahui *data analytics*, kemudian selanjutnya bagaimana manajemen proyek, pengelolaan *project data analytics*. Dikasih tau peran setiap *role*, manajer itu harus seperti apa, atau *business leader* atau eselon 3 harus apa terhadap data, mereka maunya apa dan bagaimana mereka mengomunikasikan kepada para *data scientist* atau *analytics* itu,” ujar Wawan menambahkan.

Wawan mengungkapkan, terdapat tiga jenis data yakni data terstruktur (*structured*), semi terstruktur (*semi-structured*), dan belum terstruktur (*unstructured*). Contoh data terstruktur adalah riwayat pelatihan, data wajib pajak, data kepegawaian, dan lain-lain. Sementara data belum terstruktur seperti opini masyarakat, media sosial, email, gambar, dan lain-lain. Analisis data yang belum terstruktur akan lebih rumit dibandingkan dengan data terstruktur. Sehingga, untuk pelatihan ini belum terlalu ditekankan terkait penggunaan data tersebut.

Meski saat ini sedang digalakkan pengembangan *e-learning* di berbagai pelatihan, Wawan sendiri belum menyarankan pelatihan ini untuk menjadi *e-learning* karena kompleksitas materinya. Selain itu, peserta juga melakukan praktik langsung dalam pengolahan data yang akan sulit jika tidak dilakukan dengan tatap muka. Meski demikian, Wawan

mengungkapkan Pusdiklat KU akan meninjau pelatihan ini secara berkala hingga menemukan pola yang paling tepat untuk pelatihan *Data Driven Decision Making* dan *Data Analytics* tersebut.

Usaha maksimal dilakukan untuk terus menyempurnakan pelatihan tersebut, salah satunya juga dengan membekali para penyelenggara dengan pengetahuan terkait *big data* secara mumpuni. “Sebelum mendesain pelatihan, Kepala Pusdiklat KU juga sudah meminta masing-masing untuk memahami konsep data melalui *e-learning* di Udemy, Corsera, dan lain sebagainya,” urai dia.

Tak hanya dari segi penyelenggara, dari sisi pengajar pun terus dilakukan *review* dan peningkatan. Jika sebelumnya pengajar sebagian besar berasal dari Telkom University, tahun ini diselingi dengan pengajar-pengajar dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai yang telah melakukan implementasi data analitik di kantornya. Perubahan pengajar ini juga salah satunya dilakukan agar terdapat variasi materi, di mana pengajar Telkom University lebih ke arah pendekatan akademis, sementara pengajar dari Ditjen Pajak dan Bea Cukai mampu menyeimbangkan dari segi praktis dan sektor publiknya. “Diharapkan akan lebih mudah juga bagi para peserta karena dari *public sector*, contoh-contoh kasusnya jadi lebih *relate* dan *practical* kalau ada internal Kemenkeu,” tambah Wawan.

#### BICARA DENGAN DATA

Tujuan dari pelatihan *Data Driven Decision Making* dan *Data Analytics* ini salah satunya adalah peserta dapat melakukan pengolahan data secara komprehensif sesuai dengan perannya, sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Wawan

menuturkan, setidaknya penyelenggara pelatihan berharap mengenalkan konsep *big data*, terutama untuk unit yang belum menggunakan, termasuk BPPK. Berdasarkan *piloting* pelatihan di tahun lalu, setidaknya terjadi perubahan pola pikir dari para peserta untuk selalu berbicara berdasarkan data yang ada.

“Yang jelas harapan kami memunculkan *mindset data driven decision making*, pembuatan keputusan, pengambilan solusi, semuanya itu berbasis data. Ada unsur *awareness*-nya juga. Tahun lalu dari hasil *piloting* itu paling tidak dari *mindset* teman-teman, sedikit-sedikit mereka ngomong pakai data. Terus dari bagian evaluasi dicoba melihat tren berapa tahun ke belakang. Meskipun dari *tools data analytics*-nya belum terlalu digunakan tetapi *mindset* itu sudah terlihat,” ungkapnya.

Wawan pun mengaku cukup puas dengan hasil *piloting* di tahun 2019. Pasalnya, hasil dari *action learning* para peserta pun dinilai mengejutkan dan cukup baik. Rangkaian pelatihan yang tahun lalu ditutup dengan seminar itu pun menjadi ajang untuk memamerkan hasil *action learning* mereka. “Dari pelatihan 2019 itu dihasilkan 13 *project*, yang dipamerkan saat seminar. Saya *amazed*, di luar dugaan hasilnya bisa seperti itu. Idenya mereka, oh ternyata bisa dibikin *gini toh*, oh bikinnya *gini*. Hal-hal yang kita tidak terpikirkan ternyata mereka bisa terpikirkan itu. Misalnya dari Pushaka itu ada yang menghasilkan prediksi pidato Bu Menteri sesuai dengan audiensnya. Mereka menganalisis dari pidato-pidato Bu Menteri sebelumnya.”

\*\*\*



ANDITA TRIAS NUR AZIZAH

# WORKSHOP PEMBEKALAN PENGAJAR LATSAR TAHUN 2020



ILUSTRASI : FREEPIK

**P**egawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan Indonesia. Seorang PNS harus memiliki sikap dan perilaku yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk membentuk PNS yang mempunyai sikap dan perilaku tersebut, perlu dilakukan pembinaan melalui Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil inilah yang menjadi penentu apakah seorang CPNS layak diangkat sebagai seorang PNS atau tidak.

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu lembaga yang telah dipercaya oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai Lembaga Penyelenggara Latsar CPNS bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan. Pada 4 Desember 2018, Pusdiklat Pengembangan SDM mendapat apresiasi sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori A untuk periode 2019 s.d. 2023. Sertifikat tersebut didapatkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 686/K.I/PDP.09/2018.

Dalam Pelatihan Dasar CPNS terdapat nilai-nilai dasar yang wajib dipahami dan diinternalisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen publik dan anti korupsi. Kelima nilai tersebut sering disingkat menjadi ANEKA. Nilai-nilai dasar ANEKA, akan menjadi acuan dan pondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan berkompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia pada 2045

mendatang. Mengingat pentingnya pemahaman nilai-nilai ANEKA tersebut bagi pembentukan karakter ASN, Pusdiklat PSDM memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari berbagai sisi. Salah satunya dalam hal tenaga pengajar. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar Latsar CPNS, Pusdiklat PSDM merekrut tenaga pengajar yang terdiri dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari pelaksana, pejabat struktural, hingga widyaiswara. Para pengajar dipersiapkan dengan bekal yang matang melalui kegiatan Workshop Pembekalan Calon Pengajar Latsar Tahun 2020.

Workshop ini ditujukan bagi pegawai di lingkungan Badan Pendidikan dan pelatihan Keuangan (BPPK) yang dipersiapkan sebagai calon pengajar/fasilitator Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 seiring dengan adanya struktur baru Desain Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS.

Workshop Pembekalan Pengajar Latsar ini berlangsung selama dua hari. Pada pembukaan Workshop ini, Kepala Pusdiklat Sumber Daya Manusia, Anies Said Basalamah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada peserta yang telah bersedia menjadi pengajar latsar. Anies juga mengingatkan peserta untuk menjaga kualitas pengajaran di latsar. Para pengajar diharapkan ikut menjaga kualitas penyelenggaraan latsar yang telah mendapatkan akreditasi A dari Lembaga Administrasi Negara. Menurutnya, kualitas pengajar mempunyai pengaruh yang besar dalam penilaian penyelenggaraan latsar. "Karena nilai A banyak dipengaruhi oleh kualitas pengajar." ujar Anies.

#### SUMBER DAYA MANUSIA JADI FOKUS UTAMA

Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Erna Irawati dalam pemaparannya pada materi *overview* Penyelenggaraan

Latsar mengungkapkan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan arahan Presiden bahwa prioritas pembangunan Indonesia saat ini adalah pembangunan Sumber Daya Manusia. Untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, terdapat berbagai tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia terutama pembangunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di antaranya:

- ASN harus siap menghadapi globalisasi, seorang ASN harus mampu menerapkan pengetahuannya dalam konteks global;
- Perubahan demografik, Indonesia membutuhkan ASN yang bisa menggambarkan keragaman masyarakat;
- Tantangan sumber daya, permintaan meningkat sedangkan *resources* terbatas;
- Perubahan teknologi, dibutuhkan ASN yg proaktif dan bertalenta;
- Perubahan tenaga kerja, tuntutan perubahan lingkungan kerja dan pengaturan kerja yg lebih fleksibel.

Untuk menjawab tantangan-tantangan itulah, Erna menjelaskan perlu adanya *Human Capital Management Strategy*. Salah satu strategi yang menjadi fokus utama adalah pengembangan kompetensi. Untuk mengembangkan kompetensi ASN diadakan pelatihan-pelatihan bagi ASN yang terdiri dari *pre service* dan *in service training*. *Pre service* merupakan pelatihan dasar bagi CPNS dan *in service* merupakan pelatihan yang diberikan kepada PNS.

Lebih lanjut, Erna menegaskan pada para peserta *workshop* bahwa hal yang harus diingat ketika menjadi pengajar yaitu melihat siapa audiensnya, dalam hal ini peserta latsar. "Yang harus kita ingat ketika menjadi pengajar yaitu kita harus lihat siapa pesertanya. Lalu kita sesuaikan metode pengajaran kita dengan usia peserta," tegas Erna. Variasi metode pengajaran sesuai umur yang dimaksud yaitu metode pengajaran dibedakan antara generasi *baby boomers*, Gen X dan Millenials. Erna mencontohkan bahwa metode pengajaran yang lebih cocok

untuk *millenials* seperti video, *gamification* dan sebagainya.

#### DESAIN BARU LATSAR CPNS

*Workshop* Pembekalan Pengajar Latsar CPNS tahun 2020 berfokus pada pembelajaran agenda II yaitu nilai-nilai dasar PNS (ANEKA). Namun, terdapat tantangan baru dalam penyelenggaraan latsar CPNS 2020 kali ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, agenda II yang berisikan nilai-nilai dasar PNS yaitu nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dilaksanakan melalui pembelajaran klasikal selama 13 hari (120 JP). Namun, pada tahun 2020 ini metode pembelajaran telah diubah menjadi *blended learning* dengan 90 JP *e-learning* dan 60 JP klasikal. Para pengajar diberikan waktu yang lebih singkat melalui pembelajaran klasikal di kelas selama 5 hari.

Untuk itulah, pada hari kedua *Workshop* Pembekalan Pengajar Latsar CPNS tahun 2020 ini para calon pengajar diberikan materi oleh para Widyaiswara terkait penjelasan substansi dan metode pembelajaran yang tepat. "Fokus utama kita dalam mengajar kali ini bukan menyampaikan materi, karena peserta sudah menerima materi dan ujian kuis lewat *e-learning*. Tugas kita hanya menanyakan apa yang sudah mereka pelajari dari *e-learning* agar mereka lebih paham dan bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari," papar Arief Risman, pengajar kelas Etika Publik.

Pada hari kedua, peserta dibagi menjadi lima kelas sesuai dengan nilai ANEKA yang telah mereka pilih. Secara berurutan kelas yang ada di *workshop* ini yaitu kelas Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Tiap kelas terdiri dari 8-9 peserta. Setelah menerima materi dari para widyaiswara pengampu masing-masing, para peserta yang merupakan calon pengajar latsar diberikan waktu untuk melakukan simulasi pembelajaran. Tiap peserta mendapatkan waktu sekitar setengah jam

untuk mempraktikkan cara mengajar di depan peserta yang lain. Tentunya metode pembelajaran telah disesuaikan dengan usia para peserta latsar yang termasuk dalam golongan usia *millennials*.



FOTO :  
DOK. PUSDIKLAT PSDM

# SIAP KUASAI ILMU KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN KEUANGAN DALAM DIGITAL



- E-learning Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- E-learning Hubungan keuangan Pusat dan Daerah
- E-learning Penilaian
- E-learning Optimalisasi Barang Milik Negara
- E-learning Lelang

follow us:  
 @pusdiklat.knpk

Setelah enam tahun berkelana, akhirnya Frans pulang ke DJP, di tempat awal ia bekerja, kali ini sebagai **Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak**.



TEKS: DODI SEPTARIZA  
FOTO: M.FATH KATHIN

**N**ama Nufansa Wira Sakti mulai dikenal publik ketika ia berusaha meluruskan pemberitaan negatif yang menyerang Kementerian Keuangan. Frans yang kala itu menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi Layanan dan Informasi (KLI) mengambil langkah *gercep* (gerak cepat-red) dengan menarasikan data-data tandingan yang dimilikinya melalui akun twitter dan facebook pribadinya. Isi klarifikasinya lugas, singkat, dan kaya akan data. Pemilihan media serta gaya bahasa Frans yang khas dianggap telah “menyentil” beberapa tokoh di belakang pemberitaan negatif tersebut. Hal ini kemudian menarik perhatian warganet, dimana *followers* media sosialnya tiba-tiba melonjak. Banyak yang mengapresiasi, namun ada juga yang mengkritik dan menganggap isi klarifikasinya terlalu tendensius memihak pihak tertentu secara politis. Tak terkecuali lingkungan terdekatnya.

Namun Frans tidak patah arang, Baginya Kemenkeu adalah tempat bernaung untuk ia dan keluarganya. Ia telah menganggap Kementerian Keuangan sebagai rumah yang patut dibela. “Ini rumah kita! Jadi, siapapun yang mencoba menyerang institusi, harus kita bela”, tegas Frans.

#### BELA DIRI PEMBENTUK JATI DIRI

Sebagai seseorang yang mengawali karir di bidang Teknologi Informasi atau IT, Frans tidak pernah menyangka akan menduduki jabatan strategis di bidang komunikasi. Namun, jika menilik kembali ke perjalanan hidupnya, tanpa disadari Frans telah dekat dengan dunia komunikasi. Saat Frans kecil, ia rajin menuangkan ide-idenya ke dalam sebuah tulisan yang saat itu sebenarnya hanya diperuntukkan sebagai ekspresi kerinduan kepada orang tuanya.

Semasa kecil, Frans sempat berpindah-pindah kota mulai dari Cibinong, Bali dan Lahat, mengikuti penugasan ayahnya sebagai prajurit TNI AD. Di Lahat, Frans hidup bersama kakeknya, sedangkan ayah

Frans melanjutkan sekolah ke Amerika didampingi ibunya, Pada saat itulah Frans mulai sering menulis surat untuk orang tuanya, menceritakan hal-hal yang terjadi di Indonesia, kehidupan bersama Kakeknya, dan kerinduan kepada ayah dan ibunya. Sampai saat ini, Frans masih bisa membaca kembali tulisan-tulisan pertamanya itu, karena sang ibunda mengumpulkan dan menyimpan dengan baik surat-surat dari Frans semasa kecil dulu

Selanjutnya, Frans menghabiskan masa remaja di Jakarta, bersekolah di SMP Tarakanita 1 kemudian melanjutkan ke SMAN 70 Bulungan. Pada saat SMA, keikutsertaannya pada kegiatan *tae kwon do*, ternyata juga cukup banyak mempengaruhi kehidupannya. “Kenapa saya bilang berpengaruh? Karena sebelumnya saya sering pindah, yang mengakibatkan saya jadi agak pemalu, tapi semenjak saya ikut *tae kwon do* dan ditunjuk jadi ketua, saya mulai aktif dan mulai berorganisasi. Hal seperti itu yang membentuk diri saya, mulai dari bagaimana berinteraksi dengan teman, bagaimana menghubungi orang-orang, kemudian juga berinteraksi dengan senior-senior. Mungkin salah satu pembentukan jati diri saya adalah pada saat mengikuti *tae kwon do* itu,” cerita Frans.

Lebih dari sekedar pembentuk jati diri, keterlibatannya di *tae kwon do* hingga menjadi pelatih semasa kuliah juga mempertemukannya dengan seorang gadis yang kemudian dipersuntingnya sebagai istri. “Prosesnya kita *ketemu* disitu, dia ikut latihan, tapi begitu dapat pelatihnya, dia malah berhenti latihannya,” kenang Frans sambil tertawa.

#### AWAL KARIR DI KEMENKEU, MENULIS DAN SEKOLAH DI JEPANG

Sebelum mengabdikan diri di Kementerian Keuangan pada tahun 1995, Frans telah bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Belum genap setahun ia di sana, Kemenkeu membuka lowongan PNS khusus untuk pajak. Pada

waktu itu, Ibunda Frans memotivasinya untuk ikut mendaftar menjadi PNS karena saat SMP Frans pernah berkeinginan sekolah di luar negeri dan Ibunda Frans percaya dengan menjadi PNS peluang untuk sekolah di luar negeri menjadi lebih besar. Singkat cerita, Frans berhasil diterima sebagai salah satu dari lima ratus orang yang diterima menjadi pegawai DJP, di mana dirinya diposisikan sebagai seorang *programmer*.

Pada tahun 1998, Frans menjadi anggota tim *project* database perpajakan. Di sela-sela penugasannya itu, Frans memanfaatkan waktu luangnya untuk menulis hal-hal yang berkaitan dengan IT. Tulisannya akhirnya terkumpul dan dijadikan sebuah buku tentang SQL (*Structured Query Language*), yaitu bahasa untuk memodifikasi *database* melalui struktur data. Tidak disangka-sangka, buku tersebut mendapat sambutan baik dari pembaca. Hingga saat ini, Frans terus menekuni hobi menulisnya. Tidak hanya buku, ia juga menulis artikel di berbagai koran dan majalah. Tidak kurang lima judul buku karya Frans sudah diterbitkan, dimana buku pertamanya yang berjudul “Belajar SQL Plus” yang menjadi *best seller* hingga dicetak ulang sebanyak lima kali.

Selain menulis buku, Frans juga mengisi waktunya saat itu dengan berburu beasiswa luar negeri. Ia masih berusaha mewujudkan mimpinya semasa SMP dulu. Sempat tiga kali gagal dalam tes seleksi beasiswa, akhirnya pada tahun 2000 ia berhasil mendapatkan beasiswa S2 dari World Bank dan melanjutkan studinya ke Yokohama National University, Jepang dengan mengambil jurusan *Public Policy and Taxation*. Frans memilih melakukan penelitian tentang pajak *e-commerce* dan menulis tesis tentang itu. Di tahun tersebut, belum banyak orang yang berpikir mengenakan pajak pada sektor *e-commerce*.

Sempat pulang ke Indonesia setelah menamatkan S2, Frans kembali meraih beasiswa dan berangkat ke Jepang untuk menempuh pendidikan S3 di Niigata



University. Kehidupan sebagai mahasiswa S3 dirasakan Frans sangat jauh berbeda dengan S2. Tidak ada perkuliahan, tidak ada kelas, tidak banyak teman, hanya fokus di penelitian disertasinya. Di dua tahun pertama, ia sempat kesulitan untuk menyesuaikan diri. Akhirnya, sebagai hiburan melepas penat di tengah disertasinya, Frans kemudian mencoba aktif dalam kegiatan kampus untuk International Student, bahkan menjadi ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Niigata. Selain itu, ia juga mulai aktif bergaul dengan komunitas fotografi sebagai selingan.

#### DARI CTO 1.0, KEPALA BIRO, HINGGA KEMBALI KE HABITAT

Tidak lama setelah kembali ke Indonesia, tahun 2010 Frans diangkat menjadi Kepala Seksi Perencanaan Sistem dan Prosedur Perpajakan. Dua tahun kemudian kembali dipromosikan sebagai Kepala Subdirektorat Manajemen Transformasi. Pada jabatan tersebut, Frans bertugas sebagai PMO (*Project Management Office*) yang bertugas untuk mengawal implementasi inisiatif strategis transformasi kelembagaan di Direktorat

Jenderal Pajak. Karena kinerjanya dianggap cukup berhasil di lingkup DJP, Frans diminta untuk menjadi *Chief of Change Management Officer 1* saat *Central Transformation Office* (CTO) pertama kali dibentuk.

Jika di PMO sebelumnya Frans bertugas untuk mengawal transformasi kelembagaan hanya untuk lingkup DJP, di CTO tugas Frans diperluas menjadi seluruh Kementerian Keuangan. Namun yang menarik, walau memiliki tanggung jawab yang lebih besar, justru saat itu Frans memiliki jumlah staf yang jauh lebih sedikit. Hal itu terjadi karena CTO menggunakan model kerja yang efisien dengan personil yang minim dan fokus pada suatu *project*. Frans bercerita, “awalnya agak susah juga saya menyesuaikan diri. Dari yang sebelumnya Kasubdit dengan dua puluhan staf, di CTO cuma 2 orang, jadi pekerjaan benar-benar kita lakukan sendiri, termasuk kajian dan mengelola semuanya. Tapi ya *Alhamdulillah* CTO cukup *powerful* ya, dan kami menyebut diri kami pada saat itu dengan nama CTO 1.0.”

Menjelang akhir tahun 2016, Frans diminta oleh pimpinan untuk ikut dalam *fit and proper test* untuk posisi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

“Kemenkeu adalah rumah kita! Jadi, siapapun yang mencoba menyerang institusi, harus kita bela.”

Walaupun sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang komunikasi, dirinya menyatakan siap untuk mengikuti tes tersebut. Frans mengisahkan bagaimana berdebar-debarnya ia saat diwawancara oleh Menteri Keuangan. Namun dengan persiapan yang sudah dilakukan sebelumnya, akhirnya Frans terpilih sebagai Kepala Biro dan secara definitif dilantik pada tanggal 16 Desember 2016.

Banyak hal yang dilakukan oleh Frans selama menjabat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Dimulai dengan penataan organisasi dan pola komunikasi internal, Frans melakukan beberapa perubahan, seperti melakukan penyegaran dan rotasi pegawai, mengadakan *one-on-one meeting* dengan seluruh subbagian secara bergantian, menyelenggarakan *town-hall meeting* satu bulan sekali, hingga membuat kompetisi pegawai terbaik setiap tahunnya melalui pendekatan yang lebih cair dan interaktif. Frans berhasil membangun lingkungan kerja yang sehat dan akrab, sehingga para pegawai dapat bekerja dengan *happy*, yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kinerja mereka.

Peningkatan kinerja tersebut dibuktikan dengan begitu banyaknya penghargaan yang diraih Biro Komunikasi dan Layanan Informasi semasa kepemimpinan Frans. Mulai dari Juara Platinum (umum) penyelenggaraan PR Indonesia Award (PRIA), Juara Umum Anugerah Media Humas yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, penghargaan *Gold Winner* dalam ajang Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) untuk majalah media keuangan terbitan KLI, hingga peringkat pertama penghargaan Keterbukaan Informasi untuk Kategori Badan Publik Kementerian dari Komisi Informasi Publik.

Tidak hanya di dalam negeri, Frans dan Biro KLI yang saat itu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak berhasil meraih penghargaan *International Golden World Award 2018* kategori “Public Sector” dari *International Public Relations Association*

(IPRA). Mengutip yang disampaikan pada akun instagramnya, “Awalnya adalah tantangan Menteri Keuangan RI yang meminta saya dan Biro KLI agar tidak hanya berprestasi di level nasional saja tapi juga di level Internasional. Seperti biasa, beliau selalu meminta kami di Kemenkeu untuk menjadi yang terbaik dan terbaik lagi. Mungkin sudah harus cari kompetitor di luar negeri dengan level internasional,” tulis Frans mengisahkan awal mula keikutsertaan Kemenkeu pada ajang tersebut.

Sejalan dengan kebiasaannya menggunakan media sosial, semasa menjabat Kepala Biro KLI, Frans juga memaksimalkan penggunaan berbagai platform media sosial dalam mengomunikasikan berbagai kebijakan Kementerian Keuangan. Lebih dari itu, ia jugalah yang memberikan masukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membuat akun media sosial pribadi.

Butuh satu bulan lebih bagi Frans untuk meyakinkan Menkeu untuk membuat akun media sosial. Hingga akhirnya, bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2016, akun Instagram @ *smiindrawati* diluncurkan. Selang beberapa bulan setelah akun tersebut diluncurkan, Sri Mulyani pun mengakui bahwa media sosial merupakan platform yang *powerful* untuk menyampaikan pesan, dan beliau menyampaikan untuk tidak ragu “menggunakan” sosok dirinya pada media-media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan.

Tiga tahun setelah menjabat Kepala Biro, Frans dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak. Dalam sambutan pelantikannya, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa penugasan Frans saat ini layak kembali ke habitat lamanya. Setelah enam tahun berkelana, akhirnya Frans pulang ke DJP, di tempat awal ia bekerja sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Sri Mulyani berharap pengalaman Frans selama di KLI dan CTO dapat menambah dan memperkaya kemampuannya untuk mendorong dan membantu memberikan

nilai tambah kepada DJP. Frans pun mengaku sangat senang bisa kembali ke DJP. Sambil bercanda dirinya berujar, “kadang masih terasa aneh ketika saya dipanggil Pak Sahli, masih kaku dan *enggak* percaya kalau sekarang sudah Eselon I.”

#### KEMAMPUAN, KESEMPATAN, DAN DOA

Bagi Frans, perjalanan hidupnya adalah rangkaian proses belajar yang tiada henti. Pendidikan formal yang dienyam baginya merupakan teori yang harus diimplementasikan dalam keseharian dan di dunia kerja, “Karena bagi saya ketika kita terjun kerja di suatu bidang tertentu, suatu posisi tertentu, disitulah proses belajar sebenarnya. Jadi yang dipelajari di kampus tadi hanya untuk membantu bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita bergerak dan sebagainya,” tegasnya.

Pada akhirnya semua hal yang terjadi pada diri Frans ditentukan oleh pertemuan 3 elemen penting, yaitu kemampuan, kesempatan dan doa. “Pertama tentunya kita harus terus mengasah kemampuan dengan belajar setiap hari untuk *update knowledge*, selanjutnya ketika ada kesempatan yang terbuka, segera ambil, karena kesempatan emas tidak datang dua kali. Apabila dua hal tersebut sudah dilaksanakan, berdoa adalah sandaran yang terakhir. Saya percaya kekuatan doa, dengan berdoa kita tahu bahwa Tuhan *nge-backup* kita disana, selanjutnya kita tinggal menunggu semesta mendukung,” tutup Frans.

\*\*\*

*Kita harus terus mengasah kemampuan dengan belajar setiap hari untuk meng-update knowledge, selanjutnya ketika ada kesempatan yang terbuka, segera ambil.*

*Apabila dua hal tersebut sudah dilaksanakan, berdoa adalah sandaran yang terakhir.*

# Serambi Ilmu

Kristian Agung Prasetyo

**COOPERATIVE COMPLIANCE: OLEH-OLEH DARI AMSTERDAM**

Daniel Pangaribuan

**DAPATKAH LEAN LEARNING MENJADI SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELATIHAN?**

Mohammad Djufri

**ADA PAJAK PIGOVIAN PADA SEBATANG ROKOK**

KRISTIAN AGUNG PRASETYO  
DOSEN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

## COOPERATIVE COMPLIANCE: OLEH-OLEH DARI AMSTERDAM

Bagi Anda yang berkecimpung di dunia perpajakan tentu mafhum bahwa sistem pajak yang kita anut adalah apa yang lumrah disebut dengan sistem *self assessment*. Artinya yang menghitung, membayar, dan kemudian melaporkan pajak terutang adalah wajib pajak sendiri. Asumsinya adalah yang paling tahu kondisi wajib pajak itu ya dia sendiri. Makanya dipersilakan yang paling paham untuk melakukan sendiri apa yang memang sudah menjadi kewajibannya itu. Lagi pula kalau kantor pajak yang menghitung pajak yang harus dibayar juga kurang pas. Ini karena, walaupun mereka memang lebih paham aturan, namun pegawai pajak itu tidak tahu berapa penghasilan wajib pajak, berapa ongkos-ongkos yang mereka keluarkan selama usaha, dan berapa juga labanya. Kalau memang dipaksa menghitung bisa saja sih, namun hasilnya hampir bisa dipastikan tidak akan seakurat kalau wajib pajak sendiri yang menghitung pajaknya. Dengan demikian pada sistem ini yang lebih aktif adalah wajib pajak, bukan kantor pajak.

Lalu apa tugas petugas pajak? Tugas mereka ya menelisik apakah laporan yang disampaikan wajib pajak itu sudah benar atau belum. Kalau sudah benar OK, kalau ada yang kurang, kasih sanksi. Makanya kalau Anda perhatikan dalam Undang-undang pajak itu berkebarat berkebarat ketentuan terkait sanksi. Ada yang berupa denda, ada pula yang wujudnya kurungan. Asumsi utamanya adalah

bahwa kalau tidak patuh, dihukum, kan nanti jadi patuh. Sama seperti anak kita sendiri. Kadang anak kita setelah makan malam lanjut lihat video di Youtube. Padahal besok masih ada kuis matematika. Biasanya reaksi kita selaku orang tua adalah anak itu diomeli, dimarahi, disuruh mulai membuka buku matematika dan berlatih mengerjakan soal. Sekarang juga. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah selalu mengawasi untuk memastikan kalau dia itu benar-benar membaca dan berlatih soal-soal. Bukan sembunyi-sembunyi menonton kembali video di Youtube.

Bertebarannya ketentuan sanksi di pajak menggunakan asumsi yang serupa: kalau ada ancaman, maka wajib pajak pasti patuh. Jika tidak ada ancaman, maka mereka tidak akan patuh. Benarkah demikian? Belum tentu, lho. Sanksi denda misalnya, ada bukti bahwa denda itu tidak efektif untuk meningkatkan kepatuhan, setidaknya demikian yang dilaporkan Uri Gneezy dalam *Journal of Legal Studies*. Ceritanya Uri, si penulis utama, dan istrinya sedang bersantai di pantai di pinggir Tel Aviv.<sup>1</sup> Mereka asyik ngobrol sampai lupa bahwa anak semata wayang mereka harus dijemput jam empat sore. Lokasi *day care* itu sekitar setengah jam naik kendaraan dari pantai tempat dua orang itu sekarang berada. Padahal sudah hampir jam empat. Alhasil hari itu mereka berhadapan dengan wajah masam Rebecca, si pemilik *day care*. Beberapa minggu kemudian, Rebecca

mengumumkan bahwa orang tua yang terlambat menjemput anaknya lebih dari sepuluh menit harus membayar denda. Apa yang terjadi? Apakah orang tua yang terlambat menjemput anak berkurang? Sama sekali tidak. Justru setelah ada denda, orang tua yang terlambat menjemput anaknya malah semakin banyak. Dan ini terjadi bukan hanya di *day care* milik Rebecca, namun juga di enam *day care* lain di sekitar Tel Aviv.

Apa yang menjadi penyebab? Ketika belum ada denda, para orang tua tahu bahwa *day care* itu tutup jam empat sore. Maka mereka sebisa mungkin berupaya menjemput anak mereka sebelum jam empat. Bagaimana jika terlambat? Apakah para guru yang menjaga *day care* itu akan marah? Atau mereka pergi begitu saja meninggalkan anak-anak sendirian? Tidak ada yang tahu. Karena memang selama ini tidak ada keterangan. Jadi yang ada adalah para orang tua tidak enak saja dengan para guru penjaga *day care* itu. Nah, ketika ada denda, maka para orang tua jadi tahu bahwa sebenarnya tidak masalah untuk terlambat, asal bayar. Jadi sekarang sifat transaksinya berubah. Dari sebelumnya merasa tidak enak, sekarang jelas: bayar denda. Sama seperti kalau Anda punya anak usia remaja. Anda curiga bahwa mereka mulai merokok. Lalu Anda geledah tas sekolah dia, Anda cium baju seragamnya, Anda tanya teman-teman sekolahnya. Anda, tanpa disadari, sudah berubah dari orang tua menjadi polisi. Yang terjadi bukanlah anak remaja

<sup>1</sup>Kisah di balik artikel monumental ini bisa dibaca di buku berjudul *The Why Axis* tulisan Uri Gneezy dan John A List.

Anda itu berhenti merokok, namun dia akan berusaha *ngakali* bagaimana caranya supaya Anda tidak tahu kalau dia merokok. Makanya, menurut Uri aksi-aksi *polisionil* seperti itu tidak akan efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Lalu bagaimana?

Di sinilah kemudian gagasan Erich Kirchler dan dua orang rekannya tentang apa yang disebutnya dengan *slippery-slope framework* (Gambar 1) jadi ketemu momentumnya. Ketiga orang ini menyatakan bahwa untuk membentuk kepatuhan wajib pajak, tidak cukup hanya mengandalkan upaya-upaya berbasis aksi *polisionil* semata. Menurut mereka, aksi seperti hasilnya akan kurang pas karena wajib pajak itu dianggap maling. Makanya, jika perpegangan pada temuan Uri, tidak akan efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, menurut Kirchler, masih ada langkah jalur lain untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu melalui apa yang mereka

sebut dengan *voluntary compliance*: patuh, namun patuhnya suka rela. Bukan dipaksa.

Wajib pajak tidak dianggap sebagai kriminal yang harus diburu, namun diperlakukan sebagai rekan kerja. Namanya rekan kerja, maka kantor pajak dan wajib pajak selalu saling capak. Masing-masing pihak mempercayai satu sama lainnya. Kedua pihak bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembayaran pajak. Jika ada aturan yang tidak dipahami wajib pajak bisa segera kontak kantor pajak untuk memperoleh penjelasan. Sebaliknya jika ada data atau informasi yang perlu ditanyakan ke wajib pajak. Wajib pajak pun bisa dengan enak menjawab, karena memang tidak ada perasaan saling curiga. Inilah yang disebut dengan *enhanced relationship*, yang belakangan bermetamorfosa menjadi *cooperative compliance*. Idenya adalah bahwa hubungan antara wajib pajak dengan kantor pajak

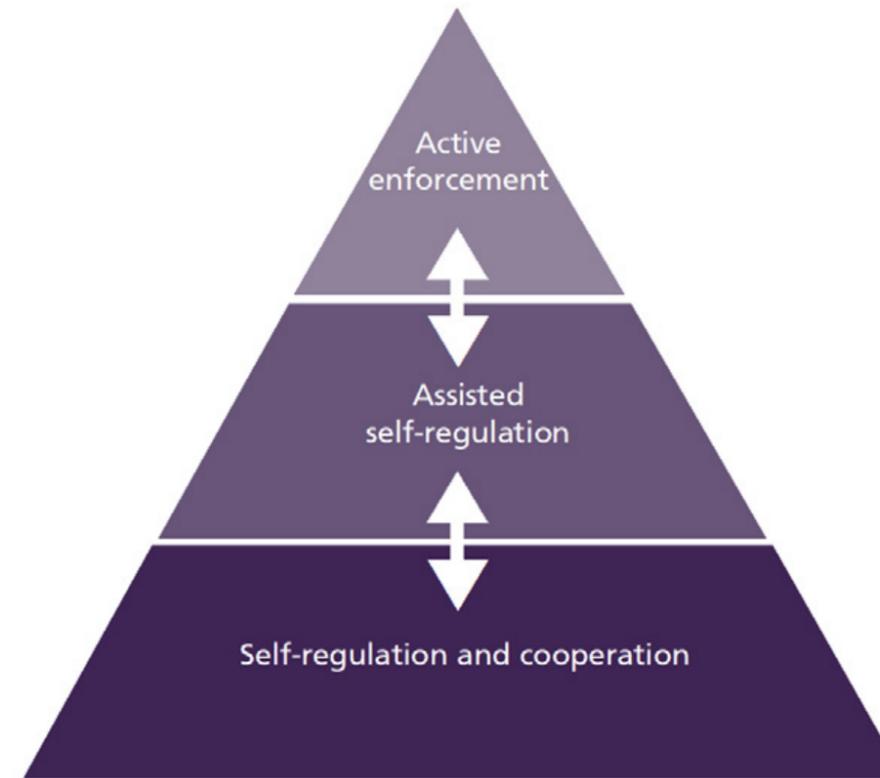
bukan sekedar hubungan baik, namun hubungan baik yang mengarah ke terbentuknya kepatuhan membayar pajak, baik dalam jumlah maupun waktunya. Jadi basisnya adalah saling percaya antara wajib pajak dengan kantor pajak.

Prinsip ini misalnya bisa dilihat di Australia di mana mereka mulai menanggalkan pendekatan berbasis audit pada wajib pajak besar, namun bergeser ke arah pemberian kepastian pajak melalui manajemen risiko yang dilakukan secara *real time*. Audit hanya akan dilakukan kepada kasus-kasus tertentu yang dipandang perlu perhatian khusus (Gambar 1).

Salah satu hal penting adalah dibukanya jalur komunikasi data langsung antara kantor pajak dengan wajib pajak. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah apakah wajib pajak benar-benar bisa dipercaya. Bagaimana kantor pajak bisa yakin bahwa data yang di-*share* wajib pajak itu benar dan tidak ada yang disembunyikan?

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya bulan Oktober lalu berkunjung ke kantor pusat perusahaan bernama Naspers dan *sister company*-nya yang bernama Prosus di Amsterdam. Perusahaan ini saya yakin asing di telinga kita di Indonesia, karena memang mereka bergerak di bidang usaha yang tidak bersentuhan langsung dengan konsumen. Namun demikian perusahaan ini adalah perusahaan besar. Kapitalisasi pasarnya mencapai lebih dari USD 100 milyar, dengan penghasilan tahun lalu mencapai USD 18 milyar. Saat ini, Naspers dan Prosus memiliki perusahaan di 91 negara. Fokusnya adalah investasi di perusahaan-perusahaan *start up* berbasis teknologi, seperti *marketplace*, *food delivery*, *fintech*, *pendidikan*, dan lain sebagainya. Yang barangkali Anda familiar adalah OLX, *belimobilguc.co.id*, dan Tencent. Dia juga ada di balik perusahaan yang membuat PubG. Saya diterima oleh manajer pajak Naspers dan Prosus, yaitu Robbert Hoyng dan Nicolaus Tacke yang menjabat *head of corporate affairs* Naspers dan Prosus untuk wilayah Eropa. Belakangan ketika di Jakarta saya

Gambar 2  
Piramida Kepatuhan



bertemu juga dengan Guilherme Carvalo, orang Brazil yang menjadi manajer pajak di OLX.

Pertanyaan yang saya ajukan ke mereka berdua adalah sederhana saja: mengapa mereka tertarik bergabung ke dalam skema *cooperative compliance*. Padahal dalam skema ini wajib pajak *buka-bukaan* dengan kantor pajak. Mereka harus membuat sistem informasi yang terhubung langsung dengan sistem kantor pajak. Sewaktu-waktu kantor pajak dapat mengakses data yang terkait langsung dengan pajak yang mereka bayar.

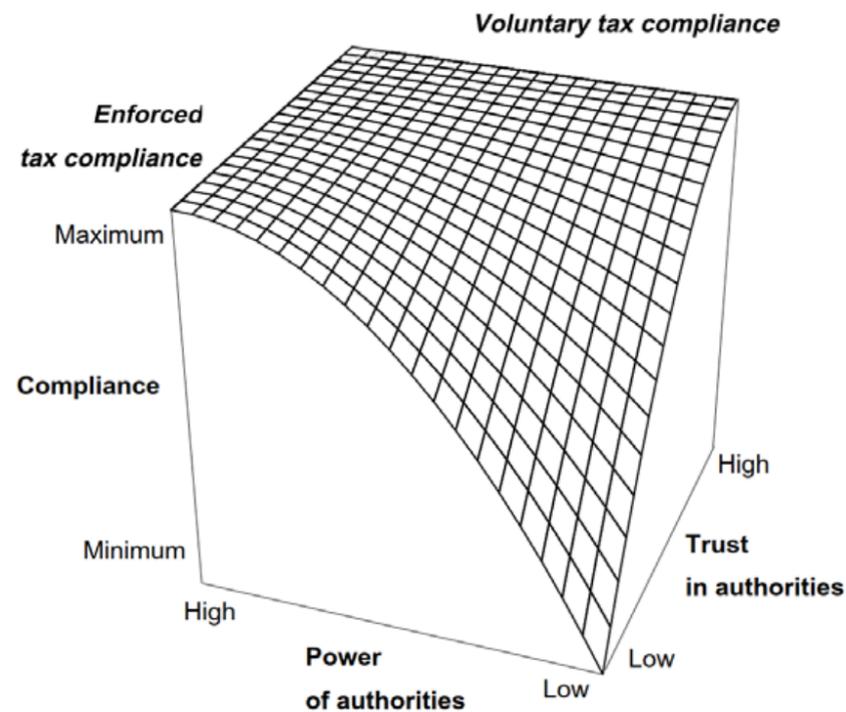
Jawaban Robbert Hoyng sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala. Dia bilang bahwa sifat bisnis Naspers/Prosus itu agak berbeda. Perusahaan ini menjalankan usahanya jauh dari keramaian publik. Mereka mencari uang melalui anak-anak perusahaan mereka di berbagai negara. OLX dan *belimobilguc.co.id*

contohnya. Perusahaan-perusahaan inilah yang menjadi wajah Naspers/Prosus di muka konsumen. Pajak bagi mereka adalah bagian dari bisnis sehari-hari. Karena itu pajak itu harus selalu nempel di bisnis mereka, di mana pun bisnis itu berada. Contohnya mereka punya *belimobilguc.co.id* di Indonesia. Mereka memperoleh uang dari operasi usaha ini. Maka bagi mereka pajaknya ya dibayar di Indonesia, bukan di tempat lain. Robbert bilang bahwa strategi pajak mereka berbeda dengan perusahaan teknologi asal Amerika, Apple atau Microsoft misalnya, yang memilih untuk mengkonsolidasi pajak di satu negara tertentu, biasanya negara yang *favourable* pajaknya. Bagi Naspers/Prosus, mereka dapat uang dari Indonesia, jadi pajak harus dibayar di Indonesia. Bukan di Belanda, tempat markas besar mereka, atau di Afrika Selatan, tempat perusahaan mereka berasal.

Robbert lalu menambahkan bahwa di Naspers/Prosus, tidak ada upaya untuk mengejar *effective tax rate* serendah mungkin. Tapi memang mereka mencari kestabilan. Asal pembayaran pajak mereka stabil, terprediksi, dan ada kepastian atas perlakuan pajak, itu sudah cukup bagi mereka. Oleh karena itu Naspers/Prosus dan anak-anak perusahaannya mempunyai strategi untuk menjalin kerja sama sebaik mungkin dengan kantor pajak. Mereka tidak keberatan ikut ke dalam mekanisme *cooperative compliance*. Hal ini karena dengan mengikuti skema ini, mereka bisa memperoleh perlakuan yang pasti, mendapatkan *equality before the law*, dan pembayaran pajak yang stabil dan *predictable*. Tentunya sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan mereka. Mereka tidak berkeberatan membayar pajak yang tinggi asal sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Makanya mereka mau saja membangun sistem elektronik, tentunya tidak murah, yang membuat mereka bisa bertukar data secara *real time* dengan kantor pajak asal itu menghasilkan apa yang mereka cari: *predictability*, *stability*, dan *equality*. Guilherme kemudian menceritakan proses ketika salah satu anak perusahaan Naspers/Prosus di Rusia masuk ke dalam program *cooperative compliance*. Awalnya ketika tim pajak Ketika mereka yakin bahwa mereka akan dapat apa yang mereka cari di program itu, mereka langsung ikut. Ketika saya tanya mengenai biaya yang harus mereka bayar karena harus membangun sistem yang *nyambung* dengan sistem kantor pajak Rusia, Gui menjawab tanpa ragu bahwa itu adalah ‘... *money well-spent*.’

Pembicaraan dengan orang-orang Naspers/Prosus membuat saya berpikir: bisakah hal ini diterapkan di Indonesia? Satu hal yang pasti, sistem ini cukup indah. *Cooperative compliance is not for everyone for sure*, karena memang memerlukan investasi yang besar dalam basis data. Dia juga membutuhkan ketersediaan data yang lengkap dari wajib pajak. Data yang ada saja tidak cukup, karena data-data ini, yang biasanya dibuat oleh berbagai divisi, harus dijadikan satu sebelum aksesnya dibuka

Gambar 1  
Slippery Slope Framework



ke kantor pajak. Ini tidak mudah. Bahkan perusahaan multinasional berskala besar seperti Naspers/Prosus pun mengakui bahwa data mereka punya, namun mengintegrasikan data-data itu menjadi satu kesatuan tidaklah mudah. Jelas dari sini saja diketahui bahwa sistem ini hanya cocok untuk wajib pajak besar. Makanya di Australia mereka juga menargetkan *cooperative compliance* pada wajib-wajib pajak besar saja.

Di Indonesia sendiri saat ini PLN dan Pertamina sudah bergabung ke dalam mekanisme yang oleh pemerintah disebut dengan *cooperative compliance*. Namun apakah ini benar-benar tulus? Atau jangan-jangan sekedar seremonial semata? Hal ini karena fondasi utama supaya *cooperative compliance* bisa jalan adalah bahwa wajib pajak harus bisa sepenuhnya mempercayai kantor pajak. Ini yang oleh Kirchler (Gambar 1) disebut dengan *trust in authorities*. Kata kuncinya adalah *trust*. Pertanyaannya kemudian adalah apakah di Indonesia wajib pajak dan kantor pajak sudah saling percaya?

Ini yang mendorong saya untuk melakukan riset kecil-kecilan. Ide dasarnya adalah bahwa *trust* antara dua pihak bisa dibangun jika dua pihak itu dekat, saling tahu, saling paham siapa mau apa. *Like family*. Kata kuncinya adalah *dekat*. Ini oleh Borgardus disebut dengan *social distance*. Dalam konteks ini, Brathwaite pernah menyebut kalau sebenarnya *voluntary compliance* itu akan muncul kalau *social distance* itu kecil. Makanya Fullarton dalam penelitiannya di kawasan tambang di Pilbara, Australia Barat menyebutkan bahwa banyak *miners* yang terlibat dalam *mass-marketed tax avoidance scheme* melawan ATO karena mereka merasa jauh dari pemerintah. Sudah lingkungan kerja mereka keras, jauh di pedalaman, jauh dari peradaban dan fasilitas negara, lingkungan panas dan keras, namun mereka kena tarif pajak tinggi. *Social distance*-nya besar, jadi mereka tidak *okay-okay* saja ikut *tax avoidance scheme* yang ditawarkan ke mereka. Jadi *compliance* tidak ada karena *social distance* yang besar.

*Okay*, kembali ke riset kecil-kecilan saya tadi. Saya menyebarkan kuesioner ke wajib-wajib pajak di sekitar KPP Pondok Aren. Saya juga menyebarkan kuesioner yang sama ke wajib pajak yang tergabung ke dalam komunitas UKM Sahabat Pajak (USP). USP ini adalah komunitas yang di lingkungan Pondok Aren dikenal dekat dengan KPP Pondok Aren. Mereka sering mendapat bantuan kewirausahaan dengan koordinasi KPP Pondok Aren. Sebagai imbal balik, anggota USP sering terlibat dalam aktivitas sosialisasi perpajakan, bukan hanya di KPP Pondok Aren namun juga di KPP-KPP lain di Jakarta dan Banten. Beberapa kali anggota komunitas ini diundang oleh Kantor Pusat DJP untuk memberikan sosialisasi kepada sesama pemilik UKM. Jadi, *de facto*, memang USP ini dekat dengan kantor pajak.

Hasil dari survei kecil-kecilan ini menunjukkan bahwa memang *social distance* wajib pajak yang tidak tergabung dalam USP secara rata-rata berbeda dengan mereka di USP. Jadi memang kelihatannya tidak cukup bukti yang mengindikasikan bahwa *social distance* antara wajib pajak dengan kantor pajak di Indonesia kecil. Jadi kalau memang *social distance*-nya saja tidak bisa dibilang kecil, bagaimana *trust* antara wajib pajak dengan kantor pajak bisa terwujud? Apalagi pernah ada kasus di mana SPT Tahunan salah satu politikus besar, yang seharusnya rahasia, malah yang bocor ke media massa. Jadi, bisakah kantor pajak dipercaya? Padahal, jika kita kembali ke Gambar 1, *trust* itu faktor yang utama supaya *voluntary compliance* timbul. *Trust* juga merupakan fondasi atas *cooperative compliance*. Anda tahu sendiri kalau membangun rumah, jika tidak ada fondasi yang kuat, maka rumah yang Anda bangun itu bakal mudah runtuh. *Cooperative compliance* juga sama: jika *trust*-nya masih lemah, tidak akan terwujud sistem yang kekuatannya memadai. Inilah yang membuat saya yakin bahwa, setidaknya pada saat ini, agak susah menerapkan *cooperative compliance* di Indonesia, karena memang masing-masing pihak masih memandang dengan saling curiga. Bagaimana pendapat Anda?

DANIEL PANGARIBUAN  
WIDYAISWARA AHLI UTAMA PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

# DAPATKAH *LEAN LEARNING* MENJADI SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELATIHAN?

## ABSTRAK

*Kegiatan pelatihan diharapkan dapat memberikan dampak yang semakin besar terhadap kinerja organisasi. Sehubungan dengan itu lembaga pelatihan diharapkan agar terus memperbaiki diri dengan meningkatkan efektivitasnya. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan menerapkan Lean Learning.*

*Kata Kunci: Efektivitas, kinerja, lean, pelatihan.*

Pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan merupakan pertanyaan esensial dalam pengelolaan suatu kegiatan atau organisasi. Pertanyaan ini juga sangat relevan ditujukan kepada kegiatan pelatihan atau lembaga pelatihan. Pertanyaan tentang efektivitas pelatihan dalam organisasi semakin menarik dengan adanya artikel yang ditulis oleh Steve Galavesky (2019) dengan judul: “*Where Companies Go Wrong with Learning and Development*”. Steve dalam tulisannya mempertanyakan efektivitas pelatihan dan pengembangan. Bagaimanapun, setiap lembaga pelatihan telah berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelatihannya, karena sudah seharusnya lembaga ini berada paling depan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun demikian, sudah selayaknya kita melakukan evaluasi terhadap efektivitas setiap kegiatan pelatihan.

## SEBERAPA EFEKTIF PELATIHAN KITA?

Pembahasan dalam tulisan ini akan bertitik tolak dari tulisan Steve Glaveski

(2019) yang mempertanyakan efektivitas pelatihan tersebut. Steve menyajikan data bahwa secara global pada tahun 2016 organisasi menghabiskan dana untuk pelatihan sebesar \$359 miliar yang merupakan jumlah yang relatif besar. Sementara pada sisi lain data menunjukkan bahwa 75% dari 1.500 manajer yang disurvei dari 50 perusahaan tidak puas terhadap fungsi pelatihan dan pengembangan organisasinya; 70% dari pegawai yang dilatih mengakui bahwa pelatihan tidak membuat mereka menguasai keahlian untuk pekerjaannya; hanya 12% dari pegawai yang menerapkan hasil pelatihannya pada pekerjaan mereka; dan hanya 25% dari responden dalam survei McKinsey yang percaya bahwa pelatihan secara terukur dapat meningkatkan kinerja.

Data di atas menjelaskan bahwa dana pelatihan pegawai yang sudah dikeluarkan oleh organisasi relatif besar, tetapi hasilnya belum sebanding dengan yang diharapkan. Secara rasional dilihat dari aspek bisnis kurang masuk akal. Atau dengan kata lain pelatihan belum efektif dan sekaligus belum efisien.

Steve mengutip pernyataan Kaplan yang mengatakan bahwa pendidikan sering bukan belajar tentang keterampilan kerja yang berguna, tetapi tentang orang yang pamer atau memberi sinyal bahwa dengan mendapatkan pendidikan atau pelatihan seseorang sudah layak mendapatkan promosi. Pernyataan Steve ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan masih berorientasi kepada produk (*product oriented*), atau belum berorientasi kepada kebutuhan pelanggan (*customer oriented*) yaitu organisasi. Steve selanjutnya mengatakan bahwa alasan untuk menyelenggarakan pelatihan cenderung salah. Maksudnya adalah bahwa pelatihan belum fokus pada tujuan agar pegawai memiliki keterampilan kerja di perusahaannya, tetapi lebih cenderung untuk kebutuhan lembaga pelatihan itu sendiri dan kepentingan pribadi pegawai itu sendiri. Misalnya lembaga diklat lebih peduli terhadap kepentingan lembaganya daripada kepentingan organisasi pengguna.

Steve memiliki pengertian yang berbeda tentang efektivitas pelatihan dibandingkan dengan pengertian

efektivitas menurut lembaga pelatihan. Steve mengukur efektivitas pelatihan dari dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi. Artinya, pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya dari pelatihan harus segera dipraktikkan sehingga berdampak terhadap kinerja organisasi. Sedangkan lembaga pelatihan mendefinisikan efektivitas pelatihan sesuai dengan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan adalah agar peserta pelatihan nantinya mampu menerapkan materi pelatihan. Kemampuan ini bisa diukur pada saat peserta mampu nenerapkan materi dalam menyelesaikan suatu kasus pada saat pelatihan.

#### PENERAPAN LEAN LEARNING

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelatihan ini, Steve menyarankan supaya lembaga pelatihan menerapkan pembelajaran *lean learning*. Untuk memahami lebih lanjut tentang *lean learning*, ada baiknya kita terlebih dulu mencoba memahami pengertian *lean manufacturing* yang dapat kita amati lebih nyata. Pengertian *lean manufacturing* menurut Hansen et.al (2009) adalah pendekatan untuk merancang operasi yang menghilangkan pemborosan dan memaksimalkan nilai bagi pelanggan. *Lean manufacturing* ini ditandai dengan mengirimkan produk yang tepat ke konsumen, dengan jumlah yang tepat, dengan kualitas yang tepat (tanpa cacat), pada saat pelanggan membutuhkan, dan dengan biaya yang rendah.

Keberhasilan dalam penerapan *lean manufaturing* akan berdampak kepada perbaikan yang signifikan seperti pada peningkatan kualitas, peningkatan produktivitas, penurunan *lead time*, penurunan jumlah persediaan, penurunan waktu untuk *set up*, penurunan biaya produksi, dan peningkatan jumlah produksi.

Pada dasarnya *lean manufacturing* ini semakin fokus pada kepuasan pelanggan dengan meningkatkan pertambahan nilai (*value added*) dari setiap kegiatannya yang mendukung orientasi kepada pelanggan (*customer oriented*) dan menghilangkan

pemborosan. *Lean learning* berusaha menerapkan konsep yang digunakan oleh *lean manufacturing* di atas dalam pembelajaran.

Selanjutnya Steve menjelaskan bahwa *lean learning* menyangkut empat hal pembelajaran yaitu belajar tentang intisari dari kebutuhan belajar, menerapkannya ke situasi nyata dengan segera, mendapatkan umpan balik langsung dan menyempurnakan pemahaman pembelajar serta mengulangi siklus.

Terkait dengan pernyataan Steve tentang *lean learning* ini, lembaga pelatihan diharapkan mempersiapkan materi pelatihan dengan sungguh-sungguh sampai menemukan intisari dari suatu pembelajaran. Lembaga pelatihan diharapkan memproses secara matang suatu materi pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk modul pembelajaran. Di dalam pembajaran tersebut, materi yang kurang penting dihilangkan.

Untuk membahas materi ini tentunya dibutuhkan suatu tim yang memahami betul tentang inti materi pembelajaran. Lembaga pelatihan perlu menghindari penyajian materi yang belum dipersiapkan dengan matang yang bisa membingungkan peserta. Dengan adanya inisiasi pembelajaran ini, pembelajaran menjadi sederhana dan lebih mudah dipahami oleh peserta pelatihan serta dapat dikaitkan dengan penerapannya di lapangan. Contohnya adalah dalam pembelajaran kepemimpinan, lembaga pelatihan mesti mempersiapkan materi kepemimpinan sampai menemukan instisari kepemimpinan yang relatif sederhana yang sesuai dengan kebutuhan belajar dan merancang sampai dapat diterapkan pada situasi nyata di lapangan. Misalnya yang dibutuhkan di suatu instansi adalah perubahan atau perbaikan pelayanan. Dalam hal ini intisari kepemimpinan adalah kepemimpinan perubahan dalam pelayanan.

Perlu disadari bahwa suatu pelatihan berbeda dari kegiatan kuliah di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi seorang dosen mengambil materi dari buku dan disajikan

dalam *power point*. Isinya sebagian besar adalah teori. Dalam pelatihan suatu materi mesti diseleksi terlebih dulu yaitu yang relevan dengan kebutuhan. Materi tersebut kemudian disarikan dan dituangkan dalam modul. Selanjutnya disajikan dalam berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan untuk dapat diterapkan di lapangan.

Agar dapat diterapkan ke situasi nyata, materi pembelajaran harus bersumber dari kebutuhan di lapangan melalui Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP). Perancang materi pembelajaran dengan demikian harus memahami betul kebutuhan organisasi. Atau dengan kata lain perancang materi adalah orang atau pihak yang mengetahui permasalahan organisasi. Seperti halnya profesi dokter yang terlebih dulu mendiagnosa penyakit pasiennya, baru kemudian memberikan resep obat untuk menyembuhkan penyakit. Di samping itu, suatu proses pelatihan harus sampai pada tahap perancangan penerapannya di lapangan dan peserta terus dibimbing pada saat penerapannya. Dengan demikian ada jaminan bahwa hasil dari pelatihan diterapkan dengan benar dan berdampak terhadap kinerja organisasi.

Rancangan pelatihan pada pertama sekali belum tentu pas betul dengan kebutuhan di lapangan. Materi yang disajikan bisa saja masih memiliki kelemahan atau kekurangan sehingga perlu diperbaiki. Materi yang kurang relevan perlu dihilangkan. Materi pelatihan perlu diperbaiki secara terus menerus dengan mendapatkan umpan balik dari peserta pelatihan atau dari organisasi. Selanjutnya umpan balik yang diperoleh digunakan untuk merancang ulang materi pelatihan.

Steve lebih lanjut memberikan tujuh cara untuk mengimplementasikan *lean learning* yaitu:

**Cara pertama.** Berpikir 80/20 yaitu menerapkan prinsip pareto. Prinsip pareto mengatakan bahwa 80% yang kita dapatkan bersumber dari 20% dari kegiatan yang kita lakukan. Atau 80% dari kegiatan yang kita lakukan hanya memberikan terhadap 20% kontribusi

yang kita dapatkan. Sebesar 80% kegiatan yang kita lakukan tersebut tentunya menghabiskan sumber daya yang besar, tetapi hasilnya hanya memberikan kontribusi 20%. Steve memberikan contoh, kalau mau belajar bahasa Jepang fokuslah pada 20% kata yang sering terjadi dalam 80% waktu belajar. Selanjutnya pergunakanlah kata tersebut dalam perbincangan. Kita tentunya telah berpengalaman belajar bahasa Inggris dari Sekolah menengah Pertama (SMP), bahkan ada yang sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi. Bahkan banyak yang mengikuti kursus bahasa Inggris dalam jangka waktu yang lama. Namun sebagian besar tetap kurang bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Inggris. Penyebabnya adalah karena kita terlalu banyak belajar tentang bahasa Inggris yang tidak terlalu kita butuhkan misalnya kata-kata dan tata bahasa yang jarang dipakai sehari-hari. Materi tambahan ini justru menyulitkan pembelajar yang mengakibatkan pembelajaran tidak lagi menarik kepada peserta. Dengan penerapan prinsip pareto kemungkinan besar pembelajaran lebih menarik dan hasilnya akan lebih bagus dengan waktu dan biaya yang lebih efisien.

**Cara kedua.** Aplikasikan pembelajaran dalam situasi yang nyata. Dengan demikian materi yang dipelajari tidak sia-sia karena digunakan dalam dunia nyata. Misalnya pengetahuan bahasa Inggris digunakan sehari-hari sehingga tidak lupa. Pengetahuan yang tidak digunakan akan cepat lupa jika tidak dipraktikkan. Steve menyarankan agar pegawai mempelajari materi yang dibutuhkan dan segera dipraktikkan. Pernyataan Steve ini sesuai dengan prinsip pembelajaran orang dewasa, yang hanya tertarik untuk belajar materi yang dibutuhkan. Cara kedua ini juga memotong materi pembelajaran yang kurang relevan dengan praktik di lapangan;

**Cara ketiga.** Gunakan pembelajaran terbimbing. Artinya daripada melakukan pelatihan dalam suatu periode tertentu di kelas saja, akan lebih baik diikuti dengan penerapan atau diaplikasikan di tempat kerja dengan bimbingan senior dan *coach* dari lembaga pelatihan. Cara ketiga

ini menyarankan agar sebagian materi pembelajaran yang lebih dekat dengan praktek agar diselenggarakan di tempat kerja. Metode ini sudah diterapkan dalam latsar untuk calon Pegawai Negeri Sipil;

**Cara keempat.** Konten materi diusahakan sesuai kebutuhan secara personal. Dengan dukungan teknologi pembelajaran dapat diberikan lebih bersifat personal sesuai dengan karakteristik pembelajar. Dalam pelatihan konvensional pendekatan pelatihan masih sering diberikan secara umum. Pada hal tingkat pemahaman dan kebutuhan peserta sering berbeda. Akibatnya ada peserta yang sudah menguasai sebagian materi dan ada yang ketinggalan materi. Seperti contoh, pembelajaran teknologi informasi bagi peserta yang usianya lanjut jangan dibuat satu kelas dengan yang masih muda karena pemahaman awal mereka juga berbeda dan tingkat kemampuan menyerap atau menerima juga berbeda;

**Cara kelima.** Berikan dukungan terus setelah selesai pelatihan. Setelah selesai pembelajaran, lembaga pelatihan tetap memberikan dukungan, sampai peserta benar-benar mampu menerapkannya di tempat kerja. Pelatihan di kelas merupakan awal pembekalan yang bersifat pengetahuan yang selanjutnya diteruskan di tempat kerja masing-masing. Penerapan di lapangan harus tetap mendapat dukungan oleh lembaga pelatihan. Cara kelima ini menyarankan pentingnya kerja sama lembaga diklat dengan organisasi tempat pegawai bekerja. Tanggung jawab lembaga pelatihan tidak hanya di kelas, tetapi setelah selesai pelatihan atau tahap implementasi.

**Cara keenam.** Hidupkan pembelajaran sesama sejawat. Pembelajaran sejawat ini bisa dilakukan dengan membuat grup, sehingga seseorang yang mengalami kesulitan dapat bertanya kepada anggota lainnya. Seorang peserta yang sudah menguasai materi dan dapat mengimplementasikannya, dapat dimanfaatkan oleh lembaga pelatihan untuk membantu rekan lainnya yang belum menguasai. Atau pembelajaran sejawat ini dapat dipergunakan menjadi media diskusi;

**Cara ketujuh.** Tawarkan kursus mikro dengan topik yang relevan dengan kesempatan dan tantangan yang segera akan dihadapi peserta. Misalnya ada pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pelatihan sebelumnya. Dalam hal ini lembaga pelatihan perlu menyiapkan suatu paket pembelajaran yang lengkap untuk suatu kompetensi. Bagian dari paket tersebut nantinya akan ditawarkan kepada peserta diklat yang telah mendapatkan bagian paket tertentu. Lembaga pelatihan harus memiliki *database* kompetensi yang harus dimiliki seorang pegawai, pelatihan yang sudah diikuti dan pelatihan yang belum diikuti.

#### SIMPULAN

Pada dasarnya *learn learning* ini menyarankan agar belajar fokus pada kebutuhan yang segera akan digunakan. *Learn learning* berusaha menghindari materi pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan. Cara menghindarinya adalah dengan memotong atau memangkas materi yang tidak terlalu relevan dengan kebutuhan untuk implementasi di lapangan. Beberapa manfaat dari pelatihan yang fokus pada kebutuhan yang segera akan digunakan antara lain adalah peserta akan belajar dengan fokus dan dapat membayangkan penerapannya di lapangan. Disamping itu waktu pelatihan juga dapat dipangkas menjadi lebih pendek yang sekaligus dapat memangkas biaya pelatihan. Misalnya jangka waktu penyelenggaraan untuk setiap pelatihan harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang jelas dan materi yang hanya relevan dengan tujuan pembelajaran.

Ketujuh cara untuk implementasi *lean learning* yang dikemukakan oleh Steve di atas, pada intinya menyatakan agar pelatihan lebih fokus terhadap kompetensi yang benar-benar dibutuhkan. Tanggung jawab lembaga pelatihan tidak hanya di kelas, tetapi harus sampai diimplementasikan di lapangan. Dengan demikian sumber daya yang dikorbankan untuk pelatihan dapat dipertanggungjawabkan.

MOHAMMAD DJUFRI  
WIDYAISWARA MADYA PUSDIKLAT PAJAK

# ADA PAJAK PIGOVIAN PADA SEBATANG ROKOK

## ABSTRAK

Rokok dan hasil tembakau lainnya, di samping berdampak buruk bagi si perokok itu sendiri, juga berdampak kepada perokok pasif, sehingga rokok dapat menimbulkan kerugian makroekonomi dan biaya eksternalitas. Untuk mengatasi hal ini, WHO merekomendasikan kebijakan MPOWER (*Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce dan Raise Tax*) sebagai sebuah paket berisi enam kebijakan dalam pengendalian rokok. Sesuai dengan kebijakan MPOWER tersebut, salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan instrumen perpajakan. Dalam tulisan yang menggunakan metode penelitian deskriptif ini dibahas Pajak Pigovian yang dapat diterapkan sebagai alternatif dalam pendanaan biaya eksternalitas. Dari beberapa jenis pajak yang telah diberlakukan terhadap rokok, hanya Cukai dan Pajak Rokok yang dapat digolongkan ke dalam Pajak Pigovian. Pemahaman tentang Pajak Pigovian ini penting, agar para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan terkait pajak atas rokok ini, memperhatikan biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok ini.

Keyword : Pigovian Tax, eksternalitas negatif, pajak rokok

## PENDAHULUAN

Jika melihat posisi Indonesia terhadap negara-negara di ASEAN, Tan dan Dorotheo (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2016, di antara beberapa negara ASEAN, Indonesia menempati urutan teratas dalam hal jumlah perokok aktif (65.188.338 orang atau 36,3% dari penduduk dewasa), begitu juga dengan jumlah produksi rokok tahun 2016 sebanyak 342 milyar batang, yang terdiri dari 252.247 juta batang sigaret kretek mesin (SKM), 70.803 juta batang sigaret kretek tangan (SKT), dan 18.677 juta batang sigaret putih mesin (SPM).

Tan dan Dorotheo (2018) juga menyebutkan bahwa produksi rokok Indonesia cenderung terus meningkat setiap tahunnya, sebagaimana Grafik 1.

Peningkatan produksi rokok sebagaimana Katadata (2019), diiringi dengan tren penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang juga selalu meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, penerimaan CHT sebesar Rp 152,9 triliun atau berkontribusi sebesar 95,8% dari total

pendapatan cukai yang sebesar Rp 159,6 triliun. Angka penerimaan CHT pada 2018 meningkat 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 147,7 triliun. Pada 2019, diproyeksikan penerimaan CHT meningkat 3,9% menjadi Rp 158,9 triliun. Mulai 1 Januari 2020, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok rata-rata sebesar 21,56%, sehingga dalam Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara 2020 ditargetkan penerimaan CHT sebesar Rp 171,9 triliun atau tumbuh hingga 8,2%.

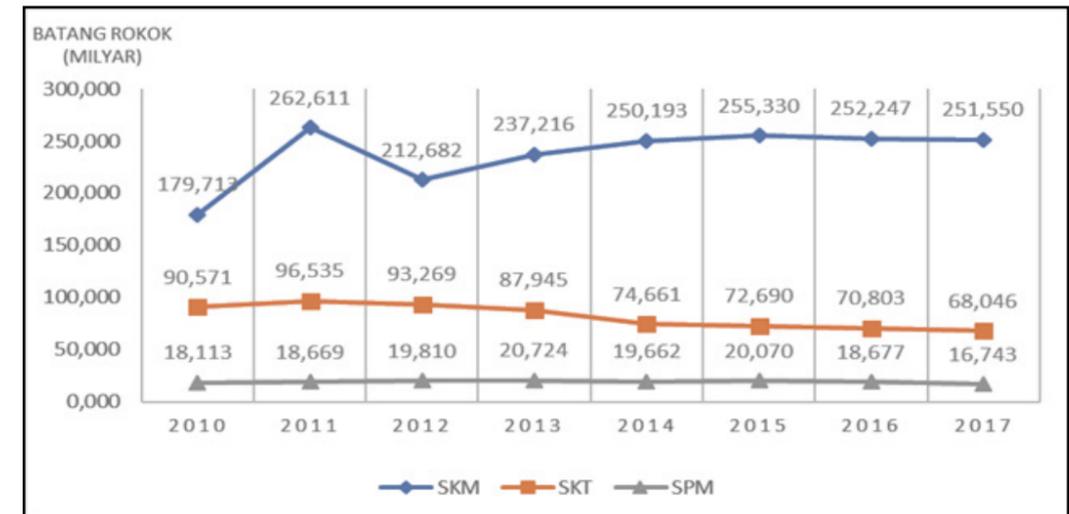
Sebagaimana dilansir Cnbcindonesia, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi alasan utama pemerintah menaikkan tarif cukai rokok. Alasan pertama adalah sebagai upaya mengurangi konsumsi rokok yang hingga saat ini mengalami tren yang meningkat.

Tabel 1  
Jumlah Produksi Rokok dan Jumlah Perokok Tahun 2016

Negara	Produksi Rokok (juta batang)	Jumlah Perokok (jiwa)
Filipina	84.963	16.500.000
Indonesia	342.000	65.188.338
Malaysia	9.422	4.991.458
Singapura	6.698	345.000
Thailand	36.143	10.676.361
Vietnam	106.848	15.600.000

Sumber: Tan dan Dorotheo (2018)

Grafik 1  
Produksi Rokok 2010-2017



Sumber: Tan dan Dorotheo (2018)

Perokok anak-anak dan remaja naik 7% menjadi 9%. Perokok perempuan naik dari 2,5% menjadi 4,8%. Alasan yang kedua adalah untuk mengatur industri rokok, dan alasan ketiga berkaitan dengan kepentingan penerimaan negara.

Infodatin (2018) menyebutkan bahwa karena adanya filter pada ujung batang rokok, dari 100% bahaya asap rokok, hanya 25% yang dirasakan oleh perokok aktif. Sebanyak 75% bahaya asap rokok justru menerpa orang yang terpapar asap rokok orang lain (perokok pasif). Padahal, dalam asap rokok terdapat sekitar 4.000 senyawa kimia yang dihirup oleh perokok pasif. Akibatnya, perokok pasif berpotensi mendapatkan berbagai penyakit. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan 2013, populasi perokok pasif di Indonesia mencapai 96,9 juta jiwa. Terdiri atas 30,2 juta jiwa laki-laki dan 66,7 juta orang perempuan (Katadata, 2019).

Seperti yang dilansir dari Laporan Penelitian Kementerian Kesehatan pada 2015 konsumsi rokok rata-rata orang per hari yaitu 12,3 batang atau 369 per bulan. Jika harga pokok per batang Rp. 700,00 maka belanja rokok per kapita

per bulan sebesar Rp 258.300,00 atau setahun sebesar Rp3.099.600,00. Dan jika dikalikan dengan jumlah perokok aktif yaitu sebesar 36,3 % dari penduduk dewasa (atau 65,188 juta orang), maka jumlah pengeluaran untuk rokok per tahun adalah sebesar Rp208,8 triliun.

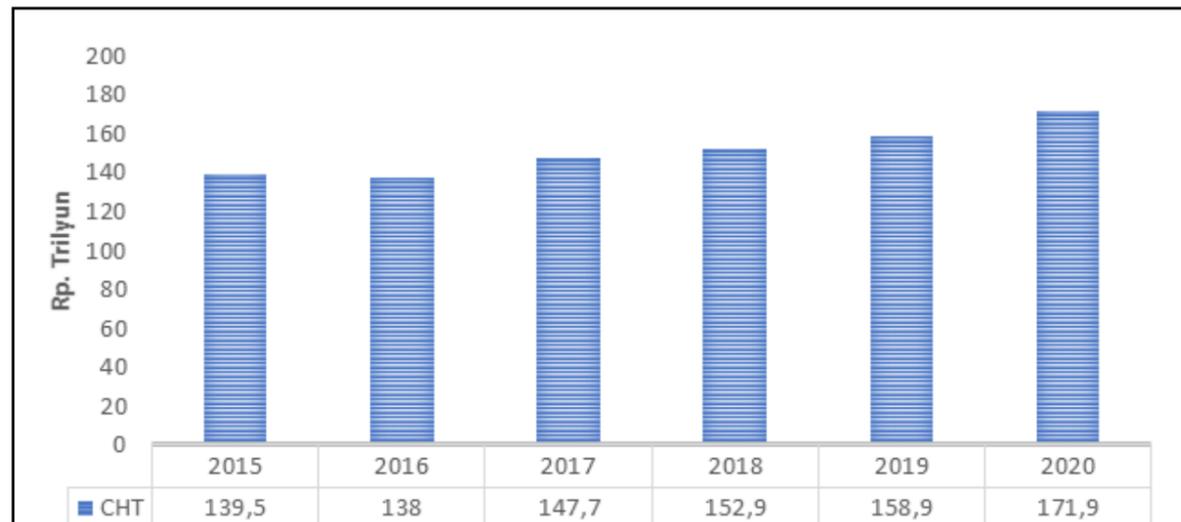
Laporan Penelitian Kementerian Kesehatan pada 2015 juga menyebutkan angka *Disability Adjusted Life Years* (DALYs) menunjukkan terdapat 8.558.601 DALYs, dimana seseorang dapat kehilangan tahun produktif karena morbiditas, disabilitas dan kematian dini yang disebabkan oleh tembakau. Sementara biaya rawat inap untuk kesehatan, dengan mengambil dari data Asuransi Kesehatan Nasional pada RS kelas B pada 2015 yaitu sebesar Rp 13.6 triliun, dan biaya rawat jalan asumsi satu kunjungan per kasus sebesar Rp53,4 miliar. Jika mengacu data IMF yang mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar US\$3,362. Maka dengan memperhitungkan DALYs yang sebesar 8.558.601, kerugian makroekonomi sebesar US\$28,7 miliar atau Rp374,06 triliun.

Mengingat banyaknya kerugian yang diakibatkan asap rokok ini, pada 2008, WHO memperkenalkan kebijakan MPOWER (*Monitor, Protect, Offer, Warn, Enforce dan Raise Tax*) sebagai sebuah paket berisi enam kebijakan dalam pengendalian rokok. Kebijakan MPOWER ini meliputi pemantauan penggunaan tembakau dan kebijakan pencegahannya, perlindungan orang dari asap rokok, penawaran bantuan untuk berhenti merokok, peringatan akan bahaya rokok, penerapan larangan iklan rokok, termasuk promosi dan sponsorshipnya, serta menaikkan pajak rokok (WHO, 2019).

Sebagaimana data sebelumnya, jumlah perokok yang terus meningkat dan jumlah orang yang terpapar asap rokok pun akan meningkat, yang mengakibatkan biaya eksternalitas yang semakin besar, maka pengendalian terhadap penggunaan hasil tembakau harus segera dilakukan.

Sesuai dengan kebijakan MPOWER di atas, salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan instrumen pajak. Tulisan ini akan meninjau kebijakan perpajakan atas

Grafik 2  
Tren Penerimaan Cukai Hasil Tembakau



Sumber: Katadata (2019)

hasil tembakau dan jenis pajak apa yang tepat menjadi sumber pendanaan atas biaya eksternalitas akibat penggunaan hasil tembakau, sebagai bahan para pengambil keputusan terkait pengendalian terhadap penggunaan rokok.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang menurut Sumanto (1990) dimaksudkan untuk memberi gambaran atau penegasan dari suatu konsep atau gejala termasuk untuk menjawab pertanyaan sesuai tujuan dari penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Pajak atas Sebatang Rokok

Saat ini, beberapa instrumen perpajakan telah diterapkan untuk mengendalikan penggunaan rokok dan penerimaan negara, yaitu Cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Rokok sebagai Pajak Daerah, serta bea masuk atas produk hasil tembakau impor.

#### a. Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang

tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yang mengatur tentang Cukai. Sifat atau karakteristik barang kena cukai tersebut sebagaimana Pasal 2 Undang-undang tersebut adalah barang tertentu yang atas konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Barang kena cukai yang saat ini adalah etil alkohol (EA), minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya (penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007). Sepanjang 2018, penerimaan cukai hasil tembakau berkontribusi sebesar 95,8% dari total pendapatan cukai (Katadata, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Cukai, Barang kena cukai berupa hasil tembakau

untuk yang dibuat di Indonesia dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi sebesar 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 57% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Sementara untuk yang diimpor dikenai cukai dengan tarif paling tinggi sebesar 275% dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk. Untuk harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran maka tarifnya sama sebesar 57%. Tarif cukai tersebut dapat diubah dari persentase harga dasar (*advalorem*) menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai (spesifik) atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.

Mulai tahun 2020 Pemerintah telah menetapkan kenaikan cukai rokok rata-rata sebesar 21,56% dan harga jual eceran rokok rata-rata sebesar 35%. Siaran Pers Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa penyusunan kebijakan hasil tembakau telah mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, yaitu pengendalian konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal. Sepanjang 2013-2018, kenaikan tarif cukai dan penyesuaian harga jual

eceran hasil tembakau telah berhasil mengendalikan produksi hasil tembakau dengan penurunan produksi sebesar 2,8% dan meningkatkan penerimaan negara sebesar 10,6%.

Hasil dari penerimaan cukai hasil tembakau ini, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) digunakan untuk mendanai program/kegiatan : (a) peningkatan kualitas bahan baku; (b). pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial; (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/ atau (e). pemberantasan barang kena cukai ilegal, serta program/kegiatan tersebut diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah.

#### b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas barang kena pajak (BKP) yang dikonsumsi di dalam negeri (UU No 42/2009). Rokok dan produk hasil tembakau lainnya adalah termasuk BKP yang dikenai PPN, baik atas penyerahan rokok oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) produsen atau hasil tembakau yang diimpor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Hasil Tembakau ini dihitung dengan menerapkan tarif efektif dikalikan sebesar 9,1% (sembilan koma satu persen) dengan Nilai Lain yaitu Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau. Pengenaan PPN ini satu kali saja yaitu pada tingkat produsen dan/atau importir.

#### c. Pajak Rokok

Dalam UU No 28/2009 dijelaskan bahwa Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dasar pengenaan berupa cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap hasil tembakau.

Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan juga bahwa Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan *smoking area*, kegiatan sosialisasi, dan iklan layanan masyarakat. Sementara Penegakan hukum yang dapat dikerjasamakan dengan pihak lain seperti pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sumbangan pajak rokok terhadap layanan kesehatan lebih besar. Dalam Perpres tersebut, disebutkan dengan jelas bahwa kontribusi pajak rokok dari pemerintah daerah adalah sekitar 75% dari 50% total realisasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah daerah harus dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

#### d. Bea masuk

Dalam Penjelasan Umum UU No 10/1995 dijelaskan bahwa adanya Bea Masuk atas impor barang termasuk hasil tembakau ini diantaranya dimaksudkan sebagai upaya pengendalian produksi dalam negeri sehingga tercipta iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor mengatur tentang tarif bea masuk atas impor barang ke dalam daerah pabean. Dalam PMK tersebut diantaranya dinyatakan bahwa terhadap cerutu dan sigaret dikenai bea masuk atas impornya dengan tarif sebesar 40%. Namun tarif tersebut tidak berlaku untuk impor dari cerutu atau sigaret dari seluruh negara, berdasarkan PMK Nomor

26/PMK.010/2017 cerutu dan sigaret asal Negara-negara ASEAN dan China dikenai bea masuk dengan tarif 0%.

#### e. Perhitungan Pajak atas Rokok

Untuk memahami perhitungan pajak atas sebatang rokok, diilustrasikan PT. ABC sebagai produsen rokok memproduksi rokok dengan jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM). Perusahaan ini termasuk Pengusaha Pabrik Golongan I dengan batasan jumlah produksi lebih dari 3 milyar batang rokok, sehingga berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 diperkenankan menjual rokok dengan Harga Jual Eceran (HJE) terendah sebesar Rp.1.700/batang dan tarif cukai Rp. 740/batang. Dengan asumsi satu bungkus rokok berisi 16 batang, maka jumlah pajak yang dibayar atas sebungkus rokok adalah sebesar Rp. 15.499 dengan rincian perhitungan sebagaimana Tabel 2.

Apabila rokok tersebut adalah barang impor yang asalnya selain dari negara-negara ASEAN atau China, maka berdasarkan PMK No 6/PMK.010/2017, atas rokok tersebut ketika masuk ke dalam daerah pabean akan dikenai bea masuk sebesar 40% dari nilai pabean atau nilai transaksi dari rokok tersebut. Selanjutnya atas rokok impor tersebut akan dikenai kembali cukai, PPN dan Pajak Rokok.

### 2. Eksternalitas Negatif Akibat Rokok

Sebagai salah satu penerimaan negara, pajak atas hasil tembakau membawa efek positif bagi keuangan negara. Namun, di sisi lainnya justru menimbulkan dampak merugikan yaitu berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan beberapa data yang telah disebutkan pada Pendahuluan, tidak dapat dipungkiri bahwa bahaya asap rokok bukan saja bagi si perokok itu sendiri tetapi berbahaya bagi orang lain yaitu para perokok pasif yang terpapar oleh asap rokok.

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan suatu pihak terhadap kondisi pihak lain disebut eksternalitas, sebagaimana Mankiw (2018:190) menyebutkan bahwa *"Eksternalitas muncul ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang memengaruhi*

Tabel 2  
Perhitungan Pajak atas Rokok

Jenis Pajak	Tarif	Jumlah Pajak	Aturan
Cukai	Rp. 740/batang	Rp. 11.840	152/PMK.010/2019
PPN	9,1% x HJE	Rp. 2.475	207/PMK.010/2016
		Asumsi nilai HJE terendah yang diambil dalam perhitungan ini	Mengubah tarif 8,7% menjadi 9,1%
Pajak Rokok	10% x Cukai	Rp. 1.184	UU nomor 28 Tahun 2009

Sumber: Hasil Olahan Penulis

*kesejahteraan orang lain tetapi orang lain tersebut tidak membayar atau menerima kompensasi atas efek yang ditimbulkan oleh aktifitas tersebut. Jika dampak tersebut merugikan, itu disebut eksternalitas negatif. Jika bermanfaat, disebut eksternalitas positif*

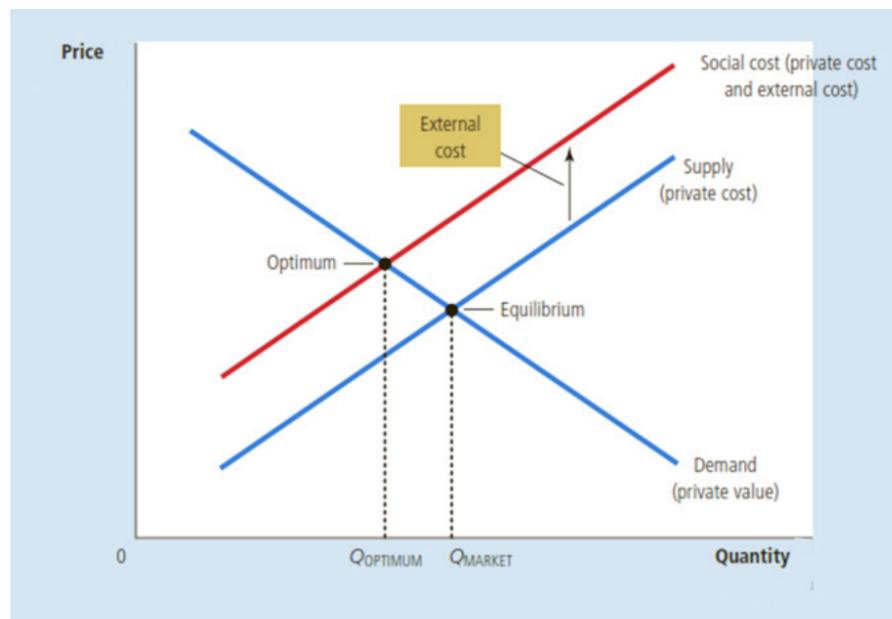
Dampak yang merugikan akibat asap rokok adalah eksternalitas negatif. Adanya eksternalitas negatif tersebut membuat perbedaan tingkat kesejahteraan yang diterima perokok aktif dan perokok pasif. Manfaat yang diterima perokok aktif jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh perokok pasif.

Karena adanya eksternalitas, maka terdapat biaya untuk mereka yang terkena dampak buruk oleh asap rokok. Ini yang disebut biaya eksternalitas. Untuk setiap batang rokok yang diproduksi, terdapat biaya sosial yang terdiri dari biaya privat ditambah biaya eksternalitas.

Mankiw (2018:193) mengatakan bahwa solusi untuk mengganti biaya eksternalitas memberikan penalti kepada pihak yang menimbulkan eksternalitas negatif, yaitu berupa pajak. Adanya pajak bisa menekan produksi perusahaan sehingga titik optimum kesejahteraan secara sosial dapat diwujudkan. Gambarnya bisa dilihat dalam Grafik 3 berikut.

Kurva biaya sosial (*social cost*) berada di atas kurva penawaran karena memperhitungkan biaya eksternalitas yang dibebankan pada masyarakat oleh produsen rokok. Sementara kurva penawaran hanya mencerminkan *privat cost*. Perbedaan antara kedua kurva ini mencerminkan biaya eksternalitas. Keseimbangan optimum secara sosial tersebut dapat dicapai apabila kurva penawaran bergeser ke kiri dan berhimpit dengan garis biaya sosial. Untuk menggeser kurva penawaran ke kiri, bisa ditempuh dengan membebankan

Grafik 3  
Biaya Eksternalitas



Sumber: Mankiw (2018)

pajak kepada produsen, sehingga produsen rokok akan menghasilkan jumlah rokok yang optimal secara sosial. Pajak seperti ini dikenal dengan nama Pajak Pigovian.

### 3. Pigovian Tax

Pajak yang diberlakukan untuk menangani dampak eksternalitas negatif dari suatu aktifitas disebut pajak korektif (*corrective tax*) atau disebut juga Pajak Pigovian (*Pigovian* atau *Pigouvian Tax*), setelah ekonom Arthur Pigou (1877–1959) yang menginisiasi penggunaan istilah tersebut (Mankiw, 2018:196). Pajak Korektif atau Pajak Pigovian yang ideal akan sama dengan biaya eksternalitas dari suatu kegiatan dengan eksternalitas negatif. Dengan penerapan Pajak Pigovian memaksa individu untuk mempertimbangkan konsekuensi pemakaian produk yang menimbulkan eksternalitas negatif bagi lingkungan sekitarnya. Beberapa contoh Pajak Pigovian adalah, pajak karbon, pajak bahan bakar, pajak kebisingan, pajak minuman beralkohol, pajak soda, pajak gula dan pajak rokok.

Dengan penerapan pajak kebisingan (*noise tax*) misalnya, karena menimbulkan kebisingan bagi lingkungan sekitar bandara, Perancis memungut pajak kebisingan untuk pesawat di sembilan bandara tersibuknya, berkisar dari 2 euro hingga 35 euro tergantung pada bandara dan berat pesawat. Pemerintah menggunakan pendapatan itu untuk membangun rumah-rumah kedap suara yang terpapar tingkat kebisingan melebihi 70 dB (Amadeo, 2019).

Pengenaan pajak pigovian ini menimbulkan pro dan kontra (Amadeo, 2019). Pihak yang sependapat menyatakan bahwa pajak Pigouvian dapat mencegah perilaku yang menciptakan eksternalitas negatif. Misalnya, pengenaan pajak bensin dapat mengurangi penggunaan kendaraan sekaligus mendanai pemeliharaan jalan raya. Pajak Pigovian ini juga dapat menciptakan efisiensi yang lebih besar dalam suatu perekonomian, terutama

ketika penerimaan dari pajak pigovian ini digunakan untuk menutupi biaya kerusakan eksternal. Sebaliknya yang kontra, berpendapat memang idealnya, pajak Pigouvian sama dengan biaya yang dihasilkan oleh eksternalitas negatif, namun kenyataannya biaya eksternalitas ini sulit diukur secara pasti. Pajak Pigouvian juga dapat dianggap regresif karena tarifnya yang flat, atau sama untuk semua orang. Dan penerapan pajak ini juga dipandang tidak efisien, sebagai contoh pajak air tanah yang telah dicoba diterapkan di Belanda namun akhirnya dicabut kembali.

Terlepas dari pro kontra penerapan Pajak Pigovian, yang menjadi *concern* dalam tulisan ini adalah pembahasan adanya pajak pigovian dalam komoditas rokok. Pengenaan Cukai dan Bea Masuk dimaksudkan untuk pengendalian konsumsi rokok, sementara PPN dimaksudkan untuk memajaki konsumsi rokok sebagai barang kena pajak. Penerimaan negara dari Bea Masuk dan PPN tidak dikhususkan untuk mendanai biaya eksternalitas, tetapi untuk mendanai pembangunan di segala bidang. Sementara Penerimaan dari Cukai, digunakan untuk mendanai program yang diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap Daerah. Begitu pun dengan penerimaan dari Pajak Rokok yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, yang hasilnya dialokasikan paling sedikit 50 % untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Dan 75% dari 50% total realisasi penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian pemerintah daerah tersebut harus dialokasikan sebagai bentuk dukungan atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

Pajak Rokok dan Cukai inilah yang sejalan dengan konsep pajak Pigovian, karena pajak tersebut dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan negara/daerah yang dapat mengganti biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok. Sementara Bea Masuk dan PPN tidak sesuai konsep Pajak Pigovian karena

penerimaan pajak dari kedua jenis pajak tersebut tidak dikhususkan untuk pengendalian pola konsumsi rokok atau sumber pembiayaan atas biaya eksternalitas.

### PENUTUP

Rokok menimbulkan eksternalitas negatif, masyarakat perokok pasif terdampak untuk itu perokok harus menembusny dengan membayar pajak. Pajak rokok terdiri dari cukai, Bea Masuk, PPN dan Pajak Rokok (Pajak Daerah). Hanya Cukai dan Pajak Rokok yang sejalan dengan konsep pajak Pigovian, karena penerimaan dari pajak tersebut dapat dijadikan sebagai pendanaan biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh asap rokok. Sementara Bea Masuk dan PPN tidak sesuai konsep Pajak Pigovian karena penerimaan pajak dari kedua jenis pajak tersebut tidak dikhususkan untuk pengendalian pola konsumsi rokok atau sumber pembiayaan atas biaya eksternalitas.

Pemahaman tentang Pajak Pigovian ini penting, agar para pengambil kebijakan dalam menentukan kebijakan terkait pajak atas rokok dan hasil tembakau lainnya, memperhatikan biaya eksternalitas yang ditimbulkan oleh penggunaan rokok ini. Cukai dan Pajak Rokok diterapkan bukan untuk mematikan industri rokok, namun memberikan dis-insentif meningkatnya jumlah perokok khususnya di kalangan anak-anak dan generasi muda.

ILUSTRASI:  
THALIA MAUDINA



RETYAN LAKSITA MUTIARY

# Virus Corona Menghantui Perkembangan Segala Sektor di Dunia

Sejak awal kemunculannya pada akhir Desember 2019 hingga detik ini, *epidemi global novel Coronavirus* terus melaju tak terkendali. Wuhan yang berada di Selatan Beijing ini sebelumnya tidak begitu dikenal, namun setelah virus Corona pertama kali terdeteksi di kota ini mendadak nama Wuhan menjadi perbincangan dunia. Kota yang berjarak sekitar 1.160 kilometer dari Beijing tersebut kini bak kota mati dan terpaksa diisolasi.

Virus Corona tipe baru atau yang disebut Covid-19 ini telah menginfeksi puluhan ribu orang di Cina bahkan menelan ribuan korban jiwa. Tak luput seorang dokter Cina pertama yang memperingatkan bahaya virus Corona namun tak sedikit juga yang menentangnya, Li Wenliang, dan seorang direktur Rumah Sakit di Wuhan, Wuhan Wuchang Hospital yang bernama Liu Zhiming, pada kenyataannya harus mengembuskan nafas terakhir akibat terinfeksi virus mematikan tersebut.

Virus yang umumnya terdeteksi dimulai dengan gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas ini sedang menjadi perhatian dunia karena sudah mulai menyebar ke beberapa negara. Setidaknya terdapat ribuan orang di berbagai negara dilaporkan meninggal akibat virus ini, dengan mayoritas kasus di dataran Tiongkok. Sejumlah negara bahkan menyewa pesawat khusus untuk memulangkan warga negaranya dari Wuhan karena virus Corona terus mewabah.

Terdapat laporan bahwa belasan negara telah terpapar virus Corona. Sementara itu korban virus tersebut juga berjatuh di negara-negara Asia Tenggara termasuk Singapura dan Malaysia. Bahkan di Filipina sudah ada laporan kasus kematian pertama akibat virus Corona tipe baru yang terjadi di luar Tiongkok.

Namun yang lebih mengkhawatirkan lagi ketika kasus Corona telah menyerang negara kita baru-baru ini. Suatu hal yang menjadi ketakutan masyarakat benar-benar terjadi. Tapi jangan sampai hal

ini membuat kita menjadi paranoid berlebihan. Lebih baik kita tingkatkan kewaspadaan mengingat masa inkubasi virus ini lebih panjang, yaitu satu hingga empat belas hari.

Tahukah anda, selain membawa dampak kesehatan, virus Corona juga telah membuat khawatir banyak negara karena akan mengguncang ke semua sektor, baik sektor ekonomi, industri, sosial, budaya, pariwisata, maupun sektor-sektor lainnya. Berikut beberapa fakta yang terjadi di berbagai negara akibat munculnya virus Corona.

## 1. Industri Otomotif Cina Lumpuh Total

Diketahui, Wuhan, kota dengan penduduk 11 juta jiwa ini adalah pusat industri dan bisnis terbesar di Cina. Kota ini juga merupakan rumah bagi sejumlah pabrik otomotif global.

Di antaranya adalah General Motors (GM), Nissan, Renault, Honda, dan Peugeot PSA Group.

Pabrik Otomotif Honda Motor dan PSA Group telah menarik karyawan di sekitar Wuhan. Selain menarik karyawan, perusahaan tersebut juga mempertimbangkan untuk menghentikan produksi akibat virus yang mudah menyebar ini. Manufaktur di Cina dihentikan selama sepekan sampai dengan hari Raya Imlek dan akan dibuka pada pekan berikutnya. Namun pabrik otomotif diduga akan tutup lebih lama lagi. Tidak hanya Honda Motor dan PSA Group, Toyota dan General Motor juga telah membatasi perjalanannya ke Cina, Sementara itu, Nissan juga memiliki rencana menarik sebagian besar karyawan dan anggota keluarga mereka dari wilayah Wuhan untuk kembali ke negara asal.

## 2. Penjualan Apple Anjlok

Virus Corona membuat raksasa teknologi Apple Inc. sedikit lesu. Sebagai informasi Apple baru saja kehilangan *market cap* atau kapitalisasi pasarnya hampir Rp600 triliun dalam waktu dua hari perdagangan

saja. Pendapatan di kuartal 2 tahun fiskal 2020 akan lebih rendah dari prediksi sebelumnya akibat wabah Covid-19.

## 3. Beberapa negara Terancam Resesi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya (seolah-olah terhenti); menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang (industri). Kali ini, bayang-bayang resesi menghantui tiga negara yang memiliki hubungan erat dengan negara Cina dari bidang ekonomi. Tiga negara tersebut adalah Jerman, Singapura, dan Jepang.

Jerman adalah negara ekonomi terbesar Eropa yang terletak di bagian tengah benua Eropa merupakan salah satu negara terkaya dan terkuat di dunia. Namun semenjak wabah Covid-19 menghantui dunia banyak yang terkena imbasnya. Khususnya bagi negara ini. Jerman juga patut waspada, pasalnya pertumbuhan ekonomi negeri Panser di kuartal keempat tahun 2019 *stagnan* alias tidak tumbuh dari kuartal sebelumnya pada tahun lalu. Jerman sudah nyaris mengalami resesi akibat perang dagang Amerika Serikat dengan Cina.

Sementara itu, data dari *Cabinet Office* menunjukkan produk domestik bruto Jepang menyusut 6,3 persen secara *year on year*. Angka ini lebih parah dari perkiraan pasar yang memprediksi terjadi penurunan 3,7 persen secara tahunan.

Hal serupa terjadi pada Singapura, negara yang sangat bergantung pada ekspor sebagai motor pertumbuhan ekonomi ini diprediksi akan jatuh ke jurang resesi. Padahal jika ditilik pada tahun 2018 lalu, Singapura menyumbang 176,4 persen dari produk domestik bruto dan tujuan ekspor utamanya adalah negara Cina. Sehingga kemungkinan terjadi resesi sangat besar, mengingat negara bersimbolkan Patung Merlion ini adalah salah satu negara yang memiliki korban Corona dengan jumlah tinggi selain negara Cina dan Korea Selatan.

#### 4. Dampak Corona di Sektor Perdagangan Indonesia

Efek domino wabah virus Corona dikhawatirkan menurunkan daya tahan industri dalam negeri salah satunya adalah industri perdagangan. Yang menjadi salah satu perhatian secara serius terkait dengan barang impor adalah binatang hidup yang menimbulkan kemungkinan potensi untuk bisa menularkan wabah virus Corona. Oleh karena itu akan dilakukan pelarangan impor untuk sementara waktu sambil dikaji segala sesuatunya dengan perkembangan yang ada.

#### 5. Liga Champions Asia, Stadion Bola Sepi

Liga Champion Asia dilaporkan ikut terdampak penyebaran virus mematikan ini. Para pemain harus selalu menggunakan masker saat merumpuk di lapangan. Laga babak *playoff* yang dimenangkan Shanghai SIPG dengan skor 3-0 atas tim Thailand Buriram United digelar dalam kondisi stadion tertutup. Bahkan stadion ini kosong dari penonton. Sedangkan pertandingan fase grup yang melibatkan tim Cina diprediksi juga akan terdampak. Penyebaran virus Corona juga mengharuskan *kick off* Liga Super China 2020 juga diundur tanpa batas waktu yang jelas. Asosiasi sepak bola Cina sampai akan berkonsultasi dengan pemerintah terkait situasi ini.

#### 6. Laga Inter Milan di Liga Eropa Terancam Batal

Hingga tulisan ini dibuat, pemerintah setempat mengonfirmasi terdapat dua orang meninggal akibat virus Corona di Italia. Italia mencatat 132 kasus terkait virus Corona dengan 26 orang mendapat perawatan intensif. Melihat peristiwa itu, 46 pertandingan sepak bola di Italia mulai dari Serie A, Serie B, hingga amatir batal digelar pada hari Minggu, 23 Februari 2020.

#### 7. Tim Bulu Tangkis Indonesia mundur dari turnamen

Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) memutuskan

menarik keikutsertaan tim bulu tangkis Indonesia dari turnamen *Lingshui China Masters 2020* yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Februari hingga 1 Maret 2020 mendatang. Indonesia berencana mengirim 44 pemain ke turnamen tersebut, di antaranya adalah Juara Dunia Junior 2019.

Susi Susanti selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI mengatakan bahwa situasi di Tiongkok kurang kondusif, karena wabah virus Corona ini membahayakan sekali sehingga mereka harus menjaga pemain. Selanjutnya beberapa tim Indonesia dari cabang olah raga lain yang sedang berlatih di Tiongkok juga sudah ditarik kembali ke Indonesia. Hal ini dilakukan demi menjaga agar virus tersebut tidak sampai menginfeksi para tim pemain Indonesia.

Sementara itu, PP PBSI kemungkinan besar juga akan membatalkan keberangkatan pemain ke *Badminton Asia Championships 2020* yang rencananya akan dilangsungkan di Wuhan, Tiongkok pada April mendatang.

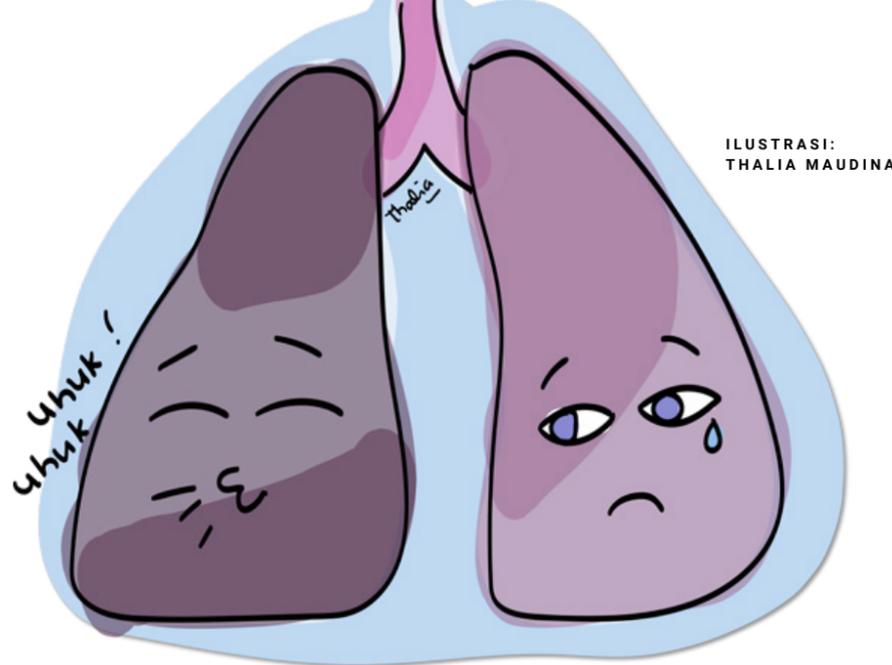
#### 8. Kelesuan Pariwisata Indonesia gegara Corona

Tidak bisa dipungkiri dengan adanya krisis kesehatan global ini tentunya akan berdampak terhadap perekonomian global terlebih pada sektor pariwisata. Sektor ini yang paling merasakan dampak dari virus Corona. Cina merupakan penyumbang wisatawan terbanyak di dunia. Jika dilihat dari data BPS, sekitar 175 ribu wisatawan

dari Cina datang setiap bulannya ke Indonesia, kemudian apabila dilihat secara global, 13,6 juta wisatawan manca negara yang datang ke Indonesia, Cina menduduki posisi kedua terbanyak setelah Malaysia. Dengan adanya virus Corona ini hampir 20 persen wisatawan Cina batal ke Indonesia. Tidak hanya wisatawan Cina, wisatawan dari negeri lain juga turut menunda keberangkatannya karena wilayahnya yang juga terjangkit virus dengan nama resmi Covid-19 ini.

\*Diambil dari beberapa sumber\*

*Tidak bisa dipungkiri dengan adanya krisis kesehatan global tentunya akan berdampak terhadap perekonomian global terlebih pada sektor pariwisata. Sektor ini yang paling merasakan dampak dari virus Corona. Cina merupakan penyumbang wisatawan terbanyak di dunia.*



ILUSTRASI:  
THALIA MAUDINA



Pada suatu kesempatan, beberapa mahasiswa yang sedang mengikuti workshop menulis bertanya tentang bentuk komunikasi yang tidak tersurat (nonverbal). Mereka ingin tahu bagaimana seharusnya berkomunikasi nonverbal saat bicara di hadapan publik atau *public speaking*. Ada yang bingung harus bagaimana menggerakkan kedua tangannya ketika berbicara, atau harus memakai sepatu apa ketika berbicara di depan publik, apakah boleh berjalan-jalan di atas panggung, dan lain sebagainya.

Komunikasi nonverbal adalah hal yang mutlak dilakukan ketika kita melakukan komunikasi verbal, termasuk ketika *public speaking*. Bahkan pakar komunikasi mengatakan bahwa komunikasi kita sebagian besar didominasi oleh komunikasi nonverbal. Seringkali ketika berbicara di hadapan umum, ada rasa gugup atau gelisah, sehingga menimbulkan keresahan termasuk bagaimana cara kita akan bersikap, bagaimana pandangan audiens terhadap kita, dan berbagai kekhawatiran lainnya.

Ketika melakukan *public speaking*, audiens akan memerhatikan setiap pesan yang menempel pada diri kita, baik verbal maupun nonverbal. Sehingga penting bagi para *public speaker* untuk memerhatikan setiap aspek tidak hanya komunikasi verbalnya, tetapi juga nonverbalnya. Pesan nonverbal yang tepat justru akan menguatkan pesan yang akan disampaikan pada audiens.

Pada dasarnya, komunikasi nonverbal memiliki lima fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah pengulangan atau repetisi. Komunikasi nonverbal dapat digunakan sebagai pengulangan terhadap komunikasi verbalnya, misalnya pembicara mengacungkan jempol setelah mengatakan “bagus” atau “mantap”. Fungsi kedua adalah pengganti atau substitusi. Fungsi ini digunakan untuk menggantikan pesan-pesan verbal tanpa harus berkata-kata, seperti mengangguk-anggukkan kepala tanda setuju dengan pendapat audiens, tanpa harus menyela pembicaraan audiens tersebut.

Fungsi komunikasi nonverbal yang ketiga adalah pertentangan atau kontradiksi. Hal ini memberikan makna yang bertolak belakang dengan bahasa verbal pembicara, contohnya berkata “bagus” tetapi dengan nada menertawakan. Fungsi yang keempat adalah penegasan atau aksentuasi. Fungsi ini bersifat memberikan penekanan terhadap bahasa verbal dari pembicara, misalnya dengan menyodorkan telunjuk atau ibu jari pada orang yang disebut. Fungsi yang terakhir adalah fungsi pelengkap atau komplemen. Fungsi ini mampu meregulasi perilaku verbal kita, seperti audiens yang memainkan ponselnya tanda mulai bosan atau sudah tidak tertarik dengan pembicaraan tersebut, sehingga pembicara harus mencari *ice breaking* atau menyudahi topik tersebut.

Kelima fungsi di atas perlu diketahui oleh para *public speaker* untuk membuat komunikasi lebih hidup dan natural. Ingat, natural berarti tidak terkesan dibuat-buat. Apabila Anda tidak biasa menggunakan bahasa tubuh atau nonverbal tertentu maka tidak usah dipaksakan sehingga terkesan kaku atau tidak natural, yang akan membuat audiens bosan atau bahkan malas melihat atau mendengar.

Selain fungsi, ada pula jenis-jenis komunikasi nonverbal yang perlu diketahui dan dicermati oleh para *public speaker* untuk lebih memaksimalkan atensi audiens. Jenis komunikasi nonverbal yang perlu dipahami *public speaker* ini meliputi bahasa tubuh (kinesik), vokal (paralinguistik), benda yang melekat pada tubuh (artifaktual), dan orientasi ruang (protosemik).

Bahasa tubuh merupakan bahasa nonverbal yang sangat mendukung komunikasi verbal. Bahasa tubuh ini meliputi gerakan tangan, postur tubuh, ekspresi wajah, hingga tatapan mata. Meski menunjang komunikasi verbal, sebaiknya Anda tidak perlu menggunakan terlalu banyak bahasa tubuh secara berlebihan karena justru akan mengganggu kenyamanan audiens. Misalnya, saya pernah menemukan pembicara yang sering menyentuh hidung ketika berbicara di depan publik (entah karena gugup atau kebiasaan), audiens malah sibuk menghitung berapa kali pembicara tersebut menyentuh hidung alih-alih fokus pada pesan yang disampaikan.

Bahasa tubuh lainnya yang juga cukup penting untuk para *public speaker* adalah kontak mata. Pembicara yang menghindari kontak mata akan membuat audiens merasa diabaikan dan berujung pada ketidaktertarikan mereka untuk menyimak. Ada tips untuk kontak mata bagi Anda yang mengalami kegugupan atau demam panggung saat melakukan *public speaking*. Jangan langsung menatap mata penonton, tetapi tataplah satu horizon tetap yang kemungkinan sejajar dengan mata penonton sehingga seolah-olah Anda sedang menatap mereka. Misalnya menatap bangku, pondasi di tengah penonton, tembok paling belakang, dan lain sebagainya. Tetapi jangan menatap satu titik terlalu lama, tataplah 2-3 benda secara bergantian selama kurang lebih 3-4 menit. Kalaupun menatap mata ketika sedang berbicara *one-on-one*, pakar komunikasi mengatakan ada baiknya pula jika pembicara tidak langsung tajam-tajam menatap ke arah mata, namun ke arah dahi pada area tepat di atas pertengahan kedua alis.

Jenis komunikasi nonverbal berikutnya adalah vokal. Bahasa nonverbal ini antara lain intonasi, nada bicara, tempo, dan intensitas bicara. Cara Anda melafalkan kalimat demi kalimat menjadi interpretasi yang berbeda-beda di audiens. Dengan vokal yang tepat, pesan Anda pun dapat melekat kuat dan menarik perhatian audiens. Oleh karena itu, tidak sedikit para praktisi *public speaker* yang melakukan olah vokal sebelum berbicara di hadapan publik.

Pesan artifaktual adalah keseluruhan benda atau karakteristik yang melekat pada tubuh kita meliputi pakaian, aksesoris, make up, dan lain sebagainya. Pesan artifaktual mampu memberikan image yang kuat yang menempel pada sang pembicara. Sebaliknya, jika pesan artifaktual yang ada tidak mendukung isi pesan pembicara, maka dapat mempengaruhi kredibilitas pembicara itu sendiri. Contohnya pembawa acara musik remaja yang mengenakan pakaian formal akan membuat penonton lebih abai terhadap pesan yang disampaikan dibandingkan pembawa acara yang menggunakan pakaian kasual.

Komunikasi nonverbal proksemik merupakan orientasi ruang personal dan sosial. Jika pembicara membuka sesi untuk berdiskusi namun dengan jarak yang cukup jauh dengan penonton, menunjukkan posisi yang menutup diri, maka penonton cenderung enggan untuk berdiskusi dibandingkan pembicara yang berinteraksi langsung berdekatan dengan audiens.

Jawaban atas pertanyaan para mahasiswa yang saya sebutkan di awal itu saya rasa, bagaimana kenyamanan pembicara dengan membuka seluas-luasnya peluang komunikasi nonverbal dalam setiap komunikasi yang dilakukan, dengan porsi yang sewajarnya tanpa berlebihan. Jika pembicara tidak nyaman untuk berjalan-jalan di atas panggung maka jangan memaksakan diri karena yang timbul mungkin adalah melangkah dengan ragu-ragu. Jika tidak terbiasa menggerakkan tangan pada saat berbicara maka jangan dipaksakan atau akan timbul gerakan-gerakan yang terlihat “nanggung”.

Berbicara dan berkomunikasi senatural mungkin, selayaknya kita berkomunikasi antarpersonal. Pada akhirnya, *public speaking* juga adalah tentang jam terbang. Semakin sering kita berbicara di depan publik dengan audiens yang berbeda-beda akan semakin meningkatkan kemampuan kita untuk mampu menjadi seorang *public speaker* yang andal. Maksimalkanlah apa yang bisa Anda usahakan melalui komunikasi nonverbal, untuk memaksimalkan pula pesan yang ingin disampaikan dan kesan yang akan ditinggalkan.

# Jas Hitam & Dasi Merah

SULTONI

Alumni Program Linkage Universitas Indonesia & Australian National University

Pagi tadi saya memakai setelan jas hitam lengkap dengan dasi merah yang semuanya baru dibeli. Sepertinya, terakhir memakai baju seperti ini delapan tahun lalu, ketika menikah. Saya berangkat untuk menghadiri acara yudisium yang berlokasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI). Bersama dengan mahasiswa dari jurusan lain, kami secara resmi dinyatakan lulus dari program pasca sarjana ilmu ekonomi dan menerima gelar Magister Sains Ekonomi (MSE). Pada saat yang sama beberapa di antara kami, termasuk saya, juga telah menyangang gelar Master of International Development and Economics (MIDEC) dari The Australian National University (ANU). Rasanya wajar, istri membelikan setelan jas dan dasi merah baru untuk acara yang cukup istimewa ini.

**PENYESUAIAN YANG TIDAK MUDAH**

Juli 2017, saya mulai masuk program S2 Ilmu Ekonomi di UI. Ilmu ekonomi ternyata sangat berbeda dengan ilmu akuntansi, apalagi perpajakan. Meskipun masuk kategori ilmu sosial, namun matematikalah yang justru menjadi *basic* pada hampir semua mata kuliah. Awal semester pertama menjadi saat yang terberat. Penyesuaian akademik yang saya lakukan pun cukup melelahkan. ‘*Susah nih, ‘kayaknya salah jurusan’, ‘lebih enak di kantor daripada kuliah kayak gini’* adalah kalimat-kalimat yang biasa saya ucapkan waktu itu.

Alah bisa karena biasa. Setelah enam bulan berlalu, semester dua saya sudah mulai terbiasa dengan materi kuliah. Saya bahkan berani mengikuti *sit in* di beberapa kelas untuk menambah wawasan, dan juga mengikuti kajian yang diadakan oleh adik-adik himpunan mahasiswa program S1. Ya, akhirnya ritme perkuliahan mulai bisa dinikmati. Sering saya pulang kampus petang hari, sekedar untuk menikmati suasana senja di sekitar Masjid UI di tepi Danau Kenanga. Kadang, saya juga mampir di jalan Margonda, menikmati meriahnya kuliner malam di antara stasiun UI dan Pondok Cina. Persiapan keberangkatan ke luar negeri adalah kesibukan yang menggembirakan di pengujung semester dua.

Saya merupakan penerima beasiswa PPSDM untuk S2 *linkage*. Terinspirasi oleh para senior ketika awal penempatan di tahun 2008, saya mulai bermimpi bisa seperti mereka, sekolah di luar negeri dengan beasiswa. Mimpi itu saya jaga dan akhirnya terrealisasi di tahun 2016, ketika dinyatakan lulus seleksi beasiswa S2 FETA *batch* 2. Dan setelah melalui serangkaian pelatihan dan seleksi lanjutan, saya ditetapkan masuk dalam kelompok *linkage* FETA-AAI. Tahun pertama, kami kuliah di UI dengan disponsori PPSDM dan tahun kedua di ANU dengan sponsor Australia Awards Indonesia (AAI).

**PELAJARAN DARI KOTA ‘SEPI’**

Awal Juli 2018, Canberra sedang menuju puncak musim dingin. Menurut Wikipedia, kota seluas 814 km<sup>2</sup> ini hanya berpenduduk sekitar 420 ribu jiwa, tidak lebih dari 5% dari populasi Jakarta yang luasnya hanya 661 km<sup>2</sup>. Bersama dengan delapan *awardee* lainnya, saya berangkat menuju kota sepi itu untuk melanjutkan kuliah kami di tahun kedua. Ini adalah pertama kalinya bagi saya datang ke negara empat musim. Tentu bukan perkara mudah untuk beradaptasi. Cuaca ekstrem, budaya yang asing, terpisah jauh dengan keluarga dan menjadi minoritas adalah hal sulit yang harus dihadapi. Beruntung, ada komunitas mahasiswa Indonesia dan komunitas pengajian yang banyak memberi bantuan.

Dua bulan berselang saya pulang ke Depok. Keluarga sudah siap dijemput. Ikut ke Canberra. Beruntung, kami mendapat akomodasi yang representatif. Lokasinya strategis tapi harga sewanya murah. Kami tinggal bersama *land lord*. Mereka adalah pasangan peneliti, warga negara Australia dan China, yang memiliki anak yang seumuran dengan anak kami. Seperti umumnya bertetangga, kami sering berinteraksi dan saling membantu. Dari mereka kami banyak belajar bagaimana hidup terbuka dan selalu menghargai perbedaan.

Program yang saya ikuti, International Development and Economics (IDEC) berada di bawah Crawford School of Public Policy, sehingga mayoritas mahasiswanya adalah pegawai pemerintah dari institusi yang membidangi masalah ekonomi dari berbagai negara. Bersyukur, penyesuaian akademik yang saya lakukan tidak seberat yang saya lakukan di UI dulu.

Adapun salah satu mata kuliah wajib yang kami pelajari pada semester pertama adalah *Government, Markets and Global Changes*. Mata kuliah ini cukup berbeda. Tidak banyak materi



FOTO : DOK. PRIBADI

kuantitatif, sebaliknya kami justru membuat *essay* tentang topik-topik yang tengah menjadi isu global. Kami dituntut untuk menulis tentang isu strategis dengan materi dan pendekatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga dibiasakan untuk berpendapat dalam forum dan membawakan materi suatu seminar. Saya cukup menikmati kelas ini.

Pernah suatu kali, profesor pengampu mata kuliah ini mengundang saya bersama keluarga untuk datang ke rumahnya. Kami pun disambut dengan sangat hangat oleh semua anggota keluarga profesor. Bahkan kami juga diminta untuk tinggal di rumahnya selama 2 minggu ketika mereka pergi ke luar kota. Dari keluarga sang profesor, kami belajar bahagia dengan hidup bersahaja dan saling menghargai antar anggota keluarga.

Kesibukan saya di semester berikutnya diantaranya adalah menyusun *master research essay*. Ini adalah mata kuliah wajib yang harus kami ambil sebagai pengganti tesis. Waktu itu, di penghujung Mei 2019 Canberra tengah menghadapi musim dingin yang lebih cepat dari biasanya. Saat itu juga bertepatan dengan hari-hari terakhir bulan Ramadhan. Siang menjelang sore kami bergiliran mempresentasikan *final essay* kami di depan pembimbing dan beberapa profesor penilai. Jadwal saya sekitar pukul 15.00 waktu setempat.

*Plong* rasanya. Setelah kurang lebih 30 menit presentasi di depan tiga orang profesor yang dilanjutkan dengan tanya jawab, mereka memberikan tanggapan yang positif. Saat itu waktu Maghrib sekitar pukul 17.00 waktu setempat. Masih ada sekitar 1,5 jam untuk saya bersepeda, pulang, buka puasa bersama keluarga. Mengenakan jaket *winter*,

sarung tangan, syal, kupluk dan helm, saya pun mulai meng-*gowes*. Dengan sumringah, saya tempuh jarak 5 km, menembus jalanan yang sudah mulai gelap dan hawa dingin yang makin menggigit.

Tidak hanya kuliah, selama di Canberra saya juga bekerja. Australia adalah negara yang perekonomiannya sangat ditopang oleh imigran. Mahasiswa internasional tetap diziinkan bekerja pada *teaching period*, meskipun dibatasi hanya 20 jam per minggu. Bersama dengan beberapa mahasiswa lain dari berbagai negara saya bekerja di sektor informal. Banyak hikmah yang dapat diambil dari pengalaman bekerja sebagai *blue-collar worker* di kota ini. Rasa syukur semakin bertambah. Kini, saya bekerja formal di kementerian yang prestisius. Saya bukan pekerja informal seperti yang saya lakoni beberapa bulan lalu di Canberra. Etos kerja yang sangat baik pekerja asal China dan daya juang yang tinggi mahasiswa asal Bhutan adalah

pelajaran lain yang menginspirasi untuk bisa bekerja lebih baik.

**KAPAN DIPAKAI LAGI?**

Tidak terasa, sudah tujuh bulan kami pulang dari kota itu. Dan pagi tadi, saya baru saja mengikuti yudisium di UI sebagai penutup proses kuliah *linkage* yang telah dijalani sejak pertengahan 2017. Saat ini, Senin 27 Januari 2020, pukul 23.30 waktu kota Depok. Saatnya istirahat. Sambut esok pagi dengan semangat baru. Jas hitam dan dasi merah yang tadi pagi dipakai masih tergantung di balik pintu kamar, menunggu untuk dipakai di momen istimewa berikutnya.

\*\*\*



ILUSTRASI: THALIA MAUDINA

M. FATH KATHIN

# OPTIMALKAN FOTO INSTAGRAM DENGAN PRESET LIGHTROOM

**P**reset yang ada di aplikasi Adobe Lightroom sebelumnya hanya dapat digunakan di aplikasi berbasis *desktop*, tapi sekarang Lightroom versi *mobile* pun sudah dapat menggunakan *preset* layaknya versi *desktop*. Sejak pertengahan tahun 2018, Adobe sebagai pemilik Lightroom, mengumumkan bahwa *preset* dan *profil* antara *desktop* dan *mobile application* dapat saling disinkronisasi. Hal ini berarti Lightroom versi *mobile* dapat menggunakan *preset* juga. Dan saat ini, pengguna Lightroom dapat langsung menambahkan *preset* ke Lightroom versi *mobile* tanpa perlu sinkronisasi dengan Lightroom versi *desktop*.

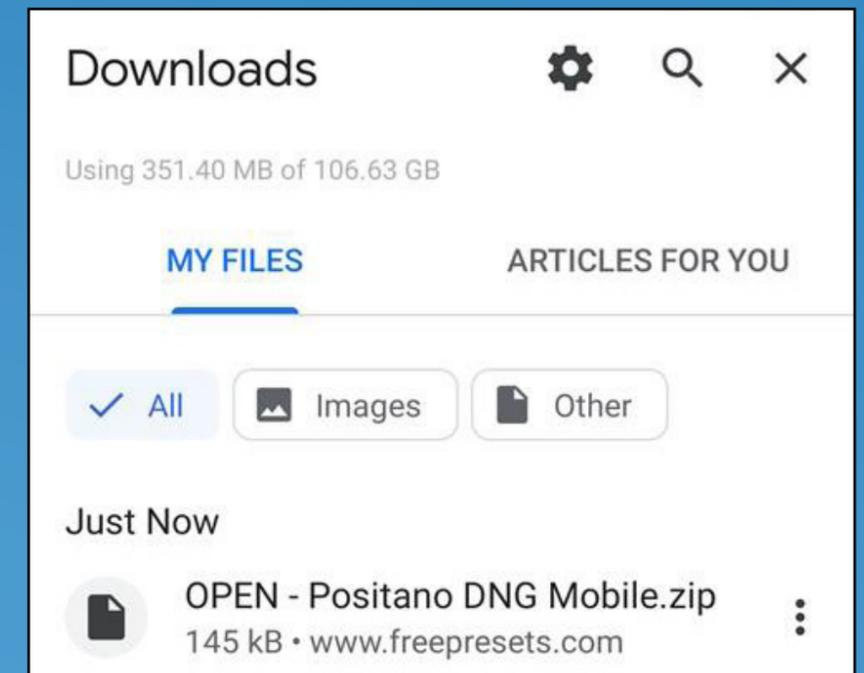
Tambahan fitur ini merupakan perubahan signifikan yang juga mempengaruhi cara orang dalam mengedit dan berbagi foto. Ditambah dengan kebiasaan orang pada saat ini yang sangat gemar melakukan segala sesuatu secara *mobile*. Orang-orang hanya perlu melakukan transfer foto dari kamera kesayangannya ke perangkat *mobile*-nya dengan fitur *wifi* transfer yang sudah menjadi fitur standar kamera masa kini. Lalu mereka dapat langsung mengedit foto mereka di perangkat *mobile* dengan aplikasi Lightroom. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Berikut akan dibahas langkah-langkah menggunakan *preset* di Lightroom versi *mobile*.

## 1. Cari *preset* yang diinginkan

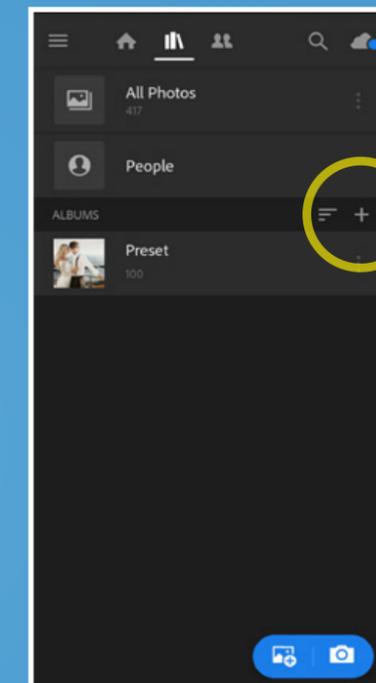
Langkah pertama yang perlu dilakukan tentu saja kita harus punya *preset*-nya terlebih dahulu. Saat ini sudah banyak tersedia di dunia maya *preset* Lightroom versi *mobile* bertebaran, dari yang berbayar hingga yang tersedia secara cuma-cuma. Kita hanya perlu mengetikkan kata kunci yang tepat pada mesin pencarian, maka beberapa pilihan akan muncul. Yang menjadi perhatian di sini adalah pastikan file yang akan kita unduh adalah benar file untuk Lightroom *mobile*. Karena *preset* dapat juga tersedia untuk Lightroom pada versi *desktop*. Biasanya format file yang dapat digunakan pada Lightroom *mobile* adalah **.DNG**.

2. Setelah mendapatkan file *preset* yang kita inginkan (**Gambar 1**), langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam aplikasi Lightroom *mobile* tersebut.
3. Buka Lightroom *mobile* pada gadget kemudian tap menu "New Item" (**Gambar 2**), kemudian tap lagi menu "Album" (**Gambar 3**) untuk membuat Album baru.

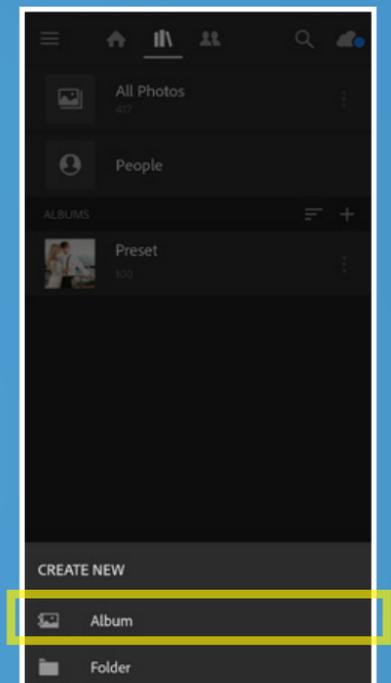
Gambar 1



Gambar 2

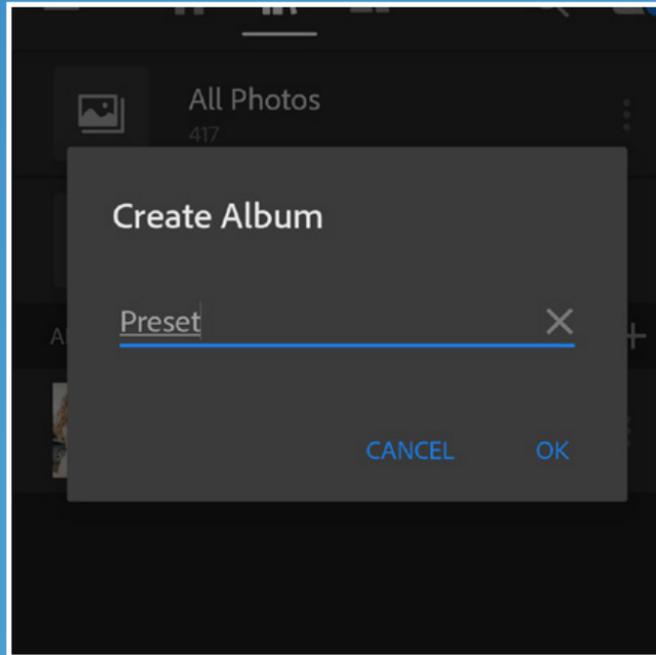


Gambar 3



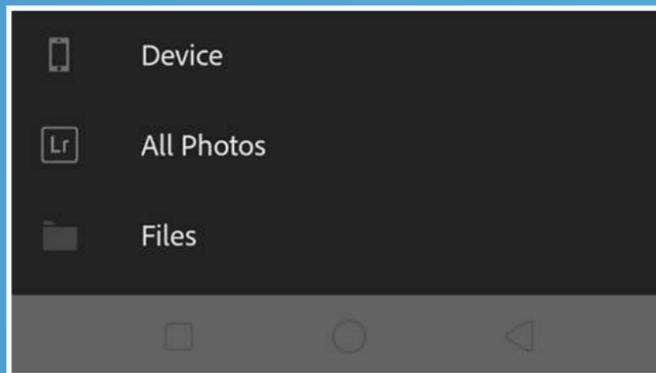
- Untuk memudahkan di kemudian hari, ketika *preset* kita semakin bertambah, sebaiknya buat album khusus *preset* ini. Beri nama untuk album yang baru kita buat, misalnya "*Preset*" (**Gambar 4**).

Gambar 4

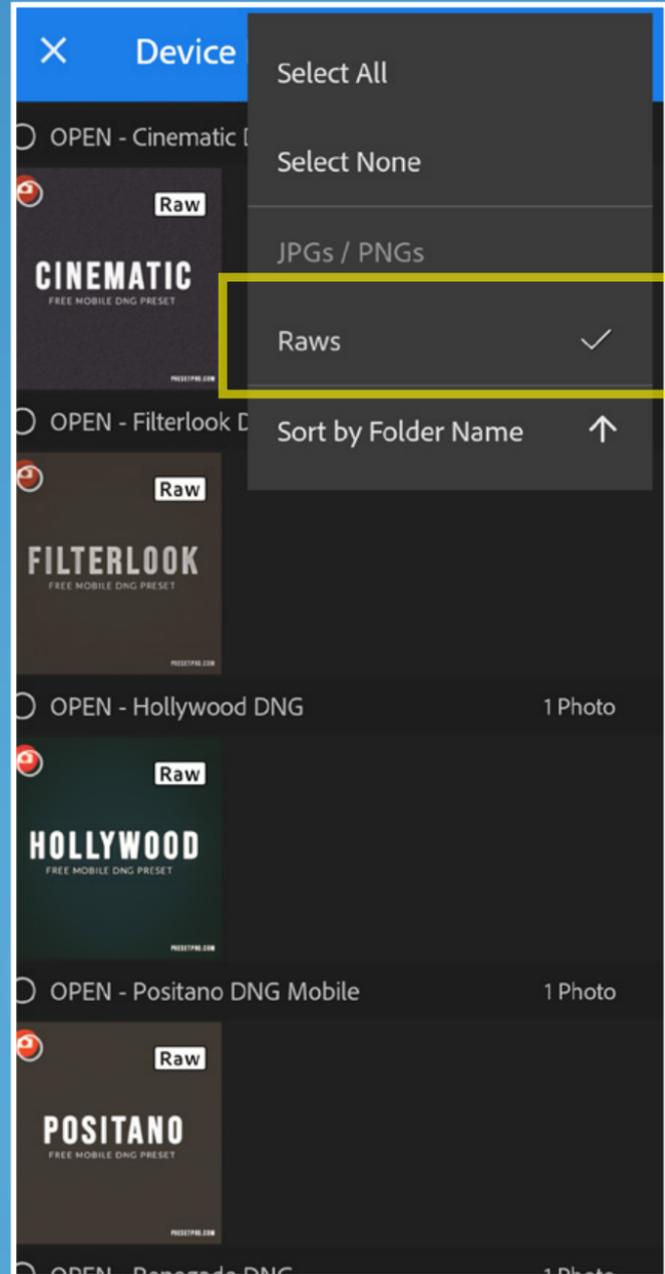


- Pada album "*Preset*" yang baru kita buat, kemudian tap tambahkan Photo from "**Device**" (**Gambar 5**). Pastikan pilihan RAW sudah tercentang (**Gambar 6**). Karena format DNG pada *preset* merupakan file RAW.

Gambar 5

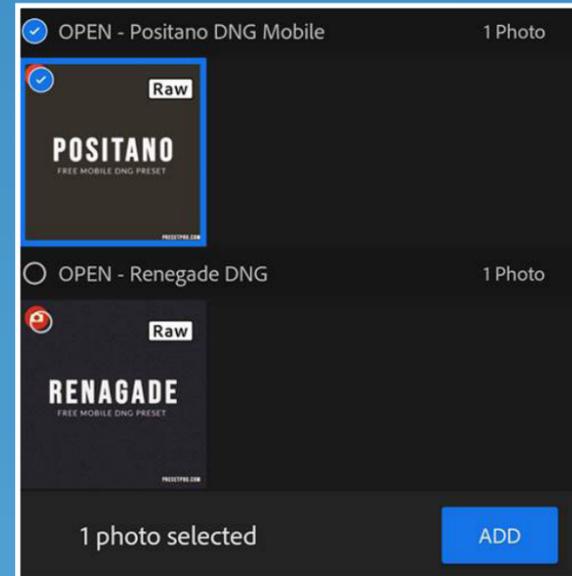


Gambar 6



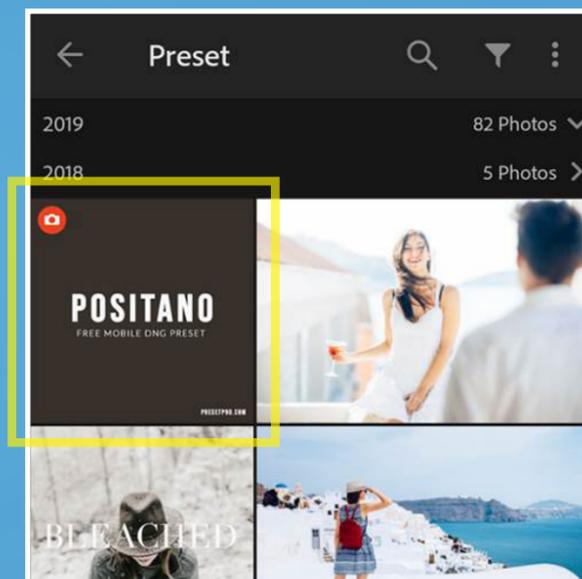
- Pilih salah satu *preset* yang sudah kita unduh tadi, lalu tap Add (**Gambar 7**).

Gambar 7



- Pada Album "*Preset*", maka *preset* yang telah kita tambahkan tadi akan terlihat. Kemudian tap pada *preset* yang telah ada di album tersebut untuk memulai proses menggunakan *preset* nya ke foto lain (**Gambar 8**).

Gambar 8

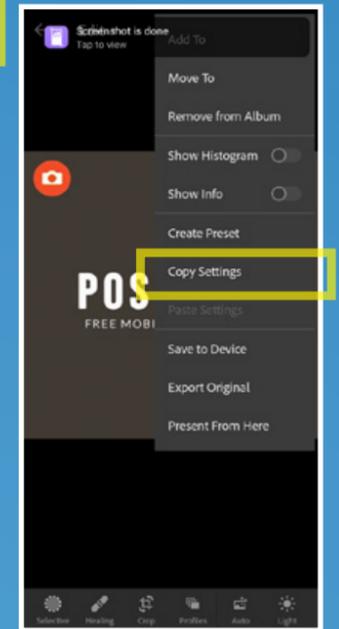


- Pilih *preset* yang ada di album, lalu tap 3 titik di pojok kanan (**Gambar 9**). Setelah muncul pilihan menu, tap pada menu Copy settings (**Gambar 10**). Dengan melakukan ini kita menyalin pengaturan pada gambar *preset* kita (**Gambar 11**).

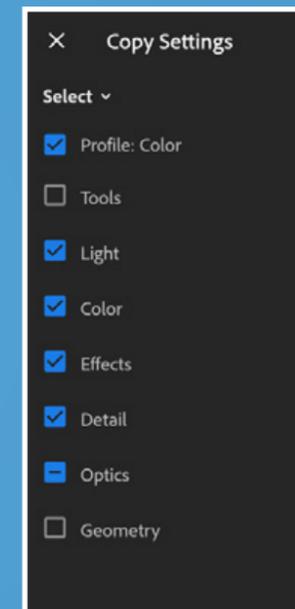
Gambar 9



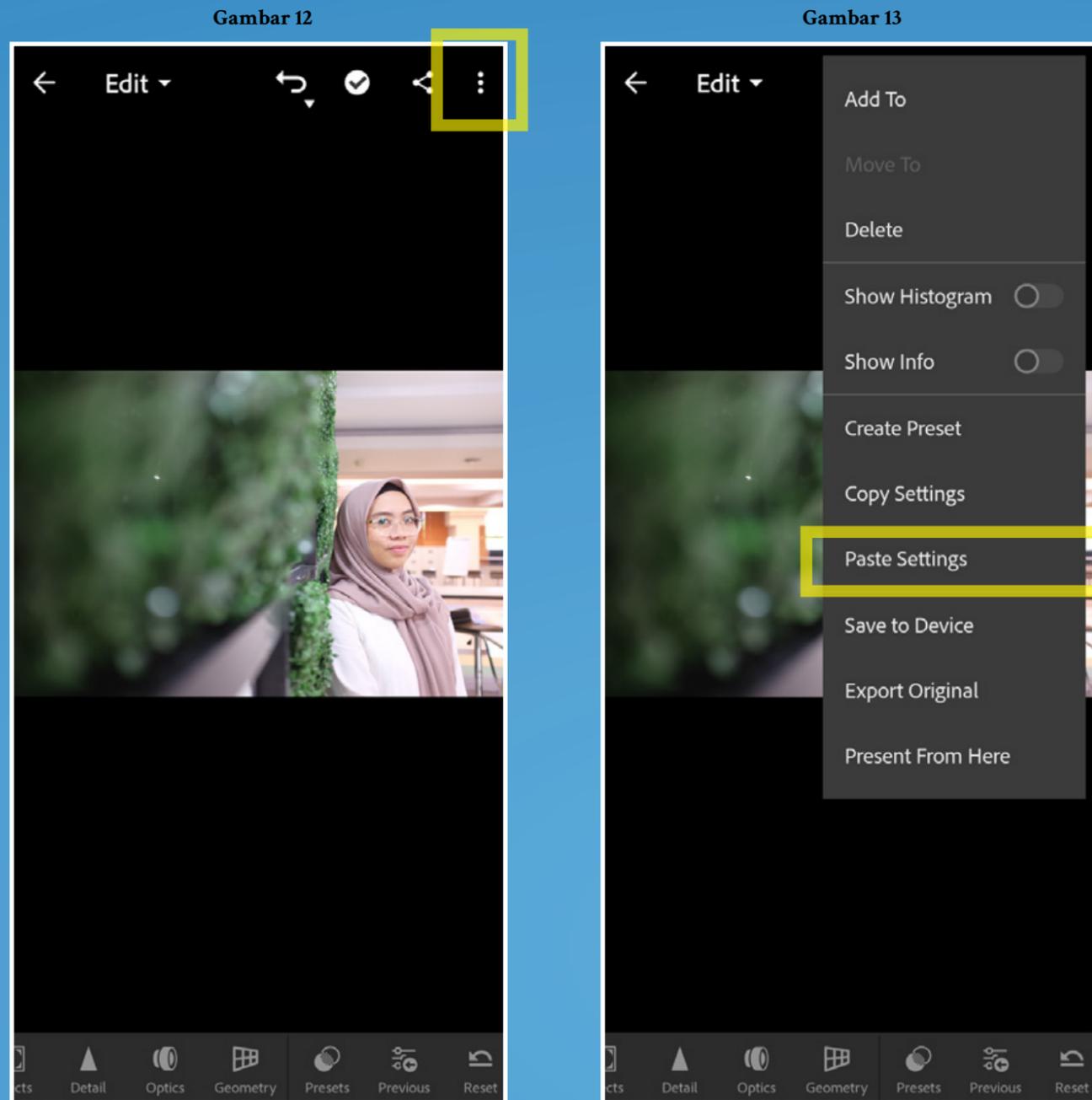
Gambar 10



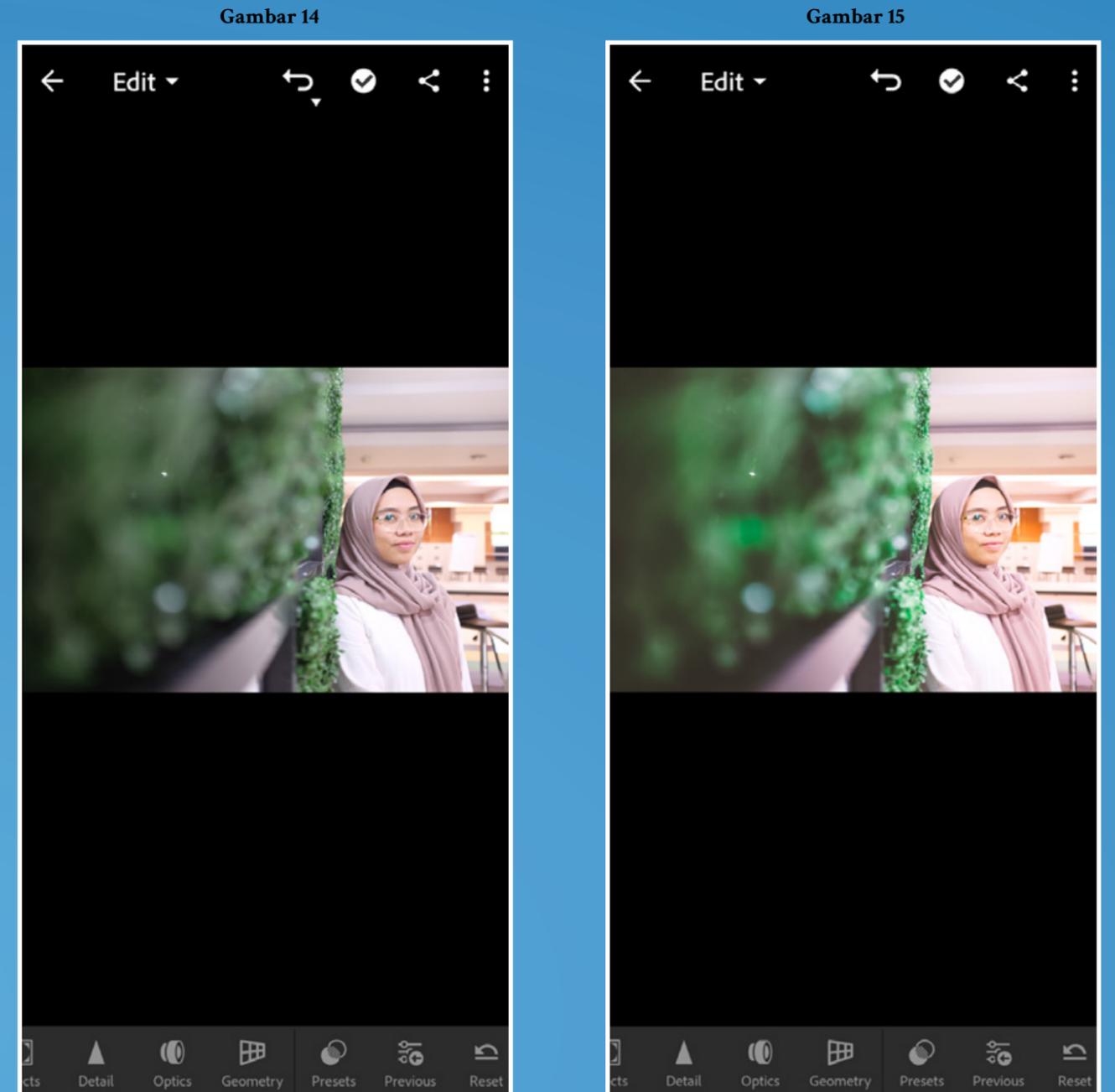
Gambar 11



9. Kemudian kita dapat memilih gambar mana yang akan kita edit. Tap lagi pada 3 titik yang ada di pojok kanan atas (**Gambar 12**). Tap paste setting (**Gambar 13**). Voila, maka *preset* akan masuk ke gambar baru kita.



10. Tap dan tahan pada gambar untuk melihat perbedaan sebelum (**Gambar 14**) dan sesudah kita tambahkan *preset* (**Gambar 15**).



11. Lakukan kembali cara yang sama apabila kurang puas dengan hasil *preset* yang kita pilih atau hanya ingin mencoba *preset* lainnya. Dan jika masih kurang puas, berikan 'sentuhan' tambahan sesuai selera kita pada foto kita.

12. Apabila sudah puas dengan hasilnya, lakukan *export* jika telah selesai. Maka foto pun siap untuk di-*share*.

Demikian tutorial untuk menambahkan *preset* dan menggunakannya pada Lightroom versi *mobile*. Semoga bermanfaat!

ANDI NUR SYAMSUDIN

# BIKER BERKAH

## the series

Menampar diri, melihat jalanan tak pernah sepi, memendarkan gejolak hati



ILUSTRASI :  
THALIA MAUDINA

### SETITIK HALILINTAR

Kalau benda ini sudah terendam air, maka jangan harap motor bisa di-*starter*. Ia perlu dikeringkan dulu, baru bisa difungsikan lagi. Kadang ia ditiup-tiup agar tidak kotor, dilap biar tidak basah, hingga benar-benar bersih untuk bisa digunakan lagi. Ia bernama bougie, bahasa serapannya; busi.

Fisik busi mirip pedang. Gagangnya besi berulir yang menyambung ke kompresan piston, ujungnya yang runcing berbahan isolator ditancapkan ke kabel starter. Cara kerjanya sederhana; koil pengapian starter bertegangan ribuan volt dialirkan ke ujung runcing busi. Struktur gas antara ujung dan pangkal busi pun berubah. Gas mendadak menjadi konduktor yang mengalirkan arus elektron. Imbasnya, suhu percikan 'gagang busi' mencapai 60 ribu derajat Kelvin. Gas yang terionisasi merespons kompresan bensin yang meledak-ledak berbunyi, "Rrrrrggg..." Motor pun sukses hidup. Itulah kenapa busi ibarat miniatur petir. Dengan wujud setitik begitu, mampu menggelegarkan halilintar demi hidupnya mesin.

Dalam ranah nyata manusia, busi ibarat pantikan motivasi tuk hidup kembali dari tidur malam. Ia mirip jam beker kita. Atau bisa jadi, ia adalah pembangun harian kita; pasangan, orangtua, entah siapapun yang rela memercikkan air demi bangun pagi kita. Em... Bahkan bila sebelum tidur kita sudah bertekad sekeras halilintar untuk bangun jam sekian, bisa jadi tekad itulah yang membangkitkan bangun pagi kita.

Di panorama lain, kita berharap busi tak ubahnya setitik motivasi manusia dari jatuhnya mental diri. Karena ia adalah keniscayaan. Tinggal bagaimana manusia belajar darinya. Ia hancurkan lobus paling vital hidup motivasi manusia, yakni businya. Jika busi manusia tak segera ditangani dengan benar, bisa jadi mental manusia tak bisa hidup lagi. Singkat kata; trauma fatal.

Kalau mental sudah jatuh, pikiran sudah membentuk *mental block* -ah, pasti tidak bisa nih-, maka percobaan pertama

adalah starter tekan. Bisakah ia? Jika tak bisa, lakukan lebih kreatif, aktifkan *couke* yang biasa ada di bawah stang kiri. Ubah posisinya ke kiri. Belum bisa? Maka, pakai cara yang lebih agresif; starter kaki. Jika belum bisa lagi, standar berdirikan motor dan starter kaki lebih kencang.

Beginilah! Untuk memberangus *mental block*, trauma fatal, butuh kreativitas dan agresivitas berlebih. Lalu, kalau masalahnya ada di busi yang sudah hangus karena saking besarnya trauma daripada tegangan ribuan voltnya busi, maka selayaknya busi kita diganti. Gantilah pemantik motivasi kita!

Boleh jadi pemantik halilintar kita dulu adalah orangtua. Membahagiakan, membuat bangga, memenuhi harapan mereka. Namun, jika hal itu sudah kurang berefek, simpan ia -jangan dibuang. Ganti ia dengan motivasi lain. Istri dan anak-anak kita barangkali? Yang lebih efektif menyemangati kita. Sepulang kerja, hanya dengan melihat senyum anak, capek saja bisa langsung pupus. Penat bisa lepas seketika. Cinta bisa otomatis bersemi secepat halilintar.

Lalu, jika kita masih belum bisa juga bangun dari lunglai, hm... apa lagi ya, titik halilintar motivasi kita?

Biasanya hal-hal gaib yang tak terlihat, justru menjadi motivasi terbesar. Juga motivasi yang jarang padam. Pahala, dosa, surga, neraka, juga Tuhan, pemilik segala nikmat bersumber, penjanji bahagia dunia-akhirat. Bahkan itu semua menjadi kontributor atas pembuat bahagia para pemantik motivasi yang lain; orangtua, istri, juga anak-anak kita. Biasanya kalau sudah dekat sama Tuhan, kedekatan dengan motivasi-motivasi kita yang lain akan semakin erat. Cinta ke Tuhan, menciptakan sekaligus menyalurkan cinta-cinta ke motivasi kita yang lain. Cinta dari setitik, menyebar secepat halilintar.

### PARA PENAKLUK KLAKSON

Klakson tampil berwujudkan saklar *push-on* yang terpinggirkan di bawah

stang kiri, diaktivasi dengan intensitas bervariasi, bergantung pada level kebutuhan dan kesabaran pengendara. Klakson sebetulnya sudah jelas fungsinya. Mengingatkan siapapun yang menghalangi jalan, supaya jalan si pengendara tak terhalang. Nah masalahnya, ada banyak lipatan rasa di balik sosok pengendara dan banyak varian karakter yang merespons klakson yang dilontarkan. So, kita kategorikan para penakluk klakson berikut ini:

Ada pengendara yang saking bangganya memijit klakson bisa sampai lima detik sekali. Pokoknya, kalau ada penghalang di depan, entah mobil, truk, tronton, motor, kucing, bahkan batu atau tiang listrik, klakson sudah pasti dipekkikan. Ia seolah tak pertimbangkan bagaimana perasaan yang diklakson. Padahal yang diklakson bisa jadi dari berbagai kalangan, mulai dari yang tidak bergerak, yang tak tahu malu, hingga yang berperasaan sensitif, yang siap membalas dengan wajah sinis. Sosok ini tak mudah memedulikan orang yang ia lewati. Hm... Hati-hati kalau kita masuk di kategori penakluk yang satu ini.

Ada juga pengendara yang memencet klaksonnya hanya kalau pas emosi saja. Di sini, klakson erat dengan ego pribadi. Kalau posisi nyaman berkendaranya digunting motor lain, misalnya, ia langsung melampiaskan emosinya ke klakson. "Diiiiin din din diiin." Ck ck ck... Yang kasihan klaksonnya, bukan si tersangka. Si tersangka sih makin menjauh, tetapi klaksonnya terus saja digedor-gedor. Nah, untuk kategori penakluk yang satu ini, tempo lamanya klakson ditekan bisa jadi patokan seberapa kuat buncah emosinya.

Yang ketiga adalah pengklakson yang anti-klakson. Maksudnya genggam tangan kirinya jarang mencengkeram erat, hanya setia dan lembut pada stang, tanpa jempol kiri yang nangkring bersiaga di tombol merah. Hal ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi ia introvert, seorang pendiam yang tak punya reaksi aktif pada agresivitas pengendara lain. Bisa jadi ia enggan mendidihkan hati pribadi lain, seorang ramah yang enggan membuat

masalah. Bisa jadi ia pribadi yang rendah hati, enggan cari muka, tak ingin semua pandangan orang tertuju kepadanya. Bisa jadi pula, ia pribadi yang sensitif terhadap auditori, bukan pembuat berisik, agar kelemahgemulaian ibu-ibu yang sedang berkendara tak terganggu secara spontan (alias kaget), atau agar kekhushyukan siswa sekolah yang sedang belajar di dekat TKP tetap terjaga. Namun, apakah tindakan si penakluk klakson yang ketiga ini sudah benar?

Ternyata ada yang perlu diluruskan. Mengklakson sepanjang menit kurang baik, anti terhadap klakson juga tidak baik. Karena klakson diciptakan memang bukan untuk menyakiti hati perasaan yang diklakson. Ia juga diciptakan bukan untuk dihindari atau disembunyikan. Maka, kita lebih pas menjadi penakluk yang keempat. Bukan hanya menaklukkan hati, tetapi juga menaklukkan klakson itu sendiri demi kebutuhan diri, yaitu keamanan selama perjalanan.

Penakluk klakson yang satu ini berani mengklakson ketika pengendara motor di depannya dengan santainya berjalan sambil memonitor *chat* Whatsapp di HP-nya, sebuah aktivitas yang membahayakan. Maka, wajar kalau diklakson. Penakluk klakson ini juga berinisiatif mengingatkan angkot yang berhenti sembarangan di tengah jalan, berani mengingatkan ibu-ibu yang mau dijambret dari belakang, berkenan mengingatkan bapak-bapak yang ngebut padahal standar motornya masih belum dilipat, bersegera mengingatkan truk untuk berhenti mundur agar tidak menabrak dirinya, bahkan rela mengingatkan pengebut untuk mengurangi kecepatan karena ada orang mau menyeberang. Hm... Banyak sekali kasus di mana keselamatan pengguna jalan bergantung pada klakson ini.

Penakluk klakson ibarat penakluk pedang. Ia gunakan pedang bukan untuk menyayat hati dan perasaan, tetapi ia optimalkan untuk mengiris bawang dan memotong kentang, agar racikan perjalanan kita lezat dan nyaman sampai tujuan. Mari menjadi penakluk klakson nan bijak.

LUQMAN HAKIM

# TETAP TENANG NAMUN WASPADA, VIRUS CORONA MENGINTAI KITA

Memulai awal tahun 2020, dunia internasional dihebohkan dengan pemberitaan mewabahnya virus Corona (Covid-19) yang berasal dari dataran Tiongkok. Virus berbahaya ini menyedot perhatian publik karena daya penularannya. Saking masifnya penularan virus ini, tidak membutuhkan waktu lama bagi virus ini untuk meluas ke berbagai negara. Ribuan masyarakat di Cina telah jatuh menjadi korban keganasan virus ini. Bahkan beberapa negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, hingga kawasan Asia Tenggara, telah melaporkan sejumlah kasus penderita terjangkit virus Corona. Tak sedikit korban jiwa yang sampai meregang nyawa. Sebenarnya, apa itu virus Corona dan seberapa besar bahayanya hingga begitu banyak menelan korban jiwa?

## VIRUS CORONA, PENGINFEKSI SISTEM PERNAPASAN

Dilansir dari situs resmi WHO, virus Corona merupakan keluarga besar virus yang menginfeksi sistem pernapasan tubuh sehingga menyebabkan penyakit flu biasa maupun penyakit yang lebih parah seperti *pneumonia* (radang paru-paru), MERS, dan SARS. Virus ini berbentuk seperti mahkota yang ditandai protein S berupa sepatu yang tersebar di sekeliling permukaannya. Kata "Corona" sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya *crown* atau mahkota. Mengutip situs resmi LIPI, virus Corona pertama kali diisolasi pada tahun 1965, dari cairan hidung seorang anak yang menampilkan gejala pilek (*common cold*), yang biasanya disebabkan oleh infeksi Rhinovirus atau virus Influenza.

Virus Coronal dikenal juga sebagai Wuhan Coronavirus, karena jenis virus Corona tipe baru ini berasal dari sebuah pasar ikan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada awal Februari 2020, WHO menetapkan nama resmi Wuhan Coronavirus ini sebagai Covid-19. "Covi" merupakan singkatan dari Coronavirus, "D" adalah *disease* atau penyakit, sedangkan angka 19 merujuk pada tahun 2019, waktu virus ini pertama kali teridentifikasi pada akhir Desember 2019.

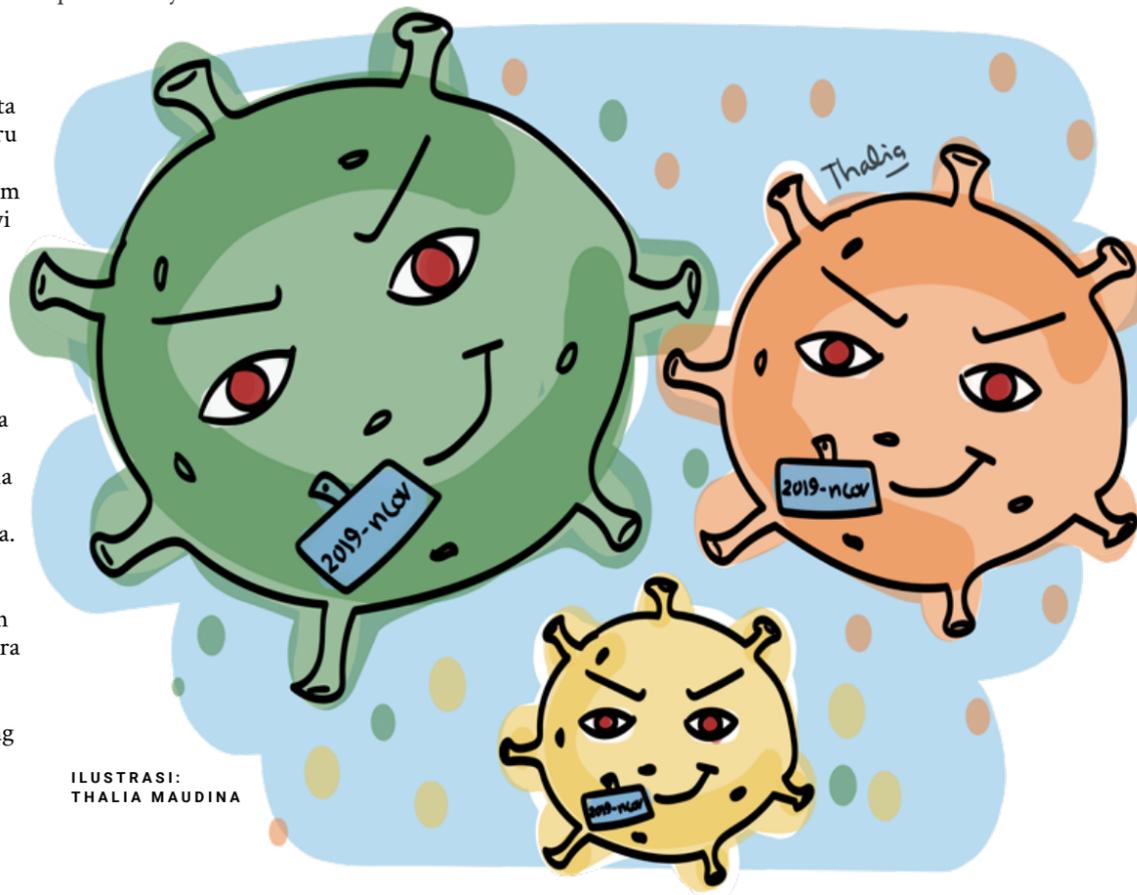
Awalnya, virus Corona ini menginfeksi banyak spesies hewan seperti unta dan kelelawar. Namun, terkadang virus Corona yang menginfeksi hewan dapat berevolusi dan menyerang manusia seperti yang terjadi pertama kali di kota Wuhan, Cina. Bahkan, diketahui pula virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak jarak dekat maupun terkena percikan batuk penderita virus Corona. Sejumlah penelitian terbaru mengungkapkan virus ini lebih rentan menyerang tubuh yang mempunyai sistem kekebalan imun yang rendah, seperti bayi dan orang lanjut usia.

## GEJALA PENDERITA TERKENA VIRUS CORONA MIRIP DENGAN FLU BIASA?

Secara umum, penderita yang terjangkit virus Corona akan mengalami setidaknya tiga hal utama: demam, batuk, dan sesak napas. Hal ini terjadi karena virus Corona menyerang sistem pernapasan tubuh seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sekilas, tidak ada perbedaan gejala yang ditimbulkan antara infeksi virus Corona dengan virus flu biasa (Rhinovirus). Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami ketiga gejala tersebut di atas. Terlebih gejala tersebut telah berlangsung

cukup lama dan tidak kunjung sembuh setelah mengonsumsi obat-obatan flu generik.

Sejumlah besar masyarakat yang terinfeksi virus ini mengalami gejala *pneumonia* ringan, namun ada juga yang menunjukkan *pneumonia* yang lebih parah. Biasanya penderita mengeluhkan suhu tubuh yang tinggi disertai batuk kering dan napas pendek atau kesulitan bernafas. Pada tingkat yang lebih lanjut, penderita akan mengalami *pneumonia* yang dapat menggelembungkan paru-paru. Saat dirontgen, paru-paru tersebut akan terlihat berisi cairan. Dalam keadaan yang sudah sangat parah, *pneumonia* ini dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya.



ILUSTRASI:  
THALIA MAUDINA

## BELUM ADA VAKSIN PENCEGAH VIRUS CORONA

Hingga saat ini, para ilmuwan belum menemukan vaksin yang dapat melawan serangan virus Covid-19 yang masih tergolong virus Corona berjenis baru. Adapun pengobatan yang telah dilakukan hanya sebatas penanganan medis sedini mungkin sebelum kondisi penderita bertambah parah. Petugas medis memberikan obat-obatan khusus flu dan demam kepada penderita, menjaga asupan cairan tubuh penderita, dan memastikan penderita dapat istirahat dengan cukup. Mengingat bahaya dari penyakit yang sangat menular ini, penderita virus Corona bahkan harus menempati ruang isolasi khusus untuk menghindari penyebaran virus yang lebih luas.

Belum adanya vaksin atas virus Corona menyebabkan cara pencegahan yang terbaik adalah menghindari faktor-faktor yang menyebabkan infeksi. Yang paling utama, masyarakat tidak bepergian ke Cina atau negara lain yang telah ditemukan adanya penularan virus Corona. Selain itu, gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum. Setelah beraktivitas di luar

ruangan, biasakan untuk rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *hand sanitizer* yang mengandung alkohol. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari juga kontak dengan hewan terutama hewan liar.

## VIRUS CORONA BERDAMPAK LUAS PADA KEHIDUPAN MANUSIA

Mewabahnya virus Corona ini memberikan dampak yang begitu besar dalam kehidupan manusia, tak hanya di bidang kesehatan. Di Cina, pemerintah memutuskan untuk menutup sementara jalur transportasi menuju kota Wuhan. Penduduk kota Wuhan yang masih sehat pun tidak dapat beraktivitas seperti biasanya di luar rumah, menjadikan kota tersebut bak kota mati. Sebagian besar kantor dan pertokoan memilih tutup tirai. Di bidang olahraga, virus Corona telah membuat seluruh partai kompetisi lokal sepak bola dan AFC Cup 2020 Zona Asia Timur terpaksa ditunda.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia, turut merespons kemunculan virus Corona dengan membatasi seluruh penerbangannya ke Cina. Pengamanan bandara pun semakin diperketat. Hampir sebagian besar otoritas bandara memasang alat pendeteksi suhu tubuh (*thermal scanner*) untuk penumpang yang baru tiba dari luar negeri. Bagi penumpang yang menunjukkan gejala demam dan suhu tubuh yang tinggi, akan diperiksa lebih lanjut di sebuah ruang isolasi. Hal ini dilakukan untuk mengerem penyebaran virus mematikan tersebut.

Dampak virus Corona juga terasa di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia memulangkan 238 WNI dari Wuhan, Cina. Mereka ditempatkan sementara di Hanggar Pangkalan Udara Raden Sadjad, Natuna, Kepulauan Riau untuk observasi. Meski sempat mendapat penolakan dari masyarakat setempat, hasil observasi seluruh WNI yang dikarantina tersebut dinyatakan negatif dari virus Corona.

Harga masker N95 turut melambung tinggi menyusul langkanya masker tersebut di pasaran. Hal ini disebabkan banyak oknum yang menimbun masker

tersebut sehingga menjadi langka. Kekhawatiran masyarakat akan virus Corona telah membuat mereka berburu masker N95. Bahkan di salah satu forum jual beli *online*, harga masker N95 mencapai jutaan rupiah. Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah memberi peringatan pada para oknum yang menimbun masker N95 akan dijera sanksi. Selain itu, pemerintah juga menegaskan masyarakat tidak perlu takut secara berlebihan. Pemerintah meminta agar masyarakat tetap tenang, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, dan waspada terhadap ancaman virus Corona yang sedang mengintai Indonesia.

Jadi, tak perlu ikut-ikutan memborong masker N95, *kan?*

\*Dikutip dari berbagai sumber

Sekilas, tidak ada perbedaan gejala yang ditimbulkan antara infeksi virus Corona dengan virus flu biasa (Rhinovirus). Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala flu.



JOGGING TRACK LAPANGAN GASIBU  
FOTO: ALIS IDEKUSUMA

ALIS IDEKUSUMA  
PELAKSANA BDK CIMAH

# LAPANGAN GASIBU BANDUNG

## Tak Sekedar Lapangan Atletik, Tapi Juga Menarik

**B**agi masyarakat Bandung atau yang pernah tinggal di Bandung pasti sudah tidak asing dengan Lapangan Gasibu. Lapangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat ini adalah sebuah tempat yang cocok untuk berkumpul dan melakukan kegiatan menarik seperti berolahraga, menyalurkan hobi fotografi, juga *nongkrong* dan ngobrol bersama teman. Ruang publik ini pun terletak di lokasi yang strategis, berada di pusat kota, berdekatan dengan salah satu ikon kota Bandung yaitu Gedung Sate. Lapangan yang memiliki luas sekitar enam ribu meter persegi ini kerap digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan atletik karena tersedianya *jogging track* dan lahan terbuka yang cukup lega.

Berbagai opini menyebutkan bermacam-macam asal nama Gasibu tersebut. Ada yang berpendapat Gasibu berasal dari kata “Gazebo” yang merupakan gabungan dari bahasa Inggris *gaze* yang artinya melihat, dan bahasa Latin *ebo* yang artinya ke luar. Ada juga yang berpendapat bahwa Gasibu merupakan akronim dari “Gabungan Sepakbola Indonesia Bandung Utara”.

Terlepas dari banyaknya opini terkait asal usul nama Gasibu, pada intinya lapangan ini memiliki fungsi sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dan sarana umum yang cukup dikenal sejak waktu yang lama. Saat ini, lapangan Gasibu menjadi tempat yang banyak orang berkumpul untuk berolahraga sambil menikmati hangatnya sinar matahari, sejuknya pepohonan yang rindang, serta nikmatnya hawa Kota Bandung yang bersahabat. Lapangan ini cocok untuk menjadi tempat melepas penat di antara hiruk-pikuk kota Bandung.

Pada 2016 lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan sejumlah pemugaran terhadap Lapangan Gasibu yang semakin membuat lokasi ini cantik dan menarik. Lapangan yang semula beradukan tanah, pasir, dan rumput ini pun bertransformasi menjadi sebuah lapangan atletik dengan *jogging track* beraspal dan bercat biru sepanjang 500 meter. Dibangunnya sebuah perpustakaan dengan arsitektur futuristik menambah daya pikat lapangan yang dijuluki Lapangan Wilhelmina

(nama salah satu Ratu Belanda) pada zaman penjajahan Belanda tersebut.

Tak hanya edukasi melalui perpustakaan, menyusuri Lapangan Gasibu kita seolah diajak berolahraga sembari memahami sejarah kota Bandung melalui Wall of Fame berisi gambar-gambar profil Gubernur Jawa Barat mulai dari periode pertama hingga saat ini. Tak heran, lapangan ini selalu dipadati pengunjung baik pagi maupun sore hari. Mulai dari yang berolahraga hingga yang sekadar memuaskan hobi fotografinya dengan menjepret sana sini.

Lapangan ini juga memiliki sejumlah fasilitas umum yang terbilang lengkap, seperti toilet, internet, tempat duduk, dan mushola. Dari lapangan ini pun kita disugahi pemandangan langsung kokohnya bangunan Gedung Sate, serta riuh rendahnya lalu lalang kendaraan yang melintas Jalan Diponegoro. Masih di dalam area Lapangan Gasibu, dekat dengan jalan Surapati terlihat sebuah perpustakaan umum yang cukup menarik perhatian.

Perpustakaan tersebut bisa menjadi alternatif bagi para orangtua yang mengajak anaknya ke Lapangan Gasibu untuk mengenalkan kebiasaan membaca buku. Kenyamanan ruangnya agaknya turut mendukung minat untuk membaca dan berlama-lama di sini. Terdapat lebih dari 1.000 buah buku yang tersusun dalam lima rak. Jenis buku yang tersedia ada tiga kategori yaitu buku anak, buku umum, dan ensiklopedia. Jam operasional perpustakaan ini yaitu mulai dari Senin-Sabtu pukul 08.00-16.00 WIB dan di hari Minggu pukul 06.00-12.00 WIB.

Membaca memang dapat menambah ilmu dan wawasan, namun selain itu ada kegiatan lainnya yang seru dan menyenangkan juga untuk dilakukan. Kalau untuk anak-anak, tersedia papan permainan yang bisa dipakai dengan seizin petugas perpustakaan. Jika mulai jenuh, masih ada kegiatan lain dengan menikmati *free WiFi*. Hanya dengan mengisi nama, nomor telepon, dan alamat e-mail kita sudah dapat menikmati akses internet gratis selama 60 menit ke depan.

Setelah puas beraktivitas atau sekadar melepas penat di lapangan ini, saatnya

para pengunjung memanjakan perut dan lidahnya. Melangkahkkan kaki sejenak ke luar Lapangan Gasibu, kita bisa mencicipi beragam menu kuliner yang nikmat. Salah satunya yaitu Sate Jando Gasibu. Lokasinya dekat dari Lapangan Gasibu yaitu sekitar 600 meter menuju Jalan Hayam Wuruk, tepatnya berada di belakang Gedung Sate. Cukup dengan Rp25.000 per porsi kita bisa menikmati sate dan lontong yang disiram dengan kuah sambal dan saus kacang. Sate yang terdiri atas daging dan lemak sapi serta ayam ini pun cukup mengenyangkan setelah beraktivitas di Lapangan Gasibu. Jika Anda datang pada saat jam makan siang, siap-siap untuk sedikit menunggu karena antrean yang cukup panjang pada saat jam tersebut.



MONUMEN PAHLAWAN GASIBU  
FOTO: ALIS IDEKUSUMA

Apabila sekadar ingin mengudap, Kota Bandung yang terkenal dengan jajanannya ini pun sudah menyediakan berbagai penjaja yang dapat ditemui sepanjang jalan sekitar lapangan Gasibu hingga menuju Jalan Hayam Wuruk atau belakang Gedung Sate. Jajanan yang dapat Anda temui seperti cuanki, rujak, dan mie baso. Tak luput pelepas dahaga juga tersedia di sepanjang jalan tersebut seperti es goyobod dan es cendol. Hmm.. mendengar namanya saja sudah membuat Anda membayangkan atau bahkan menelan ludah bukan?



PERPUSTAKAAN GASIBU  
FOTO: ALIS IDEKUSUMA

Itulah sederet suguhan menarik yang dimiliki Kota Bandung khususnya Lapangan Gasibu. Lokasi ini terletak sekitar 16 kilometer atau 40 menit berkendara dari Balai Diklat Keuangan Cimahi melalui jalur bebas hambatan. Banyak kegiatan menarik yang dapat Anda lakukan dan dapatkan di sana. Tidak hanya melakukan aktivitas fisik yang berat, aktivitas yang ringan dan santai pun juga didukung di lapangan Gasibu. *Keep calm and relax.*

\*\*\*



SATE JANDO GASIBU  
FOTO: ALIS IDEKUSUMA



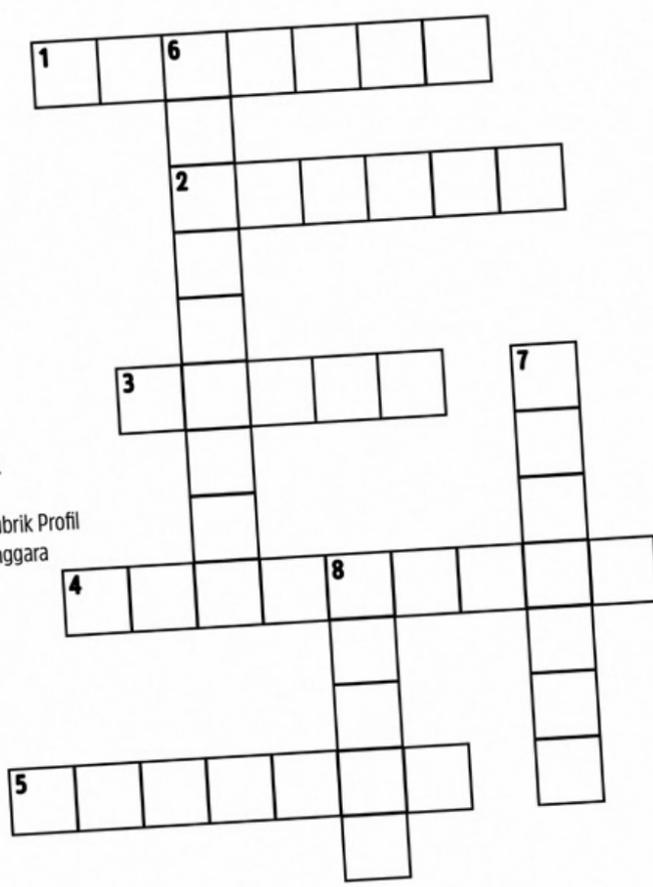
**PEMENANG TEKA-TEKI EDUKASI EDISI 55**  
**Diana Laurencia**  
[@laurenciadiana](#)

**MENDATAR**

- Nama awardee beasiswa Kemenkeu pada Cerita Alumni edisi ini.
- Lapangan di Bandung yang di-highlight pada rubrik Galeri
- Nama panggilan Nufransa Wira Sakti, tokoh yang diangkat di rubrik Profil
- Nama belakang Kabid Penyelenggaraan Pusdiklat KU, penyelenggara Pelatihan Big Data
- Salah satu lokasi wisata di sekitar kota Malang

**MENURUN**

- Aplikasi keluarga Adobe yang dibahas di rubrik Tips & Trik
- Nama pelatihan yang menjadi tema utama edisi 56
- Kota di Tiongkok dimana virus Corona mulai menyebar





**Cara Berpartisipasi**

- Follow akun Instagram/Twitter/Facebook BPPK (@bppkkemenkeu);
- Jawaban lengkap dikirim ke alamat: edukasikeuangan@kemenkeu.go.id;
- Anda hanya boleh mengirim via email ke alamat tersebut dan tidak diperkenankan melakukan koreksi;
- Cantumkan nama, no. HP, akun Instagram, dan alamat lengkap Anda di badan email dengan subjek: Teka-Teki Edukasi 56;
- Pengumuman pemenang akan disampaikan di majalah Edukasi Keuangan Edisi 57 dan akun Instagram BPPK;
- Pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari tim redaksi.

PF SUSANTI  
MAHASISWA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT  
DRIYARKATA

# NUSA JAWA silang budaya

PENULIS : DENYS LOMBARD  
PENERBIT : GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA  
TAHUN TERBIT : 1996 - 2005 (CET. PERTAMA)  
VERSI CETAK : 2018  
TEBAL BUKU : BUKU I (309 HALAMAN)  
BUKU II (498 HALAMAN)  
BUKU III (346 HALAMAN)

Banyak peneliti dari luar yang tertarik dengan sejarah panjang bangsa dan negara Indonesia, salah satunya ialah Denys Lombard, seorang peneliti berkewarganegaraan Prancis yang ahli dalam bidang studi sosial dan budaya masyarakat Asia. Nusa Jawa adalah trilogi dari kumpulan hasil risetnya tentang Indonesia yang terbit sejak tahun 1996 dan per tahun 2008 diterbitkan ulang sebagai cetakan kelima. Buku ini memang bukan buku terbitan baru, namun khasanah sejarah kritis yang Denys Lombard tawarkan masih sangat menggiurkan untuk diresapi ulang. Barangkali banyak di antara kita yang telah membaca atau sekadar pernah menemukan buku ini di suatu sudut rak buku. Bisa jadi di antara kita pernah menyimak isinya. Maka bagi yang beruntung di antara kita, resensi ini semacam pembacaan ulang sudut pandang Denys Lombard dalam mendedah Nusantara.

Pada buku Nusa Jawa 1, *Nusa Jawa Silang Budaya; Perihal Batas-batas Pembaratan*, Lombard menunjukkan mengapa Jawa dianggap mewakili Nusantara dalam banyak hal. Nusantara yang dikenal sekarang adalah bekas bagian daripada Indocina yang luas, yang kelak dikemudian hari mulai menyadari kesamaan regionalnya dengan sebutan negara-negara Asia Tenggara, digambarkan sebagai satu teritori yang sangat menggiurkan komoditi rempah-rempahnya, sehingga menarik para pelancong datang dan berdagang. Kedatangan, perdagangan, dan disusul dengan kependudukan berbagai bangsa luar seperti India, China, Spanyol, Portugal, Belanda, Inggris, dan Jepang, membawa banyak perubahan pola hidup dan konsep hidup. Jawa Mayor yang disebut oleh Marco Polo merujuk pada pulau Jawa. Yang membedakannya

dengan Jawa Minor yakni Sumatra. Lombard berusaha bersikap kritis dan mendekonstruksi sejarah Indonesia dari sudut pandang lain di luar kelaziman, yakni menjelaskan sejarah panjang Nusantara dari periodisasi baru ke periodisasi kuno.

Fokus pada jilid pertama, Lombard melacak dampak pembaratan atau biasa disebut dengan oksidentalasi di berbagai bidang sosio-ekonomi pada masyarakat Jawa. Penggunaan besi-besi pada bidang pertukangan, alat transportasi, terutama kereta api di Jawa membawa dampak besar pada perikehidupan masyarakat Jawa. Lantas penggunaan sistem kalender, mulai masuknya tulisan latin, dan munculnya pers, hingga perubahan besar di bidang modern serta penggunaan bahasa asing. Sesungguhnya belumlah berarti mentalitas pembaratan telah merasuk dalam masyarakat jawa sepenuhnya.

Kita bisa melihat dari bukunya jilid pertama di bab terakhir, Lombard menyajikan evaluasi tentang batas-batas oksidentalasi yang terjadi pada masyarakat Jawa. Lombard membuka selubung alam pikir sekaligus stereotype “orang barat” atau “londo” di mata orang-orang Jawa. Masyarakat Jawa yang halus dan sangat mengedepankan sopan santun serta kehalusan perasaan, cenderung melihat *walondo* atau *londo* sebagai orang barbar. Mereka dianggap menyerupai sifat dan sikap punokawan yang penuh kejutan. Cara berpakaian, cara berbicara yang blak-blakan, tutur kata dianggap kasar, terlebih mereka tak mengenal hierarki bahasa jawa yang halus dan penuh tata krama. Dari banyak teks-teks sastra menunjukkan bagaimana masyarakat lokal memandang Barat membawa pengaruh buruk, orang-orangnya barbar tak tahu etika. Meskipun dikenal panjang akal dan pintar namun tidak mudah menyesuaikan diri dan arogan. Di sisi lain Lombard menuliskan secara gamblang perbedaan nyata orang Barat dibandingkan pendatang dari India dan China. Mereka (orang barat atau kulit putih) tetap dianggap “aneh” dan “asing” di bumi tempat berbagai kebudayaan lain pada umumnya melebur. Kebudayaan India dan Islam telah merasuk dalam inti kebudayaan-kebudayaan Nusantara, sedangkan kebudayaan Barat masih dirasakan sebagai hasil impor yang perlu diperdebatkan – yang bahkan bisa kita lacak sisa-sisanya dalam polemik kebudayaan antara Sutan Takdir dan Sanusi Pane yang termasyur itu.

Sangat menarik membaca secara utuh buku Nusa Jawa jilid pertama ini, semakin menarik Lombard memaparkan juga di dalamnya fakta akulturasi yang terjadi selang berabad-abad bukan hanya antara budaya para pendatang, tapi juga perkawinan silang antar-para pendatang yang mempengaruhi kondisi sosial

politik masyarakat di masa itu. Terbitnya undang-undang tahun 1892 yang berdasarkan *jus sanguinis* yang memudahkan siapa saja mendapatkan status kewarganegaraan Belanda kepada mereka yang hidup “secara Belanda” (meskipun mereka belum tentu pernah atau akan melihat sendiri Negeri Belanda), membuat pengaruh Barat semakin mudah masuk dalam etika dan pola hidup masyarakat lokal saat itu. Pada abad ke-20 banyak terjadi perkawinan antara penduduk lokal dengan orang Belanda, melengkapi sudah makin banyaknya anak-anak campuran atau biasa disebut warga indo. Di belahan Indonesia timur telah banyak kelompok *Toepassen* dan *Mardijkers* – warisan daripada kosmopolitanisme bangsa Portugis sejak abad ke-17. Mereka adalah warga dari perkawinan silang antara warga lokal dan “penjajah” yang sangat kebarat-baratan. Sebagian dari mereka mengaku dan menonjolkan identitas, sebagian dari mereka melebur bersama penduduk asli. Tentu membaca buku Lombard ini membuka luas cakrawala kita, betapa paradoksnya sisa-sisa kolonialisme. Hingga pasca kemerdekaan NKRI pun, masih ada tersisa kebencian sekaligus kekaguman pada Barat. Keinginan untuk menghancurkan semua sisa-sisa bangunan kolonialisme terbentur pula sikap pragmatisme untuk menggunakan bangunan itu sebagai cagar budaya atau dipergunakan secara fungsional.

Bagaimanapun latar belakang Lombard sebagai sejarawan bermahzab Annales membuatnya meyakini bahwasannya sejarah merupakan akibat yang berlangsung perlahan dan tidak segera terasakan dari pengaruh ruang, waktu, dan iklim, serta teknologi manusia pada masa lampau. Jika kita menelisik betul tulisan atau pernyataan-pernyataan Lombard dalam trilogi Nusa Jawa, kita bisa menyimak pada jilid kedua berjudul *Nusa Jawa Silang Budaya; Jaringan Asia*, hubungan peradaban Islam dan Cina sepanjang sejarah. Ada tiga anasir utama; yakni Jawa-Indonesia, Islam, dan Cina yang merupakan kosmopolitanisme homogen yang tercipta melalui proses saling meresapi satu sama lain. Konon dari Cina lah masyarakat Indonesia belajar berbagai komoditi seperti gula, padi, arak, dan tambak garam.

Lombard memberikan tesis yang lain daripada yang lain soal modernitas masyarakat Indonesia. Lombard baik secara implisit maupun eksplisit mengutarakan bahwa masyarakat Nusantara pada umumnya, dan secara khusus dilihat dari masyarakat Jawa, tidak mengalami goncangan kebudayaan sekeras yang diduga. Sebab hampir bersamaan dengan masuknya kolonialisasi Belanda, Islam masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistematisa berpikir Lombard tampak lebih rapi dalam Nusa

Jawa Jilid ke-2. Menurut Lombard, stimulus Islam dan Cina kurang diakui perannya oleh Barat, padahal sebelum orang Barat muncul di Kawasan Asia, masyarakat Asia sendiri telah menimbulkan konsep kunci individu, persanaan antarmanusia, dan konsep waktu linier, di samping itu sudah mengenal benih-benih suatu ekonomi moneter.

Di buku Nusa Jawa jilid ke-2 ini Lombard ingin mendekonstruksi bagaimana hubungan yang terjadi antara masyarakat lokal yang sebelumnya beragama Hindu atau bahkan penganut animisme dinamisme dengan pengaruh islamisasi dan pengaruh para pelancong dari Cina. Persaingan sekaligus upaya saling belajar satu sama lain menimbulkan akulturasi yang bisa dibalang harmoni pun sekaligus bergejolak pada sesekali waktu. Menukil sedikit dari bab 4 dalam buku ini, Lombard menjelaskan fakta sejarah bagaimana para pendatang dari Cina bertahan dengan kulturnya yang sangat prinsipil sekaligus mampu beradaptasi dengan kultur Nusantara. Warisan Cina di Indonesia nampak pada bentuk unik klenteng-klenteng kuno di Jawa, pun terlihat juga pada motif warna-warni pada kain batik di pesisir utara. Islam berhutang pula pada inspirasi baju koko atau baju muslim untuk laki-laki, di sisi lain juga pada model peci (penutup kepala). Lebih dari sekadar itu, kultur dan spirit orang-orang Cina pendatang itu kokoh dan langgeng bercokol pada pribadi anak cucu keturunan mereka hingga kini. Meski tidak bisa dipungkiri, Lombard pun menyajikan fakta dan data banyak pula dari mereka menyembunyikan identitas ke-Tionghoa-an mereka dan melebur bersama masyarakat lokal. Sehingga kini bisa kita cermati ada orang Jawa, Dayak, Minang, dan suku lain di Indonesia memiliki ciri-ciri fisik seperti warga peranakan; berkulit kuning dan bermata sipit,

Pada buku Nusa Jawa jilid ke-3, berjudul *Nusa Jawa Silang Budaya; Warisan Kerajaan Kosentris*, Lombard menyajikan risetnya mengenai “warisan feodalisme” yang tersisa hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu bab di dalamnya, yakni pada bab 2, berjudul ‘Masyarakat yang Hierarkis’, nampaklah masyarakat Jawa yang mulai perlahan meninggalkan sistem kasta. Hampir seluruh bagian Nusantara sekarang meninggalkan pola hierarki yang terpengaruh Hinduisme tersebut, meski jelas, kecuali Pulau Dewata, yang masih terus menerapkannya dalam pola kehidupan keagamaan dan sosio-kultur. Kritisisme Lombard nampak sekali saat ia mencuplik pernyataan Tome Pires dalam *Suma Oriental* abad ke-16, yang menyebutkan betapa angkuh bahasa Jawa. Tidak ada bahasa seangkuh (*oufanja*) bahasa krama milik orang Jawa, siapa berbicara pada

siapa, dan bagaimana tata lisan kata per kata yang tepat sesuai tingkat kedudukannya, hanya bahasa Jawa lah yang memiliki keangkuhan ini. Lombard berusaha adil dengan teks-teks yang tersaji di hadapannya, setelah pada buku pertama ia selesai mendedah cara pandang orang Jawa melihat orang Barat yang dianggapnya sebagai arogan. Dalam buku jilid ke-3 ini ia menunjukkan pandangan yang sebaliknya.

Konsep kosmologi kerajaan Jawa yang mengibaratkan Raja sebagai titisan Dewa di zaman Hindu beralih menjadi raja sebagai utusa Allah di zaman kerajaan Islam. Secara tersirat bahkan, entah diakui atau tidak diakui, baik raja maupun pemimpin di Jawa pasca proklamasi identik dengan penggambaran penguasaan kosmos – yang mana dirupakan dalam bentuk Gunung. Lombard menyajikan sebuah sampul buku HB IX berdiri gagah dengan latar belakang gunung menjulang yang biru nan kokoh. Lombard secara kritis juga menulis perkiraan penyebab watak korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat susah lepas dari para pejabat negara di Indonesia. Terminologi pamong praja yang seolah lekat dan dekat dengan pemimpin pusat menjadikan pejabat negara seolah penuh wewenang. Konsep pamong praja ini berabad-abad terbentuk dalam pikiran masyarakat kita, bahwa merekalah yang memiliki wewenang, bagian dari raja (pada zaman dahulu), bahkan tak sedikit merupakan kerabat raja, maka tak ayal para pemimpin pun di era orde baru belum lepas dari kebiasaan bagi-bagi proyek dan melancarkan korupsi bersama.

Tentunya trilogi Nusa Jawa ini tak luput dari kekurangan sebagai buku sejarah. Namun kritisisme Lombard patut diapresiasi. Kekayaan sumber-sumber teks dan catatan susastra yang jadi rujukannya membuat kita salut bahkan manggu-manggut.

Pertanyaan retorik Lombard pada bagian bawah bab terakhir membuat kita merenung bersama; “apakah peradaban-peradaban yang sekarang kelihatan “besar” di mata kita sesungguhnya bukan merupakan peradaban yang pada awal perkembangannya telah berpeluang berpijak pada berbagai peradaban? Sekaligus sebagaimana Nusantara kita – sedang berada dalam kedudukan di persimpangan jalan?”

Buku ini layak disimak baik-baik, sedikit-demi sedikit, sambil dicermati dan dihayati. Barangkali bukan sebagai sekadar pembelajar, kita membaca buku juga sebagai seorang penghayat diri. Siapakah sejatinya kita di bumi Nusantara?

\*\*\*

# GALERI



**JODIPAN 1**  
Salah satu spot foto instagrammable di Jodipan.

FOTO: TRIO HANDOKO

# ALANIG



**JODIPAN 2**  
Jembatan kaca yang merupakan ikon dari Jodipan menghubungkan antara 2 desa kampung warna warni.

FOTO: TRIO HANDOKO



**BAKSO BAKAR TROWULAN**  
Sedapnya bakso bakar “kenikmatan di balik tiupan kipas dan panasnya arang.”

FOTO: NOVAN HERDIYANTO



**POS KETAN LEGENDA**  
Kenikmatan ketan dipadupadankan dengan lezatnya durian.

FOTO: NOVAN HERDIYANTO

# KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



Siapkan dirimu sebelum mengikuti Ujian Sertifikasi Bendahara Pengeluaran/BPP/Bendahara Penerimaan melalui...

## CRASH PROGRAM BENDAHARA NASIONAL TERSERTIFIKASI

TAUTAN  
PENDAFTARAN:  
[bit.ly/regiscpbnt2020](https://bit.ly/regiscpbnt2020)

WAKTU  
PELAKSANAAN:  
**10 Feb s.d.  
8 Apr 2020**  
[8 Angkatan@300]

INFORMASI  
SELENGKAPNYA:  
**Hubungi Kanwil DJPB/KPPN/  
Balai Diklat Keuangan terdekat  
atau  
Pusdiklat Anggaran dan  
Perbendaharaan  
0251-8244771 | @pusdiklatap**





**InMA**  
INDONESIA INHOUSE MAGAZINE  
AWARD 2020

MAJALAH  
EDUKASI KEUANGAN  
meraih penghargaan

**SILVER  
WINNER**

THE BEST OF GOVERNMENT INHOUSE MAGAZINE 2020

pada ajang

The 9th SPS INDONESIA  
**InMA 2020**

**SPS**  
Sistem Penghargaan SPS

**Silver Winner**  
The Best of Government InMA 2020  
**Edukasi Keuangan**  
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan  
Edisi 51 / 2019  
The 9<sup>th</sup> Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2020

ISSN: 2086-4833



9 712086 483008